



JURNAL INTERAKSI SOSIOLOGI

Volume 1 No 1
September 2021

**Gerakan Antidiskriminasi Masyarakat Sipil Kulit Hitam Amerika
(Analisis Semiotik Film *Selma*)**

Arya Kurniawan, Dalhar Shodiq, Elis Puspitasari

Lansia dan Media Sosial

Salas Maulida, Soetji Lestari, Sotyania Wardhiana

“Rumah Langit”: Harapan Pendidikan Anak Marjinal

Dinda Galih Purwaningrum, Tri Sugiarto, Rili Windiasih

Pemaknaan Mahasiswa tentang Komunisme

Dimas Aditya Nugroho, Tri Wuryaningsih, Dalhar Shodiq

Pembentukan Modal Sosial dan Kepentingan Ekonomi-Politik Negara
Budi Rajab

Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir

Witantri Puspaningrum, Masrukin, Fatmah Siti Djawahir

**Pola Interaksi Orang Tua dengan Anak
dalam Membentuk Pemahaman Seksualitas Anak**

Rosi Yanna, Tri Wuryaningsih, Hendri Restuadhi



Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Prakata

Setelah beberapa lama tidak terbit karena berbagai kendala, di tahun 2022 ini Jurnal Interaksi yang kini menjadi Jurnal Interaksi Sosiologi (JIS) berusaha bangkit kembali melalui terbitnya Volume 1 No. 1, September 2021. Penerbitan yang direncanakan tepat waktu ini, pada akhirnya juga mengalami keterlambatan karena kendala-kendala tersebut. Meski demikian, tim editor berusaha menyajikan naskah-naskah dengan topik-topik yang menarik dan layak diketahui pembaca. Untuk itu, pada terbitan kali ini tersaji tujuh tulisan yang merupakan hasil penelitian dengan berbagai metode mulai dari studi lapangan hingga kajian pustaka.

Topik-topik yang tersaji ini, jika ditarik benang merahnya meliputi setidaknya tiga masalah utama. Pertama, tulisan yang membahas persoalan politik dan ekonomi seperti pada topik mengenai gerakan diskriminasi masyarakat sipil kulit hitam Amerika, pemaknaan komunisme oleh mahasiswa, pembentukan modal sosial dan kepentingan ekonomi politik negara, serta tentang ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Kedua adalah yang menjelaskan tentang pendidikan pada masyarakat terpinggirkan sebagaimana tampak dari artikel berjudul “Rumah Langit: Harapan Pendidikan Anak Marginal”. Ketiga, topik yang berkaitan dengan keluarga seperti pada artikel yang berbicara tentang lansia dan pemahaman seksualitas anak.

Tidak perlu kami berpanjang kata untuk mengomentari isi dari tulisan-tulisan tersebut. Semua kami serahkan kepada pembaca untuk menyimpulkan makna yang bisa dipetik dari dalamnya. Kami hanya berharap tulisan-tulisan yang diramu dalam terbitan edisi ini dapat memberi inspirasi ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Salam

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Gerakan Antidiskriminasi Masyarakat Sipil Kulit Hitam Amerika	1
Lansia dan Media Sosial	23
Rumah Langit Harapan Pendidikan Anak Marjinal	42
Pemaknaan Mahasiswa Purwokerto Tentang Komunisme.....	67
Pembentukan Modal Sosial dan Kepentingan Ekonomi-Politik Negara	80
Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir.....	122
Interaksi Orang Tua Dengan Anak Dalam Membentuk Pemahaman Seksualitas	136

GERAKAN ANTIDISKRIMINASI MASYARAKAT SIPIL KULIT HITAM AMERIKA (Analisis Semiotik Film *Selma*)

Arya Kurniawan, Elis Puspitasari
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
aryakurniawan1997@gmail.com

ABSTRAK

Diskriminasi rasial menunjukkan kuatnya kelas dominan atas kelas marginal. Buruknya tindakan rasial telah banyak mendatangkan sorotan dan penolakan serta lahirnya gerakan antidiskriminasi. Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan dan menjelaskan diskriminasi rasial dan gerakan antidiskriminasi rasial kepada orang kulit hitam dalam film *Selma* (2014) karya Ava Duvernay. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu semiotika Roland Barthes dengan unit analisis tanda secara audio dan visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film *Selma* (2014) merepresentasikan fakta sejarah peristiwa rasialisme di Amerika Serikat pada tahun 1960-an khususnya negara bagian selatan. Tindakan rasial tersebut dilakukan oleh masyarakat kulit putih dan pemerintahan yang menginginkan supremasi kulit putih. Negara telah melakukan *institutional racism* kepada kaum Afro-Amerika. Rasialisme pada akhirnya menimbulkan aksi perlawanan yaitu gerakan antidiskriminasi rasial yang merupakan tipe gerakan sosial baru. Ditemukan beberapa repertoar gerakan sosial yang digunakan oleh orang kulit hitam dalam film *Selma* yaitu aksi duduk (*sit-ins*), diplomasi politik, *framing*, penggunaan simbol agama, pendidikan organisasi, dan narasi *non-violent movement*. Tulisan ini menyarankan perlunya penambahan kasus diskriminasi rasial yang diteliti dan pendekatan yang berbeda agar dunia dapat lebih memahami diskriminasi secara lebih komprehensif.

Kata kunci: gerakan antidiskriminasi, rasisme kulit hitam, film *selma*

ABSTRACT

Racial discrimination shows the strength of the dominant class over the marginal class. The bad racism has brought a lot of attention and rejection and the birth of the anti-discrimination movement. This paper intends to describe and explain racial discrimination and the anti-racial discrimination movement against black people in the film *Selma* (2014) by Ava Duvernay. The approach used in this paper is Roland Barthes' semiotics with audio and visual sign analysis units. The results show that the film *Selma* (2014) represents the historical facts of racism in the United States in the 1960s, especially the southern states. These racist acts were carried out by white people and governments who wanted white supremacy. The state has carried out institutional racism against African-Americans. Racism eventually led to resistance action, namely the anti-racial discrimination movement which is a new type of social movement. There are several repertoires of social movements used by black people in the film *Selma*, namely sit-ins, political diplomacy, framing, use of religious symbols, organizational education, and non-violent movement narratives. This

paper suggests the need for additional researched racial discrimination cases and different approaches so that the world can understand discrimination more comprehensively.

Keywords: *antidiscrimination movements, black peoples racism, film selma*

PENDAHULUAN

Diskriminasi rasial yang dialami oleh orang kulit hitam Amerika merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain karena perbedaan-perbedaan yang dimilikinya seperti perbedaan jenis rambut, hidung, bentuk mata, warna kulit, dan perbedaan lain yang terlihat oleh mata. Perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya menciptakan pengertian tentang "ras", yakni penggolongan manusia yang mengacu pada ciri tubuh yang beragam dengan suatu frekuensi yang besar. Keragaman tak jarang justru menimbulkan diskriminasi terhadap kalangan tertentu. Dari banyaknya perbedaan tersebut yang paling menyolok dan sering dijadikan alasan berlakunya diskriminasi terhadap kalangan tertentu ialah warna kulit. Sejarah mencatat banyak sekali terjadi kasus yang melanggar hak asasi manusia di dunia seperti sejarah kelim orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat

dari masa perbudakan hingga era modern. Orang kulit hitam dianggap sebagai manusia yang tidak berpengetahuan, tidak bermoral dan terbelakang, sedangkan bangsa kulit putih mengklaim atau diklaim sebagai manusia yang unggul, cerdas dan berkuasa. Tindakan rasialisme tersebut membawa dampak pandangan negatif terhadap orang kulit hitam yang masih dirasakan sampai sekarang.

Isu yang berkaitan dengan rasisme masih terus berlanjut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkenal dengan retorika-retorika kampanye rasis dan kotor yang memperlakukan warga kulit hitam dan umat Islam seolah-olah sebagai beban bagi negaranya. Peristiwa-peristiwa rasial pada akhirnya memicu gerakan-gerakan antidiskriminasi ras. Gerakan-gerakan ini mencita-citakan dan

berusaha menciptakan kesetaraan bagi setiap kelompok. Gerakan antidiskriminasi ras pada umumnya bersandar kepada asas kemanusiaan, seperti yang dilakukan Dr. Martin Luther King, Jr yang berjuang bagi masyarakat kulit hitam di Amerika era modern.

Pada tahun 2014 hadir film *Selma*, yaitu sebuah film biografi sejarah Martin Luther King dan peristiwa gerakan antidiskriminasi rasial orang kulit hitam di Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Ava Duvernay yang mengisahkan aksi kekerasan terhadap orang kulit hitam di Kota Selma pada masa pemerintahan Presiden Lyndon B. Johnson. Aktivis hak sipil, Martin Luther King mengorganisir dan menentukan strategi sebuah gerakan sosial. Ia melakukan gerakan dengan narasi anti kekerasan dan melakukan pawai damai menuntut hak suara bagi semua golongan, termasuk orang kulit hitam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rasisme dan gerakan antidiskriminasi rasial di Amerika Serikat yang ada dalam film

Selma. Rumusan masalah yang hendak dijawab adalah: “Bagaimana representasi rasisme dan gerakan sosial antidiskriminasi rasial yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kulit hitam Amerika Serikat yang ada dalam film *Selma*?”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Gerakan Sosial Antidiskriminasi

Gerakan sosial menurut Giddens (1999) diartikan sebagai suatu bentuk upaya yang bertujuan mengejar kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*). Gerakan sosial dinilai sebagai suatu aktivitas yang khas dari masyarakat sipil. Gerakan sosial baru (GSB) memfokuskan pada isu-isu yang lebih bersifat kultural, humanis, dan nonmaterialistis. Tujuan dan nilai-nilai yang dipakai GSB lebih bersifat universal, diarahkan membela esensi dan melindungi kondisi kemanusiaan untuk masa depan yang lebih baik. Konkritnya, GSB mengangkat isu-isu seperti isu lingkungan, antiperang, perdamaian, feminisme, hak-hak sipil, antiglobalisasi dan sejenisnya (Putra, dkk, 2006).

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis film *Selma* adalah pendekatan *repertoire*, yaitu pendekatan yang digunakan sebagai pilihan bentuk strategi dan taktik aksi kolektif dalam menjelaskan tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Tilly menekankan bahwa *repertoire* didedikasikan sebagai alat interaksi di antara sekelompok masyarakat dalam jumlah besar bukan di antara individu (Situmorang, 2013). Tilly menjelaskan lebih lanjut bahwa *repertoire* adalah sekumpulan alat yang dapat dipergunakan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai keinginan mereka. *Repertoire* yang dilakukan Martin Luther King berbeda dengan tokoh lain yang sama-sama menginginkan keadilan bagi kulit hitam, yaitu Malcolm X yang lebih menggunakan cara-cara kekerasan dalam gerakannya dan mendukung supremasi kulit hitam daripada penekanan gerakan hak-hak sipil yang dilakukan King. Singkatnya, taktik sangatlah berpengaruh kuat terhadap keberhasilan suatu gerakan sosial.

2. Rasisme Masyarakat Kulit Hitam Amerika

Daldjoeni (1991) mengatakan bahwa ras dalam pertaliannya dengan makna rasisme, merujuk pada kelompok manusia yang ditentukan oleh dirinya sendiri atau pihak lain, yang berlainan secara kultural berdasarkan ciri-ciri jasmaniah yang tidak dapat berubah. Rasisme dapat mendorong munculnya beragam tindakan yang menjurus kepada diskriminasi sosial hingga segregasi sosial, penaklukan kolonial, pengucilan, deportasi paksa bahkan genosida dan perbudakan, Tindakan yang terjadi tersebut didefinisikan sebagai rasialisme. Menurut Irfani (2019), sejarah diskriminasi rasial Amerika tidak dapat dilepaskan dari perbudakan dan Perang Sipil yang meletus pada 1861 sampai 1865. Perang itu terjadi antara wilayah selatan dan utara, *Union* melawan Konfederasi, antara pihak yang menolak perbudakan dan memberlakukan perbudakan. Pada akhirnya sistem perbudakan menghasilkan rasisme sampai era modern Amerika saat ini. Neubeck

dalam tulisannya mengklasifikasikan jenis perilaku rasisme dalam bukunya yang berjudul *Social Problem: A Critical Approach*. Tipe pertama yaitu *personal racism* (individu atau kelompok kecil) yang mengungkapkan perasaan negatif atau dengan tindakan terhadap orang berkulit hitam. Tipe kedua yaitu *institutional racism*, yaitu sebuah institusi melakukan operasi rutin berskala besar seperti bisnis dan sistem kerja politik untuk merugikan kelompok minoritas pada umumnya (Azhar, 2018).

3. Film *Selma* dalam Semiotika

Film *Selma* mengandung tanda-tanda yang dapat dikaji dengan analisis semiotika. Dalam hal ini, analisis semiotika mengkaji bagaimana representasi rasisme dan gerakan sosial yang terdapat pada film tersebut. Pendekatan Roland Barthes digunakan dalam menafsirkan atau menginterpretasi tanda-tanda terstruktur yang terdapat dalam film *Selma*. Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure, tetapi Saussure kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja

menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan "*order of signification*", mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal).

METODE PENELITIAN

Diskriminasi rasial dan gerakan anti diskriminasi dalam film *Selma* dipilih sebagai subjek kajian tulisan ini atas dua pertimbangan. Pertama, gambaran atas perjuangan hak orang kulit hitam dan penghentian kekerasan terhadapnya. Kedua, adanya gambaran perbedaan latar fisik dan sosial yang sangat kontroversial sehingga sangat memungkinkan terjadi konflik dan perpecahan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis semiotika Ronald Barthes. Data

diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari visual dan dialog dalam film Selma yang menunjukkan adegan diskriminasi dan gerakan sosial antidiskriminasi. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal yang berkaitan film Selma. Data yang dibutuhkan terdiri atas data wujud dan implikasi. Wujud menyangkut diskriminasi rasial dan bentuk gerakan sosial antirasialisme. Berbagai adegan yang memperlihatkan pola-pola diskriminasi rasial dan gerakan sosial antidiskriminasi rasial.

Bahan penelitian ini adalah film Selma karya Ava Duvernay yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan biografi drama sejarah yang menggambarkan diskriminasi rasial sekaligus bagaimana penolakannya dalam bentuk gerakan sosial antidiskriminasi di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Martin Luther King, Jr. Proses penelitian berlangsung dengan beberapa tahap. Pertama, menonton dan mengamati adegan film Selma secara keseluruhan. Kedua, melakukan

pengkategorian adegan visual dan dialog yang menunjukkan adegan diskriminasi dan gerakan antidiskriminasi. Ketiga, mengumpulkan beberapa adegan terpilih sekaligus melakukan *capturing* terhadap adegan tersebut. Adegan-adegan yang relevan dianalisis secara semiotik Ronald Barthes dan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

1. Signifier (penanda)	2. Signified (petanda)
3. Denotative sign (Tanda Denotatif)	
4. Connotative Signifier (Penanda Konotatif)	5. Connotative Signified (Petanda Konotatif)
6. Connotative Sign (Tanda Konotatif)	

Tabel 1. Peta Tanda Barthes (Sumber: Sobur, A: 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wujud Diskriminasi Rasial

a. Adegan Pengeboman Gereja

Makna denotatif yang dapat diambil dari adegan tersebut adalah kebrutalan akibat adanya ideologi rasis ekstrem kelompok KKK (*Ku Klux Klan*). Ideologi supremasi kulit putih sekte KKK ini menghalalkan tindakan pembunuhan atau aksi terror lainnya. Makna konotatif yang muncul dari adegan tersebut adalah serangan kepada masyarakat kulit hitam bisa

terjadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun dan dalam berbagai bentuk aksi. Yang paling menakutkan adalah aksi terror dan pembunuhan seperti yang digambarkan dalam adegan tersebut.

Sekelompok anak perempuan kulit hitam sedang berjalan di sebuah tangga gereja negro. Mereka akan melakukan peribadatan dan kemudian dengan seketika terjadi ledakan yang menewaskan mereka.	Sekelompok anak perempuan kulit hitam yang tewas terkena ledakan saat akan melakukan peribadatan di gereja. Peledakan itu terjadi dari luar gereja dengan dahsyat. Adegan itu merupakan penggambaran dari peristiwa nyata yang didalangi oleh kelompok sekte <i>Ku Klux Klan</i> (KKK).
Peristiwa yang menunjukkan kebrutalan karena ideologi supremasi ras yang ekstrim	Masyarakat kulit hitam dipandang sebagai penyakit di masyarakat yang harus disingkirkan dengan menghalalkan berbagai cara, tidak terkecuali melalui pembunuhan dan aksi teror lainnya.

Serangan kekerasan kepada kelompok masyarakat kulit hitam di Amerika khususnya Alabama bisa terjadi kapan saja, dimana saja, kepada siapa saja dan bagaimana saja, termasuk melakukan pembunuhan.

Tabel 2. Signifikansi dua tahap Barthes dalam adegan pengeboman gereja

b. Adegan Pembunuhan Jimmie Lee Jackson

Jimmie Lee Jackson dibunuh oleh polisi kulit putih dengan tembakan yang mengarah pada dadanya. Makna denotatif yang dapat diambil dari adegan tersebut adalah pembunuhan masyarakat sipil kulit hitam oleh aparat kepolisian, sedangkan makna konotatifnya ialah memberikan ketakutan kepada orang kulit hitam, bahwa aparat dapat mengambil tindakan kekerasan kepada orang kulit hitam yang berani mengikuti gerakan demonstrasi.

Gambar tangan seorang polisi yang menembakkan peluru dari pistolnya ke arah dada Jimmie Lee Jackson. Polisi lainnya terlihat memukul tubuh kakek Jimmie dan terdapat Viola Lee Jackson (Ibu Jimmie)	Aksi represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada Jimmie Lee Jackson dengan memukul dan menembak.
---	--

yang berteriak "Stop it!"	
Pembunuhan masyarakat sipil kulit hitam oleh aparat kepolisian.	Memberikan pandangan bahwa aparat keamanan melakukan tindakan brutal dan tidak memberikan rasa aman kepada orang kulit hitam, bahkan justru menghilangkan nyawa masyarakat sipil kulit hitam yang tidak berdaya.
Memberikan ketakutan dengan tindakan kekerasan aparat kepada orang kulit hitam yang berani mengikuti gerakan demonstrasi.	

Tabel 3. Signifikansi dua tahap Barthes dalam pembunuhan Jimmie Lee Jackson

c. Adegan Diskriminasi Rasial di Kantor Pengadilan

Makna denotatif dalam adegan tersebut adalah pelayanan birokrasi yang mempersulit orang kulit hitam untuk menggunakan hak suaranya. Pemerintahan Alabama yang saat itu dikuasai oleh Gubernur George Wallace, tidak menginginkan kantong-kantong kekuasaan dalam pemerintahan Alabama diisi oleh orang yang memihak dan membela hak kaum kulit hitam di Alabama.

Adegan yang menceritakan pengisian	Menunjukkan pelayanan birokrasi
------------------------------------	---------------------------------

formulir pendaftaran dan ditolak nya pendaftaran hak suara Annie Lee Cooper oleh seorang administrator kulit putih	yang mempersulit orang kulit hitam untuk mendapatkan hak suaranya dalam pemilihan umum di Alabama
Pelayanan birokrasi yang mempersulit orang kulit hitam untuk mendapatkan hak suaranya.	Memberikan pandangan birokrasi pemerintahan di Alabama yang diskriminatif kepada orang kulit hitam dalam menggunakan hak suaranya.
Memberikan pandangan birokrasi pemerintahan di Alabama yang diskriminatif kepada orang kulit hitam dalam menggunakan hak suaranya, pemerintahan yang diduduki sebagian besar orang kulit putih tidak menginginkan orang kulit hitam menggunakan hak suara dan memilih pemimpin yang merepresentasikan mereka	

Tabel 4. Signifikansi dua tahap Barthes dalam adegan diskriminasi rasial di kantor pengadilan

2. Pembahasan Rasialisme:

a. Rasialisme dalam Film *Selma* (2014)

Rasisme ternyata tidak muncul hanya dalam tataran kognitif berupa prasangka rasial dan konstruksi *stereotype*, akan tetapi rasisme juga terwujud dalam bentuk tindakan berupa diskriminasi secara bahasa

(*verbal discrimination*), diskriminasi pengucilan (*exclusion*), diskriminasi secara fisik (*physical abuse*), bahkan sampai pada bentuk pembasmian (*extincition*).

Peledakan bom di gereja orang kulit hitam yang berada di *16th Street Baptist Church*, Birmingham, merupakan bagian kejahatan rasial yang kejam dengan korban anak-anak kecil. Tindakan rasial yang dilakukan oleh sekelompok anggota Ku Klux Klan tersebut adalah salah satu bentuk diskriminasi pembasmian (*ectincition*). Kemudian ada pula tindakan diskriminasi secara fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan fisik yang diterima Jimmie Lee Jackson dan keluarganya sampai pada akhirnya Jimmie meninggal dunia karena luka tembak yang diterimanya. Penolakan pendaftaran hak suara Annie Lee Cooper merupakan salah satu bentuk diskriminasi dengan melakukan pengucilan (*exclusion*) kepada orang kulit hitam. Orang kulit putih memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga dengan mudahnya mereka memilih calon pemimpin yang dikehendaknya, sedangkan orang

kulit hitam tidak mendapatkan itu. Hak suara mereka dikucilkan agar konstruksi supremasi kulit putih tetap berlangsung.

b. Analisis Teoritis Hegemoni Gramsci dalam Melihat Rasisme di Amerika Serikat

Hegemoni ideologi rasisme dilakukan kepada orang kulit hitam dengan dua perangkat kerja yaitu kekerasan dari negara (*state*) dan hegemoni kultural dengan penanaman ideologi-ideologi rasis yang secara tidak sadar dilakukan tanpa merasa bersalah, bahkan dianggap biasa. Fungsi hegemoni adalah mengabsahkan pemerintahan Amerika Serikat dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan itu. Bila hegemoni tercapai, penguasa tak perlu terus menerus menindas orang kulit hitam karena mereka, orang Afrika-Amerika akan pasrah pada *status quo*. Masyarakat Amerika terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri, atau melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai kehendak ilahi.

c. Kondisi Rasisme di Amerika Serikat Terkini

Saat ini bentuk hegemoni rasis tersebut masih dilakukan dalam peradaban modern AS. Pasca Donald Trump terpilih dan dilantik pada tanggal 21 Januari 2017, ia terus melakukan intimidasi dan memberikan kebijakan-kebijakan yang sarat dengan rasisme. Dalam kampanyenya, Trump selalu menggaungkan slogan “*America First*” sebagai alat hegemoninya dengan janji rencana program pembaharuan ekonomi dan kebijakan rasis seperti penolakan kepada imigran muslim dan orang kulit hitam dan Latin dengan dalih pembangunan SDM dan ekonomi “rakyat” Amerika. Kebijakan tersebut mengundang kontroversi. Banyak yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk nasionalisme Trump, namun di lain sisi banyak pula kritikan yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut adalah penggambaran fasisme dan rasisme, sebab pada praktiknya banyak hal yang jauh dari ekspektasi.

3. Wujud Gerakan Sosial Antidiskriminasi Rasial

a. Adegan King melakukan strategi *political lobbying* dalam gerakan

Makna denotatif yang muncul dari adegan tersebut ialah King yang sedang meminta ketegasan Presiden Lyndon dengan menerbitkan UU Federal yang menjamin hak negro untuk bebas memilih. Tanda denotatif muncul dari adanya gambar adegan terpilih dan dialog yang menjelaskan segala permasalahan hak sipil masyarakat sipil kulit hitam di selatan AS pada saat itu. King mengungkapkan, “*We want federal legislation granting Negroes the right to vote unencumbered.*”. Makna konotatif yang dapat ditarik dari adegan terpilih tersebut yaitu penggambaran strategi gerakan sosial yang dipimpin King dengan melakukan *political lobbying*.

Gambar dan dialog yang menjelaskan Martin King sedang berdialog dengan Presiden Lyndon Johnson tentang permasalahan hak suara	King meminta ketegasan Presiden Lyndon terhadap permasalahan hak suara di selatan Amerika dengan menerbitkan UU Federal
---	---

orang kulit hitam di selatan Amerika.	yang menjamin hak negro untuk bebas memilih.	
King meminta ketegasan Presiden Lyndon dengan menerbitkan UU Federal yang menjamin hak negro untuk bebas memilih.		Menggambarkan perjuangan gerakan Martin Luther King Jr. yang mewakili masyarakat kulit hitam Amerika dengan cara melakukan <i>political lobbying</i> dengan Presiden AS.
Menggambarkan strategi <i>political lobbying</i> dalam gerakan sosial antidiskriminasi rasial yang dipimpin King.		

Tabel 5. Signifikansi dua tahap Barthes adegan dalam *political lobbying*

b. Adegan penggunaan strategi pemingkanaan (*framing*) dalam gerakan

Makna denotatif yang muncul dari adegan tersebut ialah Martin yang sedang memberikan sebuah cara untuk menghentikan sikap Presiden Lyndon B. Johnson yang tidak acuh. Kalimat “*Right now Johnson has other fish to fry and he’ll ignore us if he can*” memberikan penggambaran tentang kondisi Johnson yang sedang memiliki urusan lain dan mungkin akan mengabaikan gerakan mereka. Rencana yang akan mereka lakukan ialah membuat drama agar masuk ke

dalam surat kabar dan disiarkan di televisi.

Makna konotatif yang dapat diambil ialah adanya penggunaan strategi *framing* untuk menarik massa dan kepedulian presiden. *Framing* merupakan bentuk strategis yang sering dilakukan dalam gerakan sosial pada umumnya. Hal ini bertujuan membuat masyarakat mengetahui tuntutan dan kondisi aksi di sebuah gerakan sosial.

Gambar dan dialog yang menjelaskan Martin Luther King sedang berbicara di depan anggota SCLC dan SNCC.	King memberikan sebuah cara untuk menghentikan sikap Presiden Johnson yang tidak peduli.	
King memberikan sebuah cara menghentikan sikap Presiden Johnson yang tidak peduli.		Menggunakan strategi <i>framing</i> dalam aksi duduk agar Presiden Johnson mendengarkan aspirasi mereka.
Menggunakan strategi <i>framing</i> untuk menarik massa dan kepedulian Presiden .		

Tabel 6. Signifikansi dua tahap Barthes dalam adegan *framing* gerakan.

**c. Adegan aktivis Southern
Christian Leadership Conference
(SCLC) melakukan pelatihan
kepada calon peserta aksi**

Makna denotatif dari *scene* tersebut ialah Hosea yang sedang melakukan pelatihan kepada calon peserta aksi. Hosea Williams yang merupakan bagian dari organisasi SCLC menyampaikan beberapa inti dari konsep *non-violence movements* yaitu tanpa kekerasan dan mengutamakan komunikasi. Makna konotasi yang muncul dari adegan tersebut ialah konsolidasi dengan melakukan pendidikan organisasi kepada calon peserta aksi merupakan hal penting dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial.

Gambar dan dialog yang menunjukkan Hosea Williams sedang berbicara kepada orang-orang negro.	Hosea sedang melakukan pelatihan kepada peserta aksi.	
Hosea sedang melakukan pelatihan kepada peserta aksi.		Menunjukkan konsolidasi dengan melakukan pendidikan organisasi kepada calon peserta aksi merupakan hal penting dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial.
Menunjukkan konsolidasi dengan melakukan pendidikan organisasi kepada calon peserta aksi merupakan hal penting dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial.		

Tabel 7. Signifikansi dua tahap Barthes dalam adegan pelatihan peserta aksi

d. Adegan King berpidato di Gereja

Makna denotatif dari adegan tersebut adalah King melakukan ceramah keagamaan di sebuah gereja kulit hitam di kota Selma. Ini muncul dari status King sebagai pendeta Kristen kulit hitam, dan simbol-simbol keagamaan seperti salib, kaca patri, dan organ gereja. Untuk makna konotatif yang dapat diambil adalah King melakukan penggalangan massa kulit hitam Selma. Ini bertujuan untuk melakukan protes kepada pemerintah

dengan diskriminasi yang diterima. Penggunaan simbol keagamaan ini adalah strategi efektif untuk meyakinkan massa agar mau bergerak dan melawan ketidakadilan yang ada.

Gambar dan dialog yang menunjukkan King sedang berbicara di hadapan orang banyak.	King sedang melakukan ceramah kepada umat Kristiani di sebuah gereja orang kulit hitam.
King melakukan ceramah kepada umat Kristiani di sebuah gereja orang kulit hitam.	Menunjukkan penggunaan mimbar keagamaan sebagai alat menggalang massa dalam gerakan sosial antidiskriminasi orang kulit hitam.
Penggunaan mimbar keagamaan sebagai alat perjuangan orang kulit hitam.	

Tabel 8. Signifikansi dua tahap Barthes dalam adegan king berpidato di gereja

e. Aksi Berlutut sebagai Strategi dalam Gerakan Antidiskriminasi Rasial

Makna denotatif dari adegan tersebut ialah aksi berlutut yang dilakukan masyarakat kulit hitam Selma di depan gedung pengadilan. Makna konotatif yang dapat diambil dari adegan tersebut adalah strategi gerakan warga kulit hitam Selma dengan menentang tindakan rasis dan inkonstitusional yang dilakukan oleh

negara bagian Alabama. Strategi yang dimaksud adalah aksi berlutut. Aksi berlutut yang direncanakan King berguna untuk memancing sifat Sheriff Jim Clark yang dikenal emosional dan brutal. Aksi ini diharapkan akan membuat para jurnalis melaporkannya menjadi informasi dalam bentuk surat kabar atau berita-berita di TV, sehingga masyarakat tersadarkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada orang-orang negro. Harapan selanjutnya, masyarakat akan bersimpati dalam gerakan orang kulit hitam tersebut.

Gambar yang menunjukkan masyarakat kulit hitam kota Selma sedang berlutut dengan melipat tangan ke belakang kepala di depan gedung pengadilan kota.	Melakukan aksi berlutut di depan gedung pengadilan oleh masyarakat kulit hitam kota Selma.
Aksi berlutut yang dilakukan masyarakat kulit hitam Selma di depan gedung pengadilan.	Strategi gerakan dengan menentang tindakan rasis dan inkonstitusional yang dilakukan oleh negara

	bagian Alabama.
Aksi berlutut sebagai strategi gerakan melawan rasisme dan pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah Alabama.	

Tabel 9. Signifikansi dua tahap Barthes dalam adegan aksi berlutut sebagai strategi gerakan

4. Pembahasan Gerakan

Antidiskriminasi Rasial

a. Gerakan Antidiskriminasi Rasial Orang Kulit Hitam Amerika Serikat sebagai *New Social Movement*

Peristiwa gerakan antidiskriminasi rasial di AS yang ditampilkan dalam film *Selma* saat itu merupakan bentuk gerakan sosial baru. Berbeda dengan gerakan sosial lama, gerakan sosial baru (GSB) adalah gerakan sosial yang memusatkan perhatian pada isu-isu yang baru, kepentingan baru dan medan konflik sosial yang baru. Gerakan sosial baru pada umumnya tidak mengandung atau mendukung potensi munculnya aksi-aksi seperti “pemberontakan petani” atau “perjuangan agraria” (Singh, 2010). Gerakan sosial antidiskriminasi ras di film *Selma* digambarkan sebagai sekelompok masyarakat yang bergerak menentang diskriminasi yang dilakukan masyarakat kulit putih

dan pemerintah dengan cara damai dan bukan aksi huru-hara, kekerasan, atau pemberontakan.

b. Kepemimpinan Intelektual Organik Martin Luther King dalam Gerakan Antidiskriminasi Ras

King mampu memanfaatkan Penerima Nobel Perdamaian (*assigned status*) sebagai modal untuk berdiplomasi dengan orang setingkat presiden demi keadilan bagi masyarakat sipil kulit hitam. Bagi Gramsci untuk melakukan perubahan sosial dibutuhkan seseorang yang disebutnya sebagai intelektual organik, yaitu orang yang memiliki kecerdasan dan pengaruh moral untuk melakukan perang posisi melawan hegemoni ideologi yang berkuasa. Intelektual organik sangatlah diperlukan dalam pencapaian sebuah revolusi. Ia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang banyak agar menghapuskan kesadaran palsu menjadi kesadaran kritis (secara perlahan).

Martin Luther King Jr bagi Gramsci adalah pemimpin yang tidak sekedar menjelaskan kehidupan

sosial dari luar berdasarkan kaidah saintifik, tapi juga memakai kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman *real* yang tidak dapat diekspresikan oleh masyarakat. Intelektual organik adalah mereka yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan kaum marginal kepada mereka dan mengungkapkan apa yang dialami dan kecenderungan-kecenderungan objektif masyarakat (Sugiono, 2006).

c. Aksi Non-Violent Movement

sebagai Repertoar Gerakan Sosial

Pembingkaiian (*framing*) tidak dapat dilepaskan dari teknik gangguan yang direncanakan oleh *Southern Christian Leadership Conference* (SCLC) dan *Student Nonviolent Coordinating Committee* (SNCC). Martin melakukan *longmarch* damai dengan tujuan untuk menarik perhatian aparat keamanan yang terkenal emosional. Menurut Fisher (Putra, dkk, 2006) taktik ini dinamakan sebagai teknik mengganggu (*disruptive tactics*), yaitu taktik yang memiliki kaitan dengan efektivitas gerakan sosial. Hal ini

dapat terjadi karena gerakan sosial pada umumnya tidak memiliki sumber daya yang cukup memadai seperti dana, suara, serta akses sehingga saluran-saluran yang masuk akal tidak dapat digunakan. Dengan teknik mengganggu ini akan menarik media massa sehingga terjadi *framing*.

Tujuan utama *framing* itu sendiri adalah menimbulkan simpati dan empati warga masyarakat AS baik kulit putih, kuning dan hitam untuk mendukung gerakan tersebut. Dengan kata lain penggunaan media massa sebagai alat untuk menciptakan hegemoni ideologi tandingan dari pemerintah, yaitu tindakan aparat keamanan yang merupakan kaki tangan penguasa tidaklah dibenarkan. Di sisi lain massa aksi yang melakukan gerakan tersebut adalah korban dan mereka dianggap benar, patut untuk perlu didukung.

d. Peran Media Massa dan Framing dalam Gerakan Antidiskriminasi Ras Kulit Hitam

Media massa memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi secara aktual dan kritis tentang suatu peristiwa yang terjadi.

Media massa menjadi alat yang signifikan untuk menyadarkan pihak lawan dan khalayak. *Framing* menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan. *Framing* juga menentukan apakah peristiwa dianggap sebagai suatu isu (*social problem*) atau tidak. Dalam proses pendefinisian masalah sosial tersebut *framing* memainkan peranan penting, karena *framing* merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan perhatian khalayak bagaimana seharusnya peristiwa dilihat.

Lofland (2007) memaparkan bahwa untuk efektivitas sebuah gerakan kolektif, dibutuhkan adanya bingkai gerakan yang memegang tiga prinsip dasar. Pertama, *punctuation* yaitu adanya penandaan yang dapat menjelaskan situasi di luar, yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa di luar sana ada kondisi atau tindakan yang diskriminatif, tidak adil, tidak setara, tidak manusiawi, tidak demokratis, melanggar HAM, dan sebagainya. Kedua *attribution* artinya pemberian atribut dan diagnosis. Identifikasi dilakukan para

aktor yang awalnya “menyalahkan” kondisi problematik dengan mengidentifikasi agen-agen yang patut disalahkan atau ditentang, kemudian melakukan prognosis dengan memberikan kerangka yang solutif. Yang ketiga adalah *articulation*.

Prinsip ini berisi kerangka tindakan kolektif yang memungkinkan aktor mengartikulasi dan menyusun jaringan luas, misalnya melakukan sebuah *event*, sehingga ada kebersamaan dan pola yang kooperatif. Ini seperti yang dilakukan oleh Martin, SCLC, SNCC yang merencanakan aksi di depan gedung pengadilan untuk memberi tanda kepada masyarakat bahwa terdapat tindakan represif, diskriminatif, dan tidak manusiawi di Selma. Kemudian Martin mengidentifikasikan pemerintah pusat/federal, orang rasis, orang yang apatis, rohaniawan apatis, dan lain-lain sebagai pihak yang bersalah atau memperparah ketidakadilan. Kemudian ia mengajak masyarakat untuk ikut bersama dalam gerakan sebagai jalan untuk mencapai

tujuan keadilan (*Voting Rights Act 1964*).

e. Repertoar Perlawanan Masyarakat Sipil Kulit Hitam AS dalam Gerakan Antidiskriminasi Ras.

Aksi perlawanan orang kulit hitam yang dimotori oleh Martin Luther King Jr merupakan akibat konflik struktural yang berkepanjangan antara kaum Afro-Amerika dengan pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah federal. Apa yang diperspektifkan oleh Tilly tentang *social movement* dan repertoar tampaknya sejalan dengan temuan analisis dalam Film *Selma* (2014) yakni aksi-aksi perlawanan kolektif yang mulai memasuki arena pertentangan. Dimulai dengan tahap perjuangan dari perorangan ke tahap kelompok, aksi itu dilanjutkan ke tahap gerakan.

Aksi perlawanan dilakukan dengan cara bertahan, protes, aksi birokrasi, diplomasi politik, pengadilan dan diakhiri dengan sahnya *Voting Rights Act 1964*. Pada gerakan sosial yang direpresentasikan oleh Film *Selma* (2014) tergambar

bagaimana terjadinya pembunuhan, pembantaian, represifitas, konfrontasi, mobilisasi dan pawai damai dari Selma ke Montgomery yang menghasilkan disahkannya *Voting Rights Act 1964*.

f. Mobilisasi Sumber Daya dalam Gerakan Antidiskriminasi Racial

Semua adegan dalam film *Selma* yang telah dianalisis mengandung relevansi dengan teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization theory*) dalam kajian gerakan sosial. Mobilisasi sumber daya tidak dapat dilepaskan dari *framing* dan *repertoire* gerakan antidiskriminasi rasial. Ketiganya saling terhubung satu sama lain. Misalnya adegan aksi berlutut/duduk, dengan teknik mengganggu (*disruptive tactics*) yaitu dengan berlutut sebagai repertoar gerakan.

Dalam hal ini, media memiliki peran untuk mengemas peristiwa aksi kekerasan yang terjadi sehingga menciptakan *framing* isu yang didistribusikan kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka bahwa kota Selma benar-benar diskriminatif

dan penuh intimidasi kepada orang kulit hitam.

KESIMPULAN

Film Selma (2014) merepresentasikan tindakan rasialisme yang banyak dilakukan oleh negara. Negara AS khususnya bagian selatan telah melakukan tindakan yang dinamakan sebagai *institutional racism*, yaitu tindakan rutin dan terstruktur untuk menguasai dan mendominasi sekelompok orang berdasarkan ras yang dimiliki. Supremasi kulit putih menjadi seperangkat kerja ideologi yang digunakan untuk menghegemoni dan mendominasi orang kulit hitam. Terdapat setidaknya 6 aksi kekerasan yang ditampilkan sebagai representasi rasialisme seperti pembasmian, pembunuhan, pemukulan, dan represifitas polisi. Selain itu juga terdapat diskriminasi pelayanan birokrasi kepada orang kulit hitam.

Film ini menjadi representasi gerakan sosial baru. Selain itu ia merepresentasikan strategi-strategi gerakan sosial. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga teori

besar gerakan sosial yaitu repertoar, *framing* dan mobilisasi sumber daya. Ketiganya saling melengkapi dan bertautan satu sama lain. Strategi atau repertoar gerakan yang ditampilkan, di antaranya adalah aksi pawai damai, teknik mengganggu seperti aksi duduk (*sit-ins*), diplomasi politik, *framing*, penggunaan simbol agama, pendidikan organisasi kepada peserta aksi, dan narasi *non-violent movement*.

Dari adegan-adegan tersebut semuanya mengandung *framing* dan mobilisasi sumber daya. Dalam mobilisasi sumber daya, jejaring organisasi memiliki peran penting dalam sebuah gerakan sosial. Dibutuhkan kepiawaian seorang pemimpin untuk mampu berkomunikasi dengan orang di luar dan di dalam organisasi gerakan. Selain itu narasi *non-violent movement* menjadi *tagline* utama untuk membingkai sifat moral gerakan tersebut.

Studi ini menyumbangkan perspektif dalam melihat diskriminasi rasial dan gerakan antidiskriminasi rasial melalui sebuah film Selma. Berbagai bentuk mengenai wacana

diskriminasi telah menjadi dasar bagi munculnya gerakan antiradikalisme. Tulisan ini memiliki keterbatasan dalam sumber data yang hanya berdasar pada film Selma, sehingga tulisan menjadi kurang komprehensif untuk melihat diskriminasi dan gerakan anti diskriminasi di Amerika Serikat. Studi lanjutan yang mengakomodasi sumber informasi dari informan seperti pengamat film dan pengamat sosial dapat menjadi sumber pengetahuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnof, O. V. (1984). *Louis Althusser, Tentang Ideologi, Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta : Jelasutra.
- Arungbudoyo, W. (2017, Agustus 15). *Trump: Rasisme Tidak Punya Tempat di Amerika Serikat*. Retrieved Oktober 25, 2018, from Okezone News: <https://news.okezone.com/read/2017/08/15/18/1756048/trump-rasisme-tidak-punya-tempat-di-amerika-serikat>
- Azhar , M. (2018). *"Analisis Semiotika Pemaknaan Rasisme Dalam Film Hidden Figures Karya Theodore Melfi"*. Ciputat, Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunika. Retrieved from Fidkom UIN Jakarta.
- BBC. (2017, Oktober 3). *Donald Trump Meretweet tiga video anti-muslim: Siapa Perempuan di Balik Itu?* Retrieved Oktober 25, 2018, from BBC Indonesia.
- crmvvet.org. (2019, - -). *Civil Rights Movement History*. Retrieved 10 28, 2019, from crmvvet.org: <https://www.crmvet.org/tim/timhis60.htm#1960nsm>
- Dani, A. (2016, September 1). *Sejarah Kebencian terhadap Etnis Tionghoa*. Retrieved Oktober 25, 2018, from Tirto: <https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp>
- Diani , M., Porta , D., & Donatella. (1999). *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Fiske, J. (1990). *Introduction to Communication Studies*. London: Methuen & Co. Ltd.
- Fleming, J. (2005, Maret 6). *The Death of Jimmie Lee Jackson*. Retrieved 10 21, 2019, from The Anniston Star: https://www.annistonstar.com/article_1290419c-ab42-50c6-ac62-c24c9bdda9f2.html
- Gani, P. K. (2013, September 04). *Lobbying*. Retrieved Oktober 22, 2019, from Prita Kamal Gani LSPR: <http://www.lspr.edu/pritakemal-gani/lobbying/>
- Heryanto, A. (1997, Mei 5). *Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci*. Retrieved from Ariel Heryanto: https://arielheryanto.files.wordpress.com/2016/02/1997_05_05_fk-hegemoni-kekuasaan-versi-gramsci-c1.pdf

- Irab, Y. (2007). "Rasisme". *Jurnal Jaffray*, V, 50.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.
- Lofland, J. (2007). *Protests: Studies of Collective Behavior and Social Movement*. New Jersey: Transaction Publisher.
- Marden, C. F., & Meyer, G. (1968). *Minorities in American Societies*. New York: American Book Company.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Melati, S. (2015). MAHASISWA PENGGUNA MEDIA SOSIAL (STUDI TENTANG FUNGSI MEDIA SOSIAL BAGI MAHASISWA FISIPUR). *JOM FISIP*, 2(2), 1-11.
- Metacritic. (2014, - -). *Selma*. Retrieved March 10, 2019, from Metacritic: <https://www.metacritic.com/movie/selma>
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naibaho, Y. F., & Sawitri, D. R. (2017). HUBUNGAN ANTARA REGULASI DIRI DENGAN KONFLIK PERAN PADA MAHASISWA ORGANISATORIS DI FKM DAN FISIP UNIVERSITAS DIPONEGORO. *Jurnal Empati*, 7(3), 204-211.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nisiforou, E., & Laghos, A. (2015). Examining the effect of gender identity on the use of social media technology: A higher education approach. *Journal of Arts and Humanities*, 4(4), 16-32.
- Nurdiarti, R. P. (2018, Juni 1). MEDIA SOSIAL, POLA INTERAKSI DAN RELASI SOSIAL PADA GRUP WHATSAPP ALUMNI SDK. ST. MARIA BLITAR. *ETTISAL Journal of Communication*, 3(1), 49-61.
- Nurjaila. (2018, February 9). *PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UINAR-RANIRY*. Retrieved from Institutional Repository of UIN Ar-Raniry Banda Aceh: <https://repository.ar-raniry.ac.id/4864/1/Nurjaila.pdf>
- Owusu-Acheaw, M., & Larson, A. G. (2015). Use of Social Media and its Impact on Academic Performance of Tertiary Institution Students: A Study of Students of Koforidua. *Journal of Education and Practice*, 6(6), 94-101.
- ParsToday. (2018, Oktober 25). *Bangkitnya Rasisme Amerika di Era Trump*. Retrieved from ParsToday.

- Pilliang, Y. A. (2012). *Semiotika dan Counter Semiotika*. Jakarta: Serambi.
- Plummer, K. (2010). *Sociology: The Basic*. London: Routledge.
- Putra, dkk. (2006). *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Averrous Press.
- Rakhmat, J. (2009). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reed, R. (1965, February 1965). *WOUNDED NEGRO DIES IN ALABAMA; He Said Trooper Shot Him -- Statement by Assailant Reported by Prosecutor*. Retrieved 10 21, 2019, from The New York Times: <https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1965/02/27/97186753.html>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P., & Judge, A. T. (2008). *Perilaku organisasi* (12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rotten Tomatoes. (2015, January 9). *Selma*. Retrieved March 10, 2019, from Rotten Tomatoes: <https://www.rottentomatoes.com/m/selma>
- Schermerhorn, J. R., Osborn, R. N., & Uhl-Bien, M. &. (2012). *Organizational behavior* (12th ed.). New Jersey: Jhon Wiley & Sons Inc.
- Seifert, K. (2010). *Manajemen Pembelajaran dan Intruksi Pendidikan; Manajemen Mutu Psikologi Pendidikan Para Pendidik*. (Y. Anas, Trans.) Yogyakarta: IRCiSoD.
- Setiadi, N. J. (2003). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihat, M. (2011). *MOTIF MEMBACA SURAT KABAR DAN ORIENTASI PEMENUHAN INFORMASI MAHASISWA*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Alex Sobur. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Stanford-The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute. (2006, January 2). *Jacson, Jimmie Lee*. Retrieved 10 21, 2019, from Kinginstitute.stanford.edu: <https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/jackson-jimmie-lee>
- Sugiono. (2006). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryabrata, S. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syawaludin, M. (2014, Oktober 1). *Perlawanan Petani Rengas Terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatra-Selatan*. Retrieved from Media Neliti: <https://media.neliti.com/media/publications/131818-ID-perlawanan-petani-rengas-terhadap-ptpn-v.pdf>

Sztompka, P. (1994). *The Sociology of Social Change*. UK: Blackwell Publisher.

Tilly, C. (2006). *Regimes and Repertoires*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C., & Tarrow, S. (2016). *Politik Pertikaian*. Jakarta: Kementerian

Penelitian dan Pengembangan Agama.

Zoest, A. v. (1996). Interpretasi dan Semiotika. In Sudjiman, *Serba-serbi Semiotika* (pp. 1-25). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

LANSIA DAN MEDIA SOSIAL (Studi Aktivitas Lansia dalam Penggunaan Media Sosial *Whatsapp* di Kelurahan Kober Banyumas)

Salas Maulida, Soetji Lestari, Sotyania Wardhiana
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
salasmaulida01@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan aktivitas lansia dalam menggunakan media sosial *Whatsapp*. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode kuantitatif survei deskriptif terhadap 50 responden lansia yang diambil menggunakan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar lansia menghabiskan waktu 1-3 jam per hari untuk mengakses media sosial, seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Youtube*, *Instagram*, dan *Twitter*. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli paket data per bulan berkisar Rp 25.000-50.000, bahkan lebih. Terkait penggunaan *Whatsapp*, para lansia menggunakan aplikasi tersebut untuk chatting, panggilan suara, video call, meng-update status, atau mengomentari status teman. Sebagian besar responden memiliki 4-8 grup *Whatsapp*. Motif lansia menggunakan *Whatsapp* adalah untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman dan untuk mencari informasi, juga untuk memenuhi gaya hidup dan eksistensi diri. Selain terkait urusan pribadi, informasi yang banyak diakses di *Whatsapp* adalah informasi mengenai kesehatan, agama, kuliner, juga politik. Menurut para lansia, *Whatsapp* sangat bermanfaat bagi mereka: memudahkan dalam berkomunikasi dan berdiskusi; juga menjadi media hiburan, media belajar, dan media bisnis. Dalam menyikapi hoaks, para lansia memilih mengabaikannya; mereka berusaha menyaring setiap informasi yang masuk sebelum menyebarkannya, bahkan mereka tak segan menegur pengirim hoaks.

Kata kunci: lansia, *Whatsapp*, media sosial

ABSTRACT

This article is the result of research that describes the activities of the elderly in using *Whatsapp*. The research was conducted in Kober Village, Purwokerto Barat District, Banyumas Regency using a quantitative descriptive survey method to 50 elderly respondents who were taken using a random sampling technique. The results showed that most of the elderly spend 1-3 hours per day accessing social media, such as *Whatsapp*, *Facebook*, *Youtube*, *Instagram*, and *Twitter*. The cost to buy a data package per month ranges from IDR 25,000 to 50,000, even

more. Regarding the use of *Whatsapp*, the elderly use the application to chat, voice calls, video calls, update status, or comment on the status of friends. Most of the respondents have 4-8 *Whatsapp* groups. The motive for the elderly to use *Whatsapp* is to communicate with family or friends and to seek information, as well as to fulfill their lifestyle and self-existence. Apart from personal matters, the information that is widely accessed on *Whatsapp* is information on health, religion, culinary arts, as well as politics. According to the elderly, *Whatsapp* is very useful for them: it makes them easier to communicate and discuss things; it is also a medium for entertainment, learning something, and doing business. In responding to hoaxes, the elderly chose to ignore them; they try to filter every incoming information before spreading it, they don't even hesitate to reprimand the hoax sender.

Keywords: the elderly, *Whatsapp*, social media

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat, masuk ke semua aspek kehidupan. Terjadi perubahan dari era teknologi konvensional ke era teknologi digital, antara lain ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan internet, *smartphone*, dan berbagai aplikasi media sosial. Di era digital ini, secara kependudukan jumlah generasi milenial lebih dominan dibandingkan generasi yang lainnya. Namun, pada saat yang sama juga terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau generasi *baby boomer*. Menurut UU RI Nomor 13 tahun 1998, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Data BPS (2018), menyebutkan jumlah penduduk lanjut

usia (lansia) di Indonesia mencapai 24,49 juta jiwa atau sekitar 9,27% dengan usia harapan hidup sekitar 71,1 tahun dan diprediksi tahun 2035 meningkat menjadi 48,19 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk lansia merupakan indikasi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal itu juga berarti kebutuhan dan perhatian kepada lansia harus lebih ditingkatkan agar mereka hidup sejahtera di masa tua. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menjadi tantangan dan problematika tersendiri bagi lansia karena mereka harus cepat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Menurut Vibriyanti (2016), lansia yang hidup di era sekarang ini disebut lansia transisi karena mereka

tidak memiliki bekal menghadapi perkembangan pesat teknologi komunikasi yang serba digital dan praktis. Mereka cenderung tidak tertarik atau tidak fasih seperti generasi milineal, terutama dalam penggunaan peralatan teknologi dan komunikasi, seperti komputer dan *smartphone*.

Penelitian Ashari (2018) menemukan masih rendahnya penetrasi penggunaan internet di kalangan lansia, terutama dalam mengadopsi teknologi baru berupa media sosial. Menurut Ashari, terdapat hambatan yang dialami lansia saat menggunakan media sosial, seperti hambatan struktural berkaitan dengan fasilitas dan finansial lansia; hambatan intrapersonal berkaitan dengan psikis lansia; dan hambatan fungsional berkaitan dengan kondisi fisik dan biologis lansia. Berbeda dari temuan Ashari, penelitian Trisnani (2017), menyebutkan bahwa sebagian besar responden yang merupakan tokoh masyarakat seperti kyai, guru, kepala desa, dan ketua komunitas, sudah menggunakan *handphone* dan media

sosial. Media sosial yang sering mereka gunakan adalah *Whatsapp messenger* sebagai aplikasi *instant messaging* dengan rata-rata penggunaan 1-3 jam. Para tokoh masyarakat ini menyatakan bahwa menggunakan *Whatsapp* sebagai media komunikasi dianggap lebih efektif dan memiliki kepuasan tersendiri karena pesan yang disampaikan dapat lebih cepat diterima sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Cahyono (2016) yang menyebutkan bahwa media sosial merupakan media *online* yang memudahkan penggunaanya berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sebuah konten, baik berupa blog, jejaring sosial, forum, wiki, maupun dunia virtual. Adanya media sosial di era digital ini telah memudahkan manusia dalam bidang komunikasi, tak terkecuali lansia.

Salah satu upaya Indonesia meningkatkan partisipasi lansia di era digital dalam penggunaan teknologi ini dilakukan melalui program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*). Program ini dirasa telah

membawa dampak positif dalam kehidupan lansia karena pada tahun 2018 persentase lansia usia 60 tahun ke atas yang mengakses internet mencapai 5,73 persen. Meskipun persentase kecil, tetapi hal tersebut memberikan kesempatan bagi lansia untuk mengenal, mempelajari, dan menguasai teknologi baru agar tetap bisa beraktivitas di lingkungannya, serta aktif dan produktif di masa tua (Priyani, 2017).

Aktivitas yang sering dilakukan pengguna internet lansia adalah mengakses media sosial. We Are Social (2019), menyebutkan jumlah pengguna media sosial lansia berumur 55 tahun ke atas sebesar 3,2% dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, yang terdiri dari 2% lansia laki-laki dan 1,2% lansia perempuan. Media sosial yang paling sering diakses adalah *Youtube* dan *Whatsapp* dengan penetrasi mencapai hampir 88 persen. Dilansir *CNNIndonesia* (2018), penelitian di Amerika Serikat dengan partisipan lansia berusia 67 tahun ke atas berjumlah 1.833 orang, menyatakan bahwa sebanyak 54%

lansia menggunakan media sosial. Melalui media sosial, para lansia dapat berinteraksi dengan teman dan keluarga sehingga mereka lebih rileks dan memiliki tingkat depresi lebih rendah. Manfaat lain media sosial adalah sebagai sumber informasi dan sebagai sarana interaksi sosial,

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Kelurahan ini letaknya di tengah Kota Purwokerto, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) cenderung lebih berkembang karena daerah perkotaan memiliki fasilitas teknologi yang lebih baik. Keadaan sosial ekonomi juga lebih memadai sehingga penduduk kota lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini sejalan dengan data BPS tahun 2018, bahwa TIK lebih banyak diakses lansia di perkotaan dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan. Misalnya, penggunaan HP lebih banyak lansia di perkotaan (48,32%) dibanding lansia di pedesaan (34,87%); penggunaan internet lebih banyak lansia di perkotaan (10,12%),

sedangkan lansia di pedesaan hanya 1,05%. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana aktivitas lansia dalam penggunaan media sosial *Whatsapp* untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya beradaptasi dengan teknologi baru. Penggunaan media sosial *Whatsapp* juga dimaksudkan agar mereka tidak mengalami kesenjangan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan generasi milineal. Selain itu, agar lansia tetap eksis di masa tuanya.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Mead menjelaskan bahwa individu-individu dalam masyarakat berinteraksi menggunakan simbol-simbol yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Mereka belajar memahami, memberi makna, dan menggunakan simbol-simbol tersebut dalam suatu keadaan tertentu sehingga mereka dapat mengutarakan perasaan, pikiran, dan maksud dari simbol yang ditampilkan tersebut (Siregar, 2011). Melalui media sosial *Whatsapp*, para lansia dapat

berkomunikasi baik melalui *chat* ataupun *Whatsapp call* dan memposting aktivitas mereka. Postingan status tersebut secara tersirat telah mengkonstruksi presentasi dirinya di hadapan pengguna lain melalui simbol yang diunggahnya. Melalui penggunaan simbol-simbol tersebut, setiap individu memiliki pemaknaan yang berbeda-beda yang dapat dipahami melalui proses interpretatif dan penafsiran yang memunculkan beragam pro dan kontra (Istiqomah, 2019). Makna-makna tersebut akan berpengaruh pada bagaimana individu bertindak dan berinteraksi dengan lingkungan pertemanan di media sosial.

Whatsapp merupakan aplikasi *chatting* multifungsi yang memungkinkan penggunanya dapat bertukar pesan, baik pesan dalam bentuk teks, gambar, video, dan suara dengan menggunakan internet (Miladiyah, 2017). Data We Are Social (2019) menunjukkan bahwa pengguna *Whatsapp* di Indonesia sudah mencapai 125 juta dari 150 juta pengguna media sosial. Kehadiran *Whatsapp* telah

memberikan kemudahan bagi penggunaanya untuk berkomunikasi. Tidak mengherankan jika kepopuleran *Whatsapp* saat ini telah merambah ke semua kalangan masyarakat, dari anak-anak, remaja, hingga lansia. Nuriana, dkk (2019), menyatakan bahwa salah satu upaya agar lansia dapat tersinkronisasi dengan era digital saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan mereka melalui aplikasi yang mudah diakses, salah satunya *Whatsapp*.

METODE PENELITIAN

Seperti telah disebutkan di atas, penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Sasaran penelitian ini adalah lansia berusia 60 tahun ke atas yang memiliki media sosial *Whatsapp*. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif survei deskriptif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 orang responden dan pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data

menggunakan analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.

PEMBAHASAN

Teori ketergantungan media menyatakan bahwa seseorang akan tergantung pada media apabila media tersebut dapat memenuhi kepentingan penggunaanya. Semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya maka media tersebut menjadi penting dan sering digunakan oleh penggunaanya (Ara, 2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 23 responden lansia (46%) mengakses media sosial dengan durasi 1-3 jam per hari. Para lansia menyadari bahwa mereka harus membatasi waktu dalam menggunakan media sosial agar tidak mengalami ketergantungan. Hal ini sekaligus sebagai upaya agar mereka bisa mengimbangi aktivitas di dunia nyata dengan aktivitas di media sosial. Selain aktif di media sosial *Whatsapp*, mereka juga memiliki akun *Youtube* (58%), *Facebook* (42%), *Instagram* (30%), dan *Twitter* (10%).

Youtube merupakan aplikasi yang paling banyak dimiliki responden, selain *Whatsapp*. *Youtube* berbentuk *video sharing* yang menampilkan berbagai konten video di dalamnya, seperti *vlog*, film, klip musik, video-video mengenai beragam informasi apapun. Pengguna aktif *Youtube* di Indonesia mencapai 88% dari 150 juta pengguna aktif media sosial. Banyaknya lansia yang menggunakan *Youtube* dikarenakan mereka mudah mengakses segala informasi melalui video-video yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurrudin (2007), bahwa pengguna media akan berusaha mencari sumber media yang paling baik dan dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, *Youtube* menjadi pilihan para lansia sebagai media pencarian informasi yang mudah digunakan.

Pengguna media sosial memerlukan sejumlah biaya untuk membeli paket data internet. Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 23 responden lansia (46,00%) mengeluarkan biaya per bulan untuk mengakses media sosial sebesar Rp 25.000-50.000. Sebanyak 8 responden

(16,00%) mengeluarkan biaya Rp 0-25.000 dan 19 responden (38,00%) mengeluarkan biaya >Rp 50.000 per bulan untuk mengakses media sosial. Menurut Dhiatama (2020), perbedaan biaya akses media sosial per bulan ini tergantung pada bagaimana persepsi atau sikap lansia terhadap media sosial tersebut. Jika media sosial dirasa dapat memenuhi segala kebutuhan dalam berkomunikasi maka orang cenderung sering mengakses media sosial dan hal ini berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan.

Aktivitas yang dilakukan lansia di media sosial *Whatsapp* ini tidak berbeda jauh dari pengguna media sosial pada umumnya, seperti *chatting*, telepon suara, *video call*, *update status*, atau berkomentar kepada pengguna lain. Dhiatama (2020) membagi status pengguna di media sosial *Whatsapp* menjadi dua, yaitu sebagai pengguna komunikasi dan pembuat status. Pengguna komunikasi adalah mereka yang cenderung hanya memanfaatkan *Whastapp* untuk komunikasi, seperti telepon, *chatting*, dan *video call*; sedangkan pembuat status adalah

pengguna *Whatsapp* yang tidak hanya memanfaatkan fitur komunikasi, tetapi juga membuat dan berkomentar terhadap status orang lain. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam beraktivitas di media sosial *Whatsapp*, para lansia cenderung sekadar sebagai pengguna komunikasi. Mereka menggunakan *Whatsapp* untuk *chatting*, panggilan suara, dan *video call*. Dalam penggunaan *Whatsapp* untuk *chatting*, mayoritas lansia (78%) menjawab sering melakukannya. Sebanyak 54% mengaku sering menggunakan *Whatsapp* untuk panggilan suara. Sebagai pengguna komunikasi di media sosial *Whatsapp*, tentunya para lansia ini secara tidak langsung telah menciptakan sebuah interaksi secara virtual, tanpa harus bertatap muka langsung.

Para lansia tidak hanya menjadi pengguna komunikasi. Sebagian dari mereka juga aktif membuat status di *Whatsapp*. Data frekuensi penggunaan adalah sebagai berikut.

Tingkat Aktivitas	Frekuensi	Persentase (%)
-------------------	-----------	----------------

Sering	12	24,00
Kadang-kadang	11	22,00
Tidak pernah	27	54,00
Jumlah	50	100,00

Tabel 1. Penggunaan *Whatsapp* untuk Membuat Status

Sumber : *Data Primer, 2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar lansia (54%) di Kelurahan Kober tidak pernah menggunakan *Whatsapp* untuk membuat status dengan alasan hal itu tidak penting, juga karena status merupakan privasi. Sabrina (2020) menuturkan bahwa semakin bertambahnya umur biasanya orang cenderung memilih menjadi *silent reader* (pengguna media sosial pasif) daripada menjadi pusat perhatian di media sosial. Mereka lebih memilih fokus pada kehidupan nyata dengan keluarga daripada sibuk aktif di media sosial. Bagi kelompok ini, kehadiran dan pertemuan secara langsung masih menjadi jantung dalam relasi sosial (Dhiatama, 2020).

Sementara mereka yang membuat status di *Whatsapp* berarti telah menjadikan dirinya pusat perhatian pengguna lain, yang ditunjukkan oleh

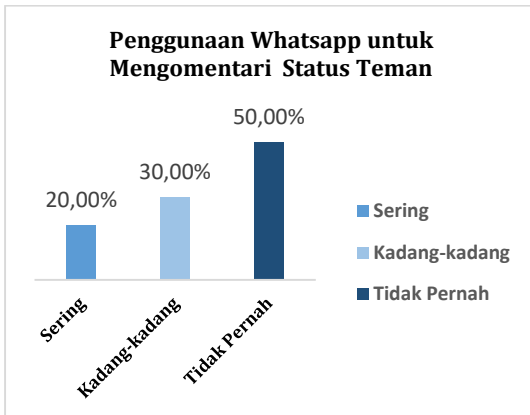
adanya orang yang melihat status atau memberikan komentar terhadap status yang dibuat. Data di atas menunjukkan, terdapat beberapa lansia yang aktif membuat status di *Whatsapp* dengan alasan untuk mengekspresikan diri. Melalui ekspresi diri, seseorang berusaha untuk membentuk citra positif tentang diri mereka kepada pengguna lain melalui media sosial yang dimilikinya agar mendapatkan tanggapan positif sebanyak mungkin dari orang lain (Ayun, 2015). Ekspresi diri yang dibagikan melalui status *Whatsapp* ini dianggap sebagai sarana menuju eksistensi diri. Bentuk ekspresi diri ini beragam, baik dalam bentuk foto, teks, maupun video, seperti yang diungkapkan oleh Ibu MN (63 tahun) berikut.

“Kalau status *sih* saya *nggak* mesti tiap jam bikin *ya*, Mbak. Tapi *ya* sering *lah...* Terus juga *paling kalo* lagi ada kegiatan tertentu kaya jalan-jalan ke mana... Apalagi liburan, kaya kemarin ke mana itu *lah..* taman bunga di Purbalingga sama keluarga, *tek* bikin status foto pas lagi di sana Mbak *hehehe..*”

Status yang dibuat Ibu MN adalah sebuah foto bersama keluarga saat ia berlibur di taman bunga. Melalui foto tersebut, Ibu MN menunjukkan bahwa dia ingin dianggap dan diakui keberadaannya dalam satu lingkungan tertentu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Foto tersebut juga merupakan sebuah simbol yang secara tidak langsung mengkonstruksi presentasi dirinya dihadapan pengguna lainnya. Dalam pandangan teori interaksionisme simbolik, membuat status atau *update* status di media sosial *Whatsapp* merupakan sebuah tindakan individu dengan menggunakan simbol. Tindakan tersebut juga memiliki tujuan menunjukkan diri di hadapan orang lain. Biasanya simbol-simbol yang digunakan dan ditampilkan para lansia melalui fitur status di media sosial *Whatsapp* ini telah dikemas sedemikian rupa sehingga simbol-simbol tersebut dapat membentuk sebuah citra atau *image* yang ingin ditampilkan di ranah publik (Istiqomah, 2019).

Selain membuat status di *Whatsapp*, separuh lansia dalam penelitian ini juga berkomentar

terhadap status teman-temannya. Berikut datanya.



Gambar 1. Penggunaan *Whatsapp* untuk Mengomentari Status Teman

Sumber : *Data Primer, 2020*

Gambar di atas menunjukkan bahwa separuh lansia mengaku tidak pernah menggunakan *Whatsapp* untuk mengomentari status teman dengan alasan kurang tertarik dan lebih memilih hanya melihat status teman tanpa berkomentar. Sebaliknya, 20% lansia mengaku sering berkomentar dan 30% kadang berkomentar. Pilihan lansia untuk berkomentar atau tidak berkomentar terhadap status pengguna lain tergantung pada bagaimana mereka memaknai status yang dibuat oleh pengguna lainnya. Perbedaan pemaknaan ini terjadi karena adanya persepsi yang berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

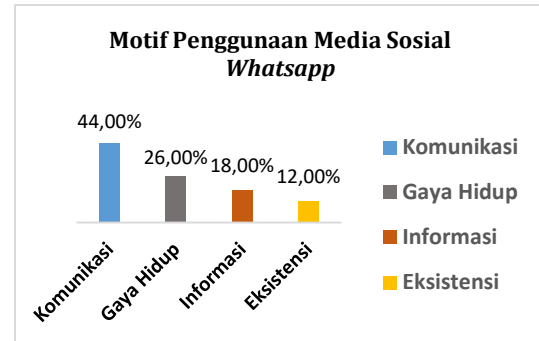
Persepsi merupakan hasil kinerja otak dalam memahami atau menilai suatu yang terjadi di sekitarnya (Nasiruddin, 2015). Melalui persepsi ini, seseorang akan menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui alat indera manusia yang kemudian menghasilkan sebuah pemaknaan.

Whatsapp menyediakan fasilitas obrolan grup yang mampu menampung anggota hingga 256 orang. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas responden (52%) memiliki grup *Whatsapp* sebanyak 4-8 grup. Melalui grup-grup tersebut, mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam grup tersebut. Para lansia umumnya tergabung dalam grup keluarga, grup alumni sekolah, grup RT/RW, grup arisan, grup PKK, grup posyandu lansia, dan grup pengajian. Berbagai macam grup yang dimiliki para lansia di *Whatsapp* ini menjadi ajang bagi mereka untuk berkumpul dan bersosialisasi tanpa batasan ruang dan waktu (Nurdiarti, 2018).

Dalam sebuah grup *Whatsapp*, di dalamnya pasti terdapat obrolan yang menjadi topik bahasan dalam grup tersebut. Obrolan di grup *Whatsapp* lansia tentu berbeda dari obrolan grup *Whatsapp* kelompok muda. Grup *Whatsapp* lansia cenderung membahas hal-hal mengenai kesehatan, religi, dan hal-hal positif lainnya yang bermanfaat dalam kehidupan lansia mereka. Sementara grup *Whatsapp* kelompok muda cenderung membahas mengenai hal-hal yang identik dengan anak muda, seperti musik, film, *travelling*, *fashion*, bahkan masalah percintaan. Perbedaan obrolan atau bahasan dalam grup *Whatsapp* antara generasi muda dan generasi tua itu terjadi karena adanya perbedaan situasi, kondisi lingkungan, dan pengalaman di antara keduanya (Dhiatama, 2020).

Ada beberapa motif yang mendasari para lansia menggunakan *Whatsapp*. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan tertentu yang harus dipenuhi oleh manusia yang kemudian membentuk sebuah perilaku

(Nugraheni & Widyaningrum, 2017). Berikut motif lansia menggunakan media sosial *Whatsapp*.



Gambar 2. Motif Penggunaan Media Sosial *Whatsapp*

Sumber: *Data Primer, 2020*

Data di atas menunjukkan bahwa motif penggunaan media sosial *Whatsapp* terbanyak adalah untuk berkomunikasi (44%). Mereka ingin menyampaikan pesan baik secara lisan (telepon) maupun tulisan (SMS) kepada orang lain yang ingin dihubungi. Hanya saja, yang membedakan adalah media berkomunikasi. Jika dahulu orang menyampaikan pesan dengan telepon atau SMS menggunakan pulsa, sekarang ketika menggunakan media sosial *Whatsapp* harus terhubung dengan internet. Cara individu melakukan tindakan komunikasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan yang dipelajari dan adanya perkembangan

teknologi yang menyertainya (Prajarto, (2014)

Motif kedua adalah gaya hidup (26%) berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Para lansia ingin mengikuti situasi dan kondisi perkembangan lingkungan di sekitar mereka agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Gaya hidup modern yang serba praktis menuntut hidup lebih efektif dan efisien dengan cara menggunakan fitur yang ada di media sosial. *Whatsapp* menyediakan kemudahan tersebut karena lebih mudah dipahami dan digunakan untuk berkiriman pesan dibandingkan dengan aplikasi pesan lainnya, lebih irit kuota, dan mudah dibawa ke mana-mana karena dalam genggaman.

Motif ketiga adalah motif informasi (18%) yang berkaitan dengan *information sharing*. Melalui *Whatsapp* para lansia dapat berbagi dan mendapatkan berbagai informasi terkini, seperti jadwal kegiatan posyandu lansia, kumpulan arisan, atau kumpulan RT dan RW. Selain itu, mereka juga memperoleh beragam

informasi mengenai kuliner, keagamaan, kesehatan, olahraga, politik, dan sebagainya. Para lansia juga dapat membagikan informasi bisnis mereka melalui fitur status di media sosial *Whatsapp*. Kemudahan memperoleh dan membagi informasi menjadi pertimbangan dalam memilih media sosial. Media sosial telah menjadi alat yang bisa meningkatkan kemampuan berbagi dan bekerja sama di antara penggunanya, baik berbagi di antara individu maupun kepada publik (Nasrullah, 2017).

Motif keempat adalah motif eksistensi diri. Peneliti menemukan alasan lansia menggunakan *Whatsapp* karena orang-orang di sekitar mereka pun banyak yang menggunakan media sosial ini sehingga komunikasi dapat lebih efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat van Dijk (Nasrullah, 2017) bahwa media sosial merupakan sebuah *medium online* yang dapat menguatkan hubungan dan meningkatkan ikatan sosial antarpengguna karena media ini fokus pada eksistensi pengguna dengan memfasilitasi penggunaannya untuk

beraktivitas dan berkolaborasi di dalamnya.

Selain memudahkan para penggunanya untuk saling berkomunikasi, *Whatsapp* juga memfasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai informasi. Hasil penelitian menunjukkan beragam informasi diperoleh lansia di media sosial *Whatsapp*. Berikut datanya.

Informasi yang Diperoleh di <i>Whatsapp</i>	Frekuensi*)	Persentase (%)
Religi	44	88,00
Kesehatan	46	92,00
Politik	13	26,00
Urusan pribadi	39	78,00
Kuliner	30	60,00
Bisnis	22	44,00
Keamanan	19	38,00

Tabel 2. Informasi yang Diperoleh di *Whatsapp*
Sumber : *Data Primer, 2020*

*) responden dapat memberikan lebih dari satu jawaban

Tabel di atas menunjukkan bahwa informasi yang paling banyak diperoleh para lansia di *Whatsapp* adalah informasi mengenai kesehatan (92%) dan informasi mengenai religi (88%). Informasi-informasi tersebut diperoleh dari *Whatsapp group*, seperti grup

posyandu lansia, grup pengajian, grup PKK, grup arisan, grup bisnis, dan sebagainya. Namun, ada pula lansia yang memperoleh informasi tersebut melalui status pengguna lain di *Whatsapp*. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2018), bahwa pesan atau informasi yang banyak diterima dan disebarluaskan masyarakat melalui media sosial *Whatsapp* adalah informasi mengenai keagamaan dan kesehatan.

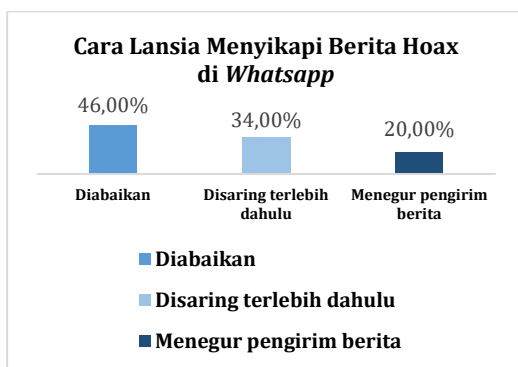
Selain informasi kesehatan dan religi, informasi lain yang banyak diperoleh para lansia melalui media sosial *Whatsapp* adalah informasi mengenai urusan pribadi. Berbeda dari informasi lainnya yang bersifat publik, informasi pribadi bersifat privat, hanya pengirim dan penerima pesan yang mengetahui isi pesan. Informasi dikirim atau diterima melalui *chatting* atau telepon pribadi di *Whatsapp*. Urusan pribadi berkaitan dengan informasi seputar hubungan lansia dengan keluarganya, seperti dengan anak-anak atau cucu-cucu, yang dikirim atau diterima melalui *chat* pribadi, panggilan suara, atau *video call*.

Terkait manfaat menggunakan media sosial *Whatsapp*, lebih dari separuh responden (58%) mengatakan bahwa *Whatsapp* sangat bermanfaat bagi mereka. *Whatsapp* sangat memudahkan mereka berkomunikasi (86%) karena aplikasi ini menyampaikan informasi dengan mudah dan cepat, baik melalui *chat* pribadi, telepon, maupun melalui *video call*, sehingga mereka dapat selalu terhubung dengan keluarga, teman, atau kerabat. Manfaat lainnya adalah grup *Whatsapp* memudahkan lansia untuk berdiskusi (68%). Melalui grup *Whatsapp*, para lansia dapat berdiskusi dengan beberapa orang sekaligus secara langsung. Mereka juga bisa mengutarakan pemikiran dan pendapat ketika akan mengambil suatu keputusan. Selain itu, *Whatsapp* juga bermanfaat sebagai sarana hiburan (58%), media belajar (28%), dan media bisnis (14%). Hiburan yang mereka peroleh melalui *Whatsapp* antara lain melihat status teman, mendengarkan lelucon, dan *video call* dengan sanak saudara. Hiburan-hiburan semacam ini dapat mengisi waktu luang para lansia

dan menghilangkan rasa jenuh, membantu mereka keluar dari realitas kehidupan dan stres yang dialami (Anita dan David, 2013). *Whatsapp* juga bermanfaat sebagai media belajar. Melalui aplikasi ini, lansia dapat belajar dan memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat bagi mereka. Melalui grup *Whatsapp*, mereka dapat bertukar informasi, berdiskusi, dan menambah pengetahuan (Pustikayasa, 2019). Manfaat lainnya adalah sebagai media bisnis. *Whatsapp* saat ini bisa menjadi sarana bisnis *online* yang mudah dan murah. Melalui fitur status, para lansia dapat dengan mudah mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa yang akan dijual. Mereka juga dapat menawarkannya dengan mengirim pesan *broadcast* kepada seluruh kontak *Whatsapp*. Produk atau jasa yang dijual antara lain jasa katering, makanan, obat-obatan herbal, dan *fashion*. Melalui *Whatsapp*, promosi produk atau jasa cepat tersampaikan kepada para konsumen dan konsumen dapat cepat melakukan pemesanan secara *online*. Hapsari (2016) menyebutkan, bahwa kegiatan penjualan atau pemasaran

produk secara *online* semakin mudah dilakukan dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang masif memudahkan orang menerima dan menyebarkan berita atau informasi. Eksesnya, orang dengan mudah menyebarkan berita yang diterima tanpa menyelisikinya terlebih dahulu, padahal tidak semua berita benar adanya. Adakalanya sebuah berita atau informasi direkayasa dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada (*hoaks/hoax*). Menurut Simamarta, dkk (2019), berita *hoax* biasanya digunakan untuk menipu dan menggiring opini pembaca agar percaya terhadap sesuatu yang diberitakan. Menyikapi hal tersebut, para lansia memiliki cara tersendiri untuk menangkal *hoaks* sebagaimana tercermin pada diagram di bawah ini.



Gambar 3. Cara Lansia Menyikapi Berita Hoax di *Whatsapp*

Sumber : *Data Primer, 2020*

Gambar di atas menunjukkan bahwa para lansia ketika memperoleh berita *hoax* mereka mengabaikannya (46%). Sebanyak 34% mengaku menyaring dahulu berita yang masuk, dan sisanya (20%) mengaku menegur pengirim berita *hoaks*. Cara ini dimaksudkan agar orang tidak mudah percaya pada berita yang diterima sekaligus menekan penyebaran berita-berita *hoax*. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudiantara dalam Simarmata, dkk (2019), bahwa salah satu cara mengantisipasi berita *hoax* di media sosial adalah dengan menyaring berita. Untuk itu, diperlukan literasi digital guna meminimalisasi berita *hoax* tersebar dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Informasi dalam berita palsu biasanya sudah direkayasa sedemikian rupa untuk tujuan tertentu sehingga bersifat bias dan menyesatkan. Upaya pemerintah menangani penyebaran berita *hoax* adalah dengan memberikan hukuman bagi para penebar berita *hoax* sebagaimana tercantum dalam *Undang-*

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28A Ayat 1 yang memberikan sanksi pidana paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah kepada penyebar hoaks.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas lansia dalam penggunaan media sosial cukup beragam. Selain menggunakan *Whatsapp*, mereka juga memiliki akun *Youtube*, *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram*. Terkait penggunaan media sosial, mayoritas responden mengaku mengakses media sosial 1-3 jam dengan biaya pembelian paket data per bulan Rp 25.000-50.000. Kegiatan yang dilakukan para lansia di *Whatsapp* terutama adalah berkomunikasi, seperti *chatting*, telepon suara, dan *video call*. Kegiatan lain yang dilakukan di *Whatsapp* adalah *update* status dan berkomentar terhadap status teman. Motif penggunaan *Whatsapp* lansia ada empat, yaitu motif komunikasi, motif gaya hidup, motif eksistensi, dan motif informasi. Mayorita lansia menggunakan *Whatsapp* karena motif

komunikasi. Informasi yang diakses di *Whatsapp* adalah informasi mengenai kesehatan dan religi. Menurut para lansia, manfaat yang diperoleh dalam menggunakan media sosial *Whatsapp* adalah sangat memudahkan mereka berkomunikasi dan berdiskusi melalui grup. Mereka juga menggunakan *Whatsapp* sebagai media belajar, media hiburan, dan sebagai media bisnis. Adapun cara lansia menyikapi berita *hoax* yang diterima adalah dengan mengabaikannya, menyaring berita yang masuk, atau menegur si pengirim berita palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara, S. (2015). Pengaruh penggunaan jejaring sosial (twitter) terhadap sikap asosial pada pelajar SMA negeri 10 Kota Tangerang. *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
<https://eprints.untirta.ac.id/534/1/PENGARUH%20PENGGUNAA N%20JEJARING%20SOSIAL%20%28TWITTER%29%20TERHAD AP%20SIKAP%20ASOSIAL%20P ADA%20PELAJAR%20SMA%20N EGERI%2010%20K%20-%20Copy.pdf>
- Ashari, R. G. (2018). Memahami hambatan dan cara lansia mempelajari media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(10), 155-

170.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/1245>
DOI: <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1245>
- Ayun, P. Q. (2015). Fenomena Remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identitas. *Jurnal Komunikasi*, 3(2), 1-16.
<http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/3270>
DOI: <http://dx.doi.org/10.12928/channel.v3i2.3270>
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 13). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Retrieved Oktober 13, 2019, from [bps.go.id](https://www.bps.go.id):
<https://www.bps.go.id/publication/2018/04/13/7a130a22aa29cc8219c5d153/statistik-penduduk-lanjut-usia-2017.html>
- CNN Indonesia. (2018, 10 12). *Media Sosial Kurangi Depresi pada Lansia*. Retrieved 10 5, 2019, from [cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com):
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181011164213-255-337728/media-sosial-kurangi-depresi-pada-lansia>
- Dhiatama, F. A. (2020). Perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial (studi terhadap perilaku mahasiswa sosiologi Universitas Jenderal Soedirman angkatan 2016-2018 dalam menggunakan media sosial). *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
<http://repository.unsoed.ac.id/13227/>
- Istiqomah. (2019, April 8). *Media Sosial dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik*. Retrieved Oktober 10, 2019, from Radar Kudus Jawa Pos: <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/04/08/130341/media-sosial-dalam-perspektif-interaksionisme-simbolis>
- Miladiyah, A. (2017). Pemanfaatan *whatsapp messenger info* dalam pemberian informasi dan peningkatan kinerja pada subbagian program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YjI5ZDdmNGMyZDFmYzAwZjY0ZTY2Y2UyMjU5NzU0NDk1NmUyMTRmYw==.pdf
- Nasiruddin, M. (2015). Persepsi masyarakat etnis Madura di Bulak-Banteng Surabaya tentang tradisi *otok-otok*. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
<http://digilib.uinsby.ac.id/4127/>
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perseptif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Nugraheni, Y., & Widyaningrum, A. Y. (2017, Desember). Motif mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Komunikatif*, 6(2). <http://journal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/1706DOI: https://doi.org/10.33508/jk.v6i2.1706>
- Nurdiarti, R. (2018). Media Sosial, pola interaksi dan relasi sosial pada grup *Whatsapp* alumni SDK. St. Maria Blitar. *Ettisal Journal Of Communication*, 3(1), 49-61. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/1929>
<https://doi.org/10.21111/ejoc>
- Nuriana, D., Rizkiyah, I., Efendi, L., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019, Juli). generasi *baby boomers* (lanjut usia) dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 32-46. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/23117-66566-1-SM.pdf>
- Nurrudin. (2007). *Komunikasi Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prajarto, N. (2014). *Manusia dan Komunikasi*. Retrieved Juni 28, 2020, from www.pustaka.ut.ac.id: http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SKOM4101-M1.pdf
- Priyani, M. J. (2017). Lansia yang bahagia di era internet. *Prosiding Temu Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia* (pp. 299-306). Semarang: Ikatan Psikologi Perkembangan (HMPSI). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ipipi/article/view/2344>
- Pustikayasa, I. M. (2019). Grup *Whatsapp* sebagai media pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Widya Genitri*. 10(2). 53-62. DOI: 10.36417/widyagenitri.v10i2.281
- Rahmawati, W. (2018, Juli). Penerimaan masyarakat terhadap pesan kesehatan melalui media internet. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 95-105. <http://journal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/1748DOI: https://doi.org/10.33508/jk.v7i1.1748>
- Sabrina, R. (2020, Agustus 5). *5 Alasan Kenapa Semakin Dewasa Kamu Malas Update Media Sosial*. Retrieved Agustus 6, 2020, from www.today.line.me : <https://today.line.me/id/pc/article/5+Alasan+Kenapa+Semakin+Dewasa+Kamu+Malas+Update+Media+Sosial-NQwDmp>
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Siregar, N. S. (2011). Kajian tentang interaksionisme simbolik. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2), 100-110. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/86>
DOI: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Trisnani. (2017). Pemanfaatan *Whatsapp* sebagai media komunikasi dan kepuasan dalam penyampaian pesan di kalangan tokoh masyarakat. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 6(3), 1-12.
- Vibriyanti, D. (2016, Mei 31). *Menjadi Lansia Saat Ini: Beban atau Dibebani?* Retrieved Oktober 10, 2019, from [www.kependudukan.lipi.go.id](http://kependudukan.lipi.go.id): <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/dinamika-kependudukan/317-menjadi-lansia-saat-ini-beban-atau-dibebani>
- We Are Social. (2019). *Indonesia Digital Report 2019*. Retrieved 10 15, 2019, from [www.wearesocial.com](http://wearesocial.com): <https://wearesocial.com/indonesia-digital-report-2019>

“RUMAH LANGIT” HARAPAN PENDIDIKAN ANAK MARJINAL (Studi Tentang Pemberdayaan Bidang Pendidikan di Kelurahan KampungTengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur)

Dinda Galih Purwaningrum, Tri Sugiarto, Rili Windiasih
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
dindagalih98@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan desa saja, melainkan di kota besar dengan fasilitas yang terjangkau juga masih memerlukan pemberdayaan. Salah satu contohnya adalah pemberdayaan dalam bidang pendidikan di perkotaan yaitu Rumah Langit. Tempat ini merupakan rumah belajar yang dalam penerapannya melakukan pemberdayaan bidang pendidikan untuk anak marjinal di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Rumah Langit sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang pendidikan untuk anak marjinal di Kampung tengah, KramatJati, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sasaran penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan Rumah Langit: [1] penyadaran, Rumah Langit memberikan beberapa strategi untuk para murid semangat dan terdorong untuk melakukan perubahan. [2] pengkapasitasan, yang terdiri dari tiga cakupan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan menjadi fasilitator di sana, pengelolaan organisasi yang terdiri dari anggaran dan bentuk kerjasama, serta sistem nilai yang dijadikan pedoman di Rumah Langit. [3] pemberdayaan, yang di mana mereka para penerima manfaat akan diberikan daya atau peluang sesuai dengan kualitas diri mereka, Hasil kesimpulan penelitian ini yaitu bentuk pemberdayaan di Rumah Langit memiliki tiga tahapan antara lain, penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberdayaan. Dalam menjalankan bentuk pemberdayaan tersebut juga memiliki faktor yang mendorong jalannya pemberdayaan dan faktor penghambat dalam jalannya kegiatan tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu, diharapkan dapat memberikan gambaran serta sumbangsih pengetahuan bagi kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Bidang Pendidikan, Anak Marjinal.

ABSTRACT

Community empowerment is not only related to the village, but in big cities with affordable facilities that also require empowerment. One example is empowerment in the field of education in urban areas that is Rumah Langit. This place is a learning house which in its application empowers the education sector for marginal children in urban areas. This study

aims to describe how the form of community empowerment by Rumah Langit as a Non-Governmental Organization in the field of education for marginal children in the village of central, Kramat Jati, East Jakarta. This research is a qualitative research. The research objectives were using purposive sampling technique. Data collection methods by interview, observation and documentation. Interactive data analysis technique. The results of this study indicate that the form of empowering Rumah Langit:

[1] awareness, Rumah Langit provides several strategies for students to be motivated and encouraged to make changes. [2] capacity building, which consists of three scopes, namely improving the quality of human resources who have the role of facilitators there, organizational management consisting of budgets and forms of cooperation, as well as a value system used as a guide in the Rumah Langit. [3] empowerment, where those beneficiaries will be given power or opportunity according to their quality, The conclusion of this research is that the form of empowerment in Rumah Langit has three stages including, awareness, capacity building, and empowerment. In carrying out this form of empowerment also has factors that encourage the course of empowerment and inhibiting factors in the course of these activities. Recommendations from this research are expected to provide an overview and contribution of knowledge for academics, activists, and the community.

Keywords: *Community Empowerment, Empowerment in Education, Marginal Children.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kita sebagai makhluk sosial sering menemukan berbagai fenomena pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dalam upaya mendorong perubahan baik suatu kebijakan publik secara luas di tingkat lokal, nasional, dan global. Pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya terjadi di negara berkembang dan desa saja, bahkan negara maju dan kota-kota besar dengan fasilitas yang terjangkau dan demokrasi yang tinggi juga banyak yang masih memerlukan pemberdayaan.

Pemberdayaan sendiri, dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Secara teoritis, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari pembangunan nasional suatu bangsa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan. Dalam pembangunan nasional terdapat beberapa sektor, salah satunya bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini merupakan bagian

yang sangat penting, namun juga sensitif dan sering terjadi permasalahan di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya *miss communication* yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan pendidikan semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir negara-bangsa (*national-state*) (Usman, 2012). Persoalan pendidikan yang dihadapi oleh suatu daerah bukan hanya milik atau menjadi beban tanggungan daerah itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari persoalan negara. Persoalan tersebut menjadi bersifat penting, kendati tumbuh dan berkembang di tingkat daerah.

Pendidikan di Indonesia, menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Hal tersebut berisi tentang wajib belajar 9 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah, namun sejak tahun 2015 pemerintah menaikkan menjadi

wajib belajar 12 tahun. Sistem pendidikan ini kemudian juga diberlakukan kepada sekolah negeri maupun swasta di mana pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jenjang, yaitu : (SD) Sekolah Dasar, (SMP) Sekolah Menengah Pertama, dan (SMA) Sekolah Menengah Atas (Kamajaya, Djafarnantyo, & Punia, 2018). Di ibukota sendiri, kebijakan wajib belajar 12 tahun sudah lebih dahulu diterapkan sejak tahun 2013. Akan tetapi, majunya sistem pendidikan di ibukota masih sering tidak diiringi dengan penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak dari kalangan marjinal. Marjinal dalam bahasa inggris disebut dengan "marginal" yang diartikan sebagai jumlah atau efek yang sangat kecil (Yus, 2015). Marjinal di sini dapat diartikan suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau dapat pula diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera.

Berdasarkan peristiwa tersebut, data angka putus sekolah menjadi salah satu isu yang disoroti belakangan tahun terakhir di

ibukota. Dikutip dari halaman *tirto.id* yang menyatakan bahwa, “*Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 80,47 poin atau naik 0,41 poin. Akan tetapi, angka putus sekolah di tingkat SMK meningkat sebesar 25,28%*” (Alaidrus, 2019). Hal tersebut diutarakan langsung oleh ketua BPS DKI Jakarta, yaitu Thoman Pardosi yang menyatakan bahwa IPM tersebut meningkat dari tahun 2017-2018 sebesar 0,41 poin atau 0,51%. Level IPM ini termasuk level yang sudah sangat tinggi menurut ketua BPS. Disisi lain, ia mengatakan angka putus sekolah SMK naik sebesar 25,28%. Oleh sebab itu, pembangunan bidang pendidikan perlu ditingkatkan lagi.

Terkait pembangunan pendidikan di DKI Jakarta, tidak lepas dari peran kota administrasi di sekelilingnya. Pembangunan pendidikan perlu diiringi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Dalam memperoleh fasilitas tersebut perlu adanya data administrasi yang mendukung,

seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data ini, berguna untuk mendaftarkan masyarakat yang ingin menerima fasilitas pendidikan yang sudah disediakan oleh Provinsi. Jakarta timur sendiri (Urip, 2018), penduduk laki-laki umur 5 tahun ke atas yang sudah terdaftar dalam NIK sebesar 99,38% dan umur 17 tahun ke atas sebesar 99,57%, sedangkan penduduk perempuan umur 5 tahun ke atas yang sudah terdaftar dalam NIK sebesar 99,16% dan umur 17 tahun ke atas sebesar 99,18%. Melihat data kependudukan kota administrasi Jakarta Timur yang terdaftar terbilang tinggi, ternyata hal ini tidak sebanding dengan data angka penduduk pengenyam pendidikan yang menurun pada tingkat SMA/ sederajat.

Selama ini, tingginya IPM di DKI Jakarta dan fasilitas administrasi yang mendukung di Jakarta Timur tidak hanya lahir dari program-program pendidikan pemerintah saja. Akan tetapi, juga terdapat peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Sehingga saat ini banyak pemberdayaan di lingkungan masyarakat yang berusaha memperjuangkan anak-anak yang masih termarjinalkan untuk lebih mengenal pendidikan. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan filantropi daerah perkotaan tepatnya di Jakarta Timur adalah Rumah Langit. Rumah langit merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah Jakarta Timur. Rumah Langit saat ini sudah berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan (SK) Kemenkumham Nomor :AHU-0004439.AH.01.04.TAHUN 2018

tentang Yayasan Rumah Langit.

Rumah Langit, adalah sebuah fenomena yang unik untuk diteliti karena selain membantu anak-anak *marjinal* untuk mengenal dan memperbaiki dunia pendidikan di Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, peneliti memilih tema ini karena problematika yang terjadi sangat bertabrakan kuat dengan realita masyarakat di DKI Jakarta. Sebagai ibukota negara, dengan fasilitas dan gedung-gedung tinggi pencakar langit ternyata masih saja terdapat masyarakat yang termarjinalkan. Berangkat dari keluhan, ketidakadilan, dan ketimpangan disekitarnya Rumah Langit hadir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh keseimbangan khususnya di dunia pendidikan perkotaan.

Dengan demikian, melihat relevansi antara data dan kondisi realitas yang ada menjadikan studi pendidikan anak marjinal ini penting karena menjadi alternatif bagi anak marjinal dalam meningkatkan

kualitas pendidikannya. Pemberdayaan anak marjinal perlu digalakkan agar dapat memberi ruang bagi masyarakat yang termarginalkan untuk dapat hidup bermartabat dan sejahtera baik lahir dan batin. Dengan begitu, anak marjinal tidak lagi dipandang sebagai beban bagi pemerintah daerah dalam penyumbang angka putus sekolah.

KAJIAN PUSTAKA **Rumah Langit Sebagai Payung Pendidikan Anak Marjinal**

Rumah Langit dalam melakukan kegiatannya berfokus pada pendidikan non formal. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di ruangan seperti saat belajar Matematika, IPA, Bahasa Inggris serta dapat pula dilakukan di luar kelas atau ruang terbuka seperti saat kegiatan kesenian yang dilakukan di pinggir sungai dan ruang terbuka lain. Dalam pengelompokan di kelas, tempat belajar ini tidak mematok umur yang sama di setiap pembelajarannya namun masih disesuaikan sesuai kemampuan dan jenjang, tidak seperti pada pendidikan formal yang

dikelompokkan dalam usia yang sama dan jenjang yang sama serta juga tidak sebebaskan pendidikan informal yang disatukan semua dalam satu sesi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Rumah langit memiliki jadwal belajar yang sudah terprogram hal ini berbeda dengan pendidikan informal yang dalam kegiatannya tidak terprogram. Kemudian dalam bentuk evaluasi, tempat ini melakukan ujian yang bersifat untuk melatih sejauh mana kemampuan yang didapat saat kegiatan belajar mengajar namun ujian ini tidak bersifat formal. Dalam materi pendidikan yang diterapkan di tempat ini lebih bersifat praktis dan khusus.

Oleh sebab itu, bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Langit sebagai payung pendidikan anak marjinal bukanlah hal yang baru. Pemberdayaan dalam dunia pendidikan seperti ini sudah cukup banyak terjadi di berbagai kota dan daerah di Indonesia, serta dalam berbagai kebijakan dalam sistem

pemerintahan tentang dunia pendidikan (Ganiem, 2017). Lahir dari ketimpangan sosial yang berada di lingkungan sekitar pemulung (*slum area*), Rumah langit hadir menawarkan perubahan untuk anak-anak marjinal di daerah tersebut. Berada di daerah pinggiran Jakarta Timur, Rumah Langit memberikan harapan baru di dunia pendidikan dan arti pentingnya kebebasan berespresi dan kreatifitas tanpa batas kepada anak-anak marjinal. Hal tersebut diharapkan agar anak-anak ini tidak dianggap sebagai salah satu elemen di dalam kompleksitas konsep pemisahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh Ruth Levitas (Levitas, 1998) yang di mana keberadaannya selalu dikesampingkan atau dibedakan dalam masyarakat.

Rumah Langit : Pemberdayaan Dalam Bidang Pendidikan

Rumah Langit, berada di daerah kumuh membuktikan bahwa penduduk disekitar wilayah tersebut masuk dalam golongan kelas bawah. Penduduk kelas bawah, hanya dapat

hidup digaris kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia, pada tahun 2018 sebesar Rp 401.220,- perkapita per bulan (Taufiq, Bagindo, Dian, & Mumtaz, 2018). Sedangkan pada tingkat Kota Jakarta Timur GK sebesar Rp 502.152,- perkapita per bulan (Hidayat, Aminiah, & Handono, 2018). Presentasi GK di wilayah Jakarta Timur ini memiliki jumlah tertinggi dibanding dengan wilayah lain di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan padatnya penduduk di kawasan tersebut, yang kemudian membuat tempat ini menjadi kumuh.

Berbicara mengenai kemiskinan, tentu hal ini berkaitan erat dengan pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kemiskinan dan pendidikan ibarat seperti roda yang selalu berputar dan terus berulang secara bergiliran. Roda tersebut berputar membuat

lingkaran setan (*vicious circle*) yang di mana satu dari setiap elemen saling berkesinambungan membentuk lingkaran yang terus-menerus dalam suasana kemiskinan. Melihat lingkaran setan seperti dikutip dalam *DetikNews* (Abdurakhman, 2017), maka perlu adanya aktor atau lembaga yang mampu memutus lingkaran tersebut (Nurjihadi & Dharmawan, 2016). Rumah Langit contohnya, mampu hadir membawa perubahan untuk lingkungan anak-anak marjinal melalui pemberdayaan dalam bidang pendidikan.

Talcott Parsons dalam mengemukakan teori Sistem (pengembangan atau pemeliharaan masyarakat) mengungkapkan bahwa setiap masyarakat terbentuk dari beberapa susunan subsistem yang berbeda satu dengan lainnya berdasarkan struktur dan fungsinya bagi masyarakat luas. Ketika anak-anak marjinal ini ingin berubah maka mereka tumbuh dan hidup lebih baik agar dapat menanggulangi masalah hidupnya (Ritzer & Goodman, 2016).

Parson juga mengeluarkan empat fungsi agar sistem tetap berjalan, antara lain : [1] Adaptasi, [2] Pencapaian tujuan, [3] Integrasi, [4] Latensi.

Fungsi Rumah Langit Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan untuk Anak Marjinal

Sebagai pemilik predikat ibukota di Indonesia, Jakarta, masih mempunyai pekerjaan rumah mengenai pemukiman marjinal. Melalui kaca mata sosial, potret keluarga kecil yang tinggal di bawah jembatan, bantaran sungai, pemulung, dan pengemis jalanan serta kumuhnya area pemukiman tersebut. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan “memaksa” warga di kawasan kumuh Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur berprofesi sebagai pencari barang bekas, pemulung, dan pengamen untuk melangsungkan kehidupan mereka (Husna, 2018). Profesi ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang tua, akan tetapi mereka menyertakan

anak-anak untuk ikut mengamen dan memulung sampah. Anak-anak tersebut secara tidak langsung dipaksa untuk dewasa secara dini dan menghasilkan uang setiap harinya. Mirisnya, para orang tua di kawasan kumuh Kampung Tengah tersebut bangga ketika anak-anak mereka mendapat uang yang banyak dari hasil mengamen dan memulung sampah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya peran lembaga non pemerintahan yang turut andil sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Menurut Undang-Undang Pasal 6 Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Fungsi organisasi kemasyarakatan yang sudah tertuang dalam undang-undang tersebut, dapat ditemui dalam Yayasan Rumah Langit. Tempat ini, dalam pelaksanaannya sebagai penyalur kegiatan, melakukan pembinaan anggota, melakukan pemberdayaan, dan pemeliharaan nilai, norma, dan etika dalam setiap kegiatannya.

kriteria tersebut sudah sesuai dengan fungsi utama yang harus dimiliki sebuah organisasi kemasyarakatan. Melalui Rumah Langit anak-anak marjinal tersebut diberdayakan melalui pendidikan keterampilan dan pendidikan kesetaraan (paket A,B, dan C). Oleh karena itu, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perlu adanya tahap-tahapan yang tidaklah instan. Terdapat 3 tahapan pemberdayaan menurut Sulistyani (Muslim, 2012), antara lain :

1. Tahap I Penyadaran
2. Tahap II Pengkapasitasan (*Capacity Building*)
3. Tahap III Pemberdayaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang berusaha mendeskripsikan sesuatu seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah

berlangsung. Dalam pendekatan deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen (Furchan, 2004). Lokasi penelitian ini adalah di Rumah Langit, yang bertempat pada Jl. Masjid Albaryah No. 63A rt04/rw01 Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur.

Teknik informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan penentuan sasaran penelitian yang akan peneliti gunakan. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan melalui pertimbangan atau ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan tujuan yang dilakukan dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : [1] anak-anak yang pernah dan sedang mengenyam pendidikan di Rumah Langit, [2] fasilitator yang paling lama dan fasilitator pendukung yang mengajar di Rumah Langit, [3] pengelola yang mengurus proses administratif di

Rumah Langit, [4] pemilik sebagai pendiri utama di Rumah Langit. Data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dibedakan menjadi dua sumber data yakni primer dan sekunder. Teknik analisis data interaktif. Validasi data dengan triangulasi berdasarkan sumber.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kramatjati merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan luas wilayah 13,00 km², luas itu merupakan 7,07% dari luas total wilayah Kota Jakarta Timur. Kecamatan ini terdiri dari 7 kelurahan, 64 Rukun Warga (RW), dan 644 Rukun Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 296.044 jiwa. Tingginya kepadatan penduduk pada Kecamatan Kramatjati sebanyak 22,77 per km², menempati posisi ke dua setelah Kecamatan Jatinegara yaitu sebesar 26,83 per km². Hal ini terjadi karena, tempat tersebut

memiliki daya tarik dari sektor perdagangan. Terdapat Pasar Induk Kramatjati sebagai pasar tradisional yang kegiatannya berlangsung selama 24 jam dan Pusat Grosir Cililitan (PGC) merupakan tempat grosir terbesar dengan fasilitas *shelter* busway langsung terhubung ke dalam gedung satu-satunya di Indonesia (Timur, 2020).



Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Kramatjati
Sumber :Open Street Map Indonesia

Tingginya laju perekonomian tersebut tetap tidak sebanding dengan jumlah penduduk Jakarta Timur yang melakukan urbanisasi dalam rangka mencari peruntungan. Kemudian hal tersebut, menimbulkan anggapan tentang “penduduk kota

yang miskin” karena hanya mencari eksistensi di daerah kumuh (*slum area*) (Fanon, 2000). Banyaknya penduduk yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan hunian layak, akhirnya membuat mereka untuk bekerja serabutan menjadi pemulung. Pekerjaan ini dijadikan jalan keluar agar penduduk tersebut dapat bertahan hidup di kota. Penduduk tersebut banyak tinggal di Kelurahan Kampung Tengah, tepatnya di *Jl. Al Bariyah*. Hunian para pemulung ini sering disebut “lapak” oleh warga sekitar. Lapak di sini diartikan sebagai tempat para pemulung mengumpulkan barang bekas seperti barang plastik, kaleng, kardus, dan besi serta dijadikan hunian untuk mereka tinggal. Lapak ini dapat dijumpai pada sepanjang *Jl. Al Bariyah*, tepatnya setelah Kantor Kelurahan Kampung Tengah.

Rumah Langit mencoba mengatasi permasalahan pendidikan untuk anak-anak lapak yang termarginalkan dengan melakukan pemberdayaan melalui bidang pendidikan. Marginal di sini yaitu

masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kaum masyarakat (Habibi Syahid, 2015). Pemberdayaan pendidikan yang dilakukan yayasan berupa kegiatan belajar pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), serta memberikan makan sore gratis. Sebab yayasan merasa bahwa melihat permasalahan pendidikan di Kampung Tengah ini masih belum terpenuhi. Hal ini membuat Rumah Langit melakukan pemeliharaan masyarakat, khususnya anak-anak lapak tersebut dalam bidang pendidikan non formal.

Profil Yayasan Rumah Langit

Sejarah Singkat, Motto, dan Visi Misi Yayasan Rumah Langit

Rumah Langit merupakan salah satu yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan anak marginal, namun awalnya tempat ini hanya sebuah komunitas sosial. Tempat ini dibentuk seperti rumah yang nyaman untuk kalangan manapun. Diharapkan penghuni Rumah Langit dapat berpikir dan berekspresi seluas-luasnya tanpa batas, sehingga

mereka dapat menemukan jati dirinya. Rumah Langit didirikan pada 5 Desember 2016 oleh Ir. Yusar Mikail ini bertujuan untuk meningkatkan semangat anak penerus bangsa untuk lebih memikirkan pendidikan, terutama untuk anak kurang mampu dan putus sekolah yang selama ini masih sering terlupakan keberadaannya.

Tujuan pelegalan tersebut yaitu, diharapkan agar tempat ini dapat lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar dan para donatur. Menurut (Irawan, 2018) yang dikutip dari Easybiz, menyatakan bahwa pelegalan itu penting untuk membangun kredibilitas yang baik, sebab selain diakui oleh hukum hal ini juga dapat membuat kekayaan pribadi dan yayasan dapat dipisahkan supaya tidak tercampur seperti pada Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Namun, untuk melakukan pelegalan tersebut perlulah biaya dan notaris. Sebagai komunitas yang masih terbilang baru bukanlah hal mudah untuk

melakukan hal tersebut. Perlu adanya prestasi setidaknya agar donatur lebih percaya untuk membantu melegalkan tempat tersebut. Akhirnya, melalui kegiatan “Pemuda Pelopor” yang dilaksanakan 2018, tim dari kakak-kakak Rumah Langit maju. Tim yang diketuai oleh, Winona Syifa pada saat itu dapat meraih keberhasilan dengan meraih juara pertama. Akhirnya tempat ini dapat dilegalkan dalam bentuk “yayasan” secara gratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kakak Winona :

“Awalnya itu aku, pemuda pelopor ikut lomba bawain rumah langit nah awalnya tapi masih bentuk komunitas. Nah terus bapak kan juga pengen nyari danakan tapi komunitas itu sulit kalo nyari dana ke perusahaan soalnya kalo nanti ada sumbangan gitu agak sulit kalo ga berbadan hukum dan ga percaya.”

Akhirnya pada tahun 2018, tempat ini dapat diakui secara hukum keberadaannya pada tanggal 28 Maret 2018. Melalui SK No : AHU-0004439.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Yayasan Rumah Langit. Dengan Yusar Mikail sebagai pemilik sekaligus pembina dan Winona Syifa

sebagai ketua yayasan. Pelegalan hukum ini, diharapkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh yayasan lebih tertata dan terstruktur. Selain itu, semua hal yang ada di dalamnya sudah dilindungi secara hukum.

Fungsi dari yayaan ini yaitu sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu kesejahteraan masyarakat, jadi dalam keberlangsungannya tidak berfokus pada komersil atau keuntungan mencari laba. Jumlah murid yang berada di sini hingga saat ini tercatat lebih dari 100 orang, dengan murid yang aktif sebanyak 50 orang dan didominasi oleh perempuan. Rumah langit bejalan sesuai dengan prinsipnya yaitu “langit tanpa batas”. Diibaratkan seperti jagat raya yang luas dan tidak ada batasan. Maka yayasan ini diharapkan menjadi sesuatu yang besar, berawal dari rumah sederhana tetapi memiliki makna yang besar di dalamnya.



Gambar 2 Logo Rumah Langit
Sumber : Dokumentasi Rumah Langit

Selain logo Rumah Langit, untuk memberikan semangat kepada anak-anak langit terdapat motto yaitu *"bermimpilah setinggi langit dan jangan takut untuk terjatuh"*. Motto ini diharapkan dapat menjadi dorongan semangat untuk anak-anak langit supaya lebih giat untuk belajar. Selain itu, yayasan ini berharap siapapun yang berada di sini dapat meraih semua angan dan mimpinya tanpa takut salah. Diharapkan juga, ketika merasa gagal mereka tidak takut untuk bangkit dan memulainya kembali. Sebab seseorang yang sukses pasti pernah gagal, namun orang tersebut dapat bangkit dan memperbaiki kegagalan itu.

Rumah Langit dalam mencapai tujuannya, menetapkan sebuah *visi* yaitu *"meningkatkan semangat hidup anak-anak kurang mampu dan putus sekolah di masa depan"*. Sementara dalam menyukseskan *visi* tersebut, perlu adanya *misi* yang selaras yaitu, 1) Mengambil waktu setiap hari selama tiga jam untuk keluar melupakan sampah dan memikirkan mimpi, pendidikan, bakat, dan minat kerja; 2) Membuat anak-anak bahagia sebagai anak pada umumnya; 3) Membuat anak-anak senang untuk belajar; 4) Membuat anak-anak mempunyai mimpi dan harapan; 5) Membuat anak-anak fokus meraih mimpinya. *Visi* dan *Misi* ini berfungsi sebagai tujuan atau arah yayasan ini akan berjalan.

Selain dari *visi* dan *misi*, dalam kegiatannya yayasan ini juga berlandaskan pada Pancasila Sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", Hadist Rasulullah SAW "kemiskinan itu dekat kepada kekufuran HR-Abu Na'im", dan Surah Al-Maidah 5:2 "dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaan.” Ketiga hal ini, dijadikan dasar pemikiran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam Rumah Langit.

Program Inti Kegiatan Rumah Langit

Tes Permata Pelajaran Sebulan Sekali

Bentuk evaluasi dari hasil pembelajaran selama dikelas dalam jangka waktu sebulan sekali dengan tujuan mengukur kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui sudah sejauh mana mereka menyerap materi yang telah disampaikan di depan kelas.

Pengambilan Raport

Hasil penilaian kemajuan belajar yang berbentuk “Buku Raport” sangat penting bagi orang tua peserta didik, ebagai bahan informasi mengenai kemampuan belajar yang dicapai anaknya (Sakni, 2006). Rumah Langit mengeluarkan hasil

penilaian belajar peserta didik dalam bentuk buku raport yang dibagikan setiap 6 bulan sekali. Buku raport ini diharapkan dapat menjadi penyemangat anak-anak langit, untuk terus giatdalam belajar.

Rapat Pengurus dan Jajaran

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi para fasilitator pendidik. Bertujuan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai oleh peserta didik. Rapat ini dilakukan setiap hari setelah kegiatan belajar mengajar usai. Biasanya para pengurus akan pulang belakangan setelah mengajar sebab selalu mengadakan evaluasi ini di Ruang kelas. Evaluasi ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan hari ini baik dari segi anak-anak peserta didik dan para fasilitator pendidik.

Mengadakan Even Besar

Merayakan HUT RI setiap tahun nya dengan mengadakan lomba-lomba dan Rumah Langit juga membuat pensi besar yang dilakukan 6 bulan sekali dengan tujuan merelaksasikan anak-anak setelah masa pembelajaran usai. Pensi yang

dilakukan setiap 6 bulan sekali itu juga bertepatan saat pengambilan hasil belajar atau raport.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Rumah Langit dalam melaksanakan kegiatan belajar sudah terjadwal. Jadwal itu dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat, pada pukul 13.00-17.00. Dimana setiap hari Senin mereka belajar Bahasa Inggris (TK s/d Kelas 2 SD), hari Selasa IPA, hari Rabu Matematika, hari Kamis Bahasa Inggris (Kelas 3 SD s/d 6 SD), dan hari Jumat kesenian. Pada pelajaran Kesenian ini akan di bedakan setiap minggunya selama sebulan.

Study Tour

Kegiatan *study tour* ini dilaksanakan setiap setahun sekali dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada anak-anak seperti apa dunia luar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak juga tidak bosan dengan suasana kelas yang monoton. Dengan kegiatan ini juga, anak-anak dilatih akan wawasan di dunia luar.

Pedoman Gizi Seimbang

Setiap kegiatan belajar mengajar usai, biasanya anak-anak akan diberikan makanan baik itu makanan ringan dan makan besar. Kegiatan memberikan asupan makanan gratis ini biasanya dari sumbangan para donatur yang menyumbangkan beberapa makanan. Makanan tersebut dapat berupa beras, lauk pauk, minuman, gula, minyak, dan masih banyak lagi yang nantinya dapat digunakan untuk memasak makanan.

Bakti Sosial

Bakti sosial yang dilakukan oleh Rumah Langit sangatlah sederhana. Yayasan ini memberikan buku gratis kesesama yang membutuhkan. Buku tersebut didapat dari sumbangan yang diberikan donatur ke Rumah Langit. Biasanya kegiatan ini dilakukan rutin setiap sebulan sekali di tanggal 17. Pemberian buku gratis ini biasanya di pegang langsung oleh Bapak selaku pemilik Rumah Langit.

Penyaluran ke Jenjang yang Lebih Tinggi

Rumah Langit hanya menyediakan jenjang Taman Kanak-

kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Setelah itu, mereka akan disalurkan ke yayasan yang bekerjasama dengan Rumah Langit yaitu Nara Kreatif. Yayasan ini bergerak dalam bidang kewirausahaan sosial (*social enterprise*) yang menjawab permasalahan angka putus sekolah melalui bisnis pengelolaan lingkungan (*environmental management*).

Program Insidental Rumah Langit Abdimas

Pengabdian masyarakat merupakan program dadakan yang ada di Rumah Langit. program ini dilakukan ketika lembaga atau komunitas ingin melakukan kerja sama dalam bidang pertukaran informasi.

Bukber

Buka Puasa Bersama Rumah Langit dilakukan setiap setahun sekali saat bulan Ramadhan. Kegiatan ini akan dilaksanakan sekali di bulan Ramadhan tersebut. Karena setiap bulan puasa kegiatan belajar mengajar di Rumah Langit diliburkan.

Bentuk Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan Sebagai

Tahap Penysadaran

Rumah Langit lebih memilih menerapkan kurikulum 2006 dibandingkan kurikulum 2013 dikarenakan kultur dan pola pikir anak-anak yang masuk dalam Yayasan Rumah Langit belum cukup mampu apabila menerapkan kurikulum 2013 yang mewajibkan anak-anak untuk mencari tau sendiri apa yang mereka butuhkan sedangkan untuk menerapkan kurikulum 2013 membutuhkan sumber pengetahuan seperti buku, jurnal, dan internet. Dalam menggunakan kurikulum 2006, Rumah Langit mengadakan kelas peminatan dengan tujuan melihat potensi anak-anak di bidang non-akademik seperti latihan tari dan drama.

Maka dari itu, menerapkan kurikulum lama yaitu kurikulum 2006 adalah pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam strategi pembelajaran di Rumah Langit. Dalam strategi pemberdayaan, cara memotivasi anak-anak merupakan kunci utama dalam terbentuknya

Rumah Langit. Sebagai target yang hendak diberdayakan, mereka perlu diberi pencerahan dalam bentuk kesadaran di mana mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu tanpa perlu melihat status yang dimiliki. Salah satu bentuk motivasi untuk anak-anak adalah dengan mengadakan program pembelajaran yang ramah anak seperti outing (study tour) dan non akademis seperti kelas tari dan drama musikal. Seperti yang diungkap Larasati ketika mengikuti study tour:

“Iyaa, kemarin baru dari taman mini. Itu gratis ga bayar jadi aku dateng aja. Aku udah pernah ke sana tapi kalo ke museum IPTEK sama transportasinya baru pertama kali jadi seru deh.”

Dengan melakukan kegiatan yang disukai oleh anak-anak langit, maka bentuk memotivasi nantinya akan semakin mudah. Sebab ketika mereka sudah merasa senang dan nyaman maka nantinya akan memudahkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para fasilitator. Begitupula materi yang mereka dapat, nantinya akan lebih cepat diterima dan dimengerti.

Program pembelajaran yang ramah anak ini memang dirasa cocok untuk memotivasi anak-anak langit. Dengan latar belakang mereka yang berbeda dengan anak seusianya dan tuntutan hidup yang harus mereka kerjakan di luar sana. Mencari nafkah untuk keluarganya di rumah dengan bekerja serabutan. Mereka melakukan pekerjaan yang belum tentu anak-anak lain di usianya juga lakukan. Nyatanya kegiatan seperti study tour ini dapat membantu merelaksasi pikiran mereka dari dunianya.

Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Sistem Nilai Sebagai Tahap Pengkapasitasan

Selama berjalannya Yayasan Rumah Langit, segala bentuk kegiatan dan anggaran dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan beberapa pihak. Kerja sama tersebut dalam bentuk donasi ataupun kegiatan sosial oleh lembaga masyarakat, perusahaan, universitas maupun individu. Rumah langit juga menyediakan platform online maupun offline untuk masyarakat yang ingin berdonasi melalui

kitabisa.com. Ada juga dukungan dari *sahabat langit* (facebook) dengan donasi sebesar Rp 10.000,-/bulan, lalu pembagian alat tulis dari lembaga Winakarya dan pembagian roti hooland bakery setiap senin dan jum'at dari Food Cycle. Sedangkan dalam kegiatan sosial bisa berupa seminar dan abdimas (mengabdikan masyarakat). Seperti yang diungkap oleh Kakak Winona :

"Iya soalnya aku juga ikut jaringan, semua murid semua guru nah waktu itu najla dari situ makanya baim paula juga tau dari situ. Nahhh ngomong kerja sama itu kita pernah sama apa lagi yaaa ohhh nara kreatif buat PKBM gratis nahhh dia juga pernah masuk kickAndy. Kalo sama nara kreatif aku bentuk kerja samanya naruh anak-anak rumah langit buat ikutan ujian paket di sana. Kalo bentuk kerja samanya di semua murid semua guru itu lebih buat kakak-kakak pengajarnya sih kayak diskusi gitu. Kayak pelatihan ngajar gitu lewat diskusi-diskusi. Uniknya semua orang datang ke sini itu kita gatau mereka datang dari mana, padahal kita Cuma ngeshare lewat instagram doang terus kakak-kakaknya pada share lagi."

Selain bentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas murid, Rumah Langit juga menjalin kerjasama dengan *semua murid semua guru* milik Najla Shihab

untuk meningkatkan kualitas pengajar dalam mengajar. Selain itu, untuk mempromosikan Rumah Langit ke masyarakat luas tempat ini melakukan promosi melalui media sosial seperti facebook dan instagram. Dalam Instagram, dengan akun @dirumahlangit melakukan postingan kegiatan sehari-hari. Instagram sebagai media untuk promosi juga dijadikan tempat dokumentasi kegiatan. Yayasan juga bekerjasama dengan beberapa artis contohnya rizki nazar, syifa hadju, dan grite agatha. Artis tersebut, datang ke Rumah Langit secara sukarela tanpa dibayar. Mereka tahu bahwa yayasan ini tidak memiliki anggaran khusus untuk mengundang dan bahkan mempromosikan melalui artis tanah air. Walaupun mereka tidak membuat postingan dalam media sosialnya, tetapi melalui media sosial Rumah Langit kegiatan

Pemasukan	
Tunai	
Saldo Bulan Maret 2019	4.800.268
Program Donasi Bulanan 21 orang @Rp10.000	210.000
Sumbangan-Sumbangan Pribadi	22.661.000
Non Tunai	
Sembako untuk Rumah Langit Donasi Food Cycle (Roti) 130 pcs @per hari	2.063.000
	-
	29.734.268

tersebut sudah dipublikasikan. Semua bentuk kerjasama dan bantuan donasi yang datang untuk Rumah Langit kemudia di tulis dalam laporan keuangan. Laporan tersebut dibuat untuk mengetahui posisi keuangan yayasan ini. Kemudian hasil itu bermanfaat untuk mengetahui besarnya pemakaian dalam pengambilan keputusan keuangan.

Tabel 1 Laporan Keuangan Kegiatan Rumah Langit Bulan April 2020

Pengeluaran	
Konsumsi	
50 orang @Rp88.000	4.400.000
Kebersihan	
8 hari @50.000	400.000
MNC Play	
8 hari @150.000	1.200.000
Sembako untuk Rumah Langit	2.063.000
Donasi Food Cycle (Roti)	
130 pcs @per hari	-
Surplus	21.671.268
	29.734.268

Sumber : Dokumen Rumah Langit

Hasil laporan keuangan pada Bulan April 2020, terlihat bahwa Rumah Langit memiliki surplus sebesar Rp 21.671.268,-. Pengeluaran didapat dari konsumsi sejumlah Rp 4.400.000/bulan, hasil ini diperoleh dari konsumsi makanan pokok

setelah kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak langit dan para fasilitator yang mengajar, makanan ini terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kebersihan yang sejumlah Rp 400.000/bulan, ini di keluarkan untuk menjaga kebersihan lokasi Yayasan Rumah Langit selama satu bulan. Kemudian MNC Play sebanyak Rp 1.200.00/bulan, ini merupakan pengeluaran untuk wifi dan pendukung lainnya dalam mengakses sarana belajar mengajar di kelas.

Selanjutnya sembako untuk dibagikan ke anak-anak yang ada di Rumah Langit senilai Rp 2.063.000. Selain pengeluaran, dalam menjalankan kegiatan yang gratis ini juga memiliki dana pemasukan dari sekitar. Pemasukan yang ada di Rumah Langit dibagi menjadi dua kategori yaitu tunai dan non tunai. Pemasukan tunai pertama berasal dari bulan sebelumnya yang mengalami surplus, yang sewaktu-waktu dapat dijadikan dana darurat oleh pengelola Rumah Langit. Kemudian program bulanan yang dapat terkumpul sebesar Rp

210.000 dari 21 orang, program ini dilakukan melalui Facebook yang donaturnya darimasyarakat yang ada di Indonesia.

Pemasukan berikutnya yaitu dari sumbangan- sumbangan pribadi dengan total sejumlah Rp 22.661.000, sumbangan ini berasal dari donatur bulanan yang secara langsung datang memberikan ke Rumah Langit dan secara tidak langsung dengan melalui platform *kitabisa.com*. Lanjut ke pemasukan non tunai, terdapat sembako senilai Rp 2.063.000 yang berisi bahan pokok antara lain, beras, minyak, mie instan, sirup, kue kalengan, dan sabun. Terakhir terdapat pemasukan dari donasi Food Cycle berupa roti Holland Bakery yang diberikan secara gratis sebanyak 130pcs/hari, roti ini dibagikan setiap Hari Senin dan Jumat.

Tahap Pemberdayaan

Pada tahap pemberdayaan yang dimana mereka para penerima manfaat akan diberikan daya atau peluang sesuai dengan kualitas diri mereka. Pemberian ini diharapkan

nantinya akan menjadi bekal mereka ketika sudah berdaya atau lulus dari Rumah Langit. semua bekal yang sudah diberikan oleh para fasilitator diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk anak- anak tersebut. Pada kegiatan cipta puisi di Pasar Seni Ancol, anak-anak Rumah Langit yang tertera pada gambar yaitu Aurel (14 tahun), Ela (14 Tahun), dan Ika (13 Tahun) menampilkan kemampuan mereka dalam bidang sastra yaitu menciptakan puisi dan membacakan hasil karya mereka sendiri di depan tamu yang hadir dalam acara Betawi Puisi Indonesia. Walaupun peserta didik di Rumah langit didominasi oleh laki-laki, namun dalam bidang prestasi nyatanya perempuan lebih mendominasi salah satu contohnya yaitu saat kegiatan cipta puisi ini.

Acara ini diselenggarakan oleh para seniman Betawi yang memperingati Hari Puisi Indonesia. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya, anak-anak di Rumah Langit sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena mereka dapat menyalurkan bakatnya dalam bidang

satra. Hal ini juga menjadikan tolak ukur bahwa Rumah Langit sudah dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pemberdayaan bidang pendidikan untuk anak-anak marjinal. Selain itu, bentuk keberhasilan lainnya juga dapat dilihat pada anak-anak yang telah mengikuti ujian paket kesetaraan.

Sejak awal berdirinya Rumah Langit pada tahun 2016 dan diresmikan menjadi yayasan pada tahun 2018, selama ini sudah meluluskan lima murid melalui ujian paket kesetaraan yang bekerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif. Rumah Langit sudah mampu memberdayakan anak-anak yang awalnya belum bersekolah dan berhenti sekolah kemudian menjadi kembali bersekolah dan lulus secara resmi dengan memiliki ijazah serta keterampilan personal yang dilatih selama berada di Rumah Langit. Sebagai pemilik tempat ini, Bapak Yusar sangat mengharapkan dapat menemukan tempat-tempat yang bermanfaat lainnya untuk lingkungan sekitar.

Semua kegiatan yang telah dilakukan di Rumah Langit diharapkan akan menjadi bekal untuk anak-anak langit. Semua pelatihan yang telah diajarkan dan nilai-nilai yang telah diterapkan diharapkan akan berguna sebagai landasan hidup mereka. Dengan bekal yang telah mereka punya dan keahlian serta keterampilan tersebut nantinya mereka dapat merubah hidupnya menjadi yang lebih layak lagi. Diharapkan pula, mereka akan menjadi figur di sekitarnya untuk berubah dan menyadarkan akan pentingnya suatu pendidikan untuk masa depan.

1. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pemberdayaan di Rumah Langit

Sejalannya waktu, dalam melaksanakan pemberdayaan terdapat faktor pendorong dan penghambat. Faktor tersebut datang dari internal dan eksternal yayasan Rumah Langit. Maka dari itu, hal ini bisa berpengaruh besar terhadap keberhasilan saat menjalankan program-program yang sudah

direncanakan sebelumnya oleh yayasan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong yang berasal dari diri sendiri (internal) dan faktor pendorong dari luar (eksternal). Faktor pendorong dalam melakukan pemberdayaan di Rumah Langit antara lain :

1. Keuangan merupakan faktor pendorong eksternal yang menjadi salah satu sumber dalam keberlangsungan yayasan Rumah Langit. Donasi ini diberikan oleh beberapa masyarakat dan lembaga yang ingin menyumbangkan pendapatannya ke Rumah Langit. Hasil donasi tersebut akan digunakan untuk membeli keperluan dalam proses pembelajaran maupun asupan gizi anak setiap hari nya. Selain itu, hasil dari donasi tersebut juga digunakan untuk merenovasi yayasan Rumah Langit secara bertahap sehingga menciptakan lingkungan belajar yang terkesan nyaman, bersih, dan kondusif.

2. Selain donasi, faktor pendorong internal yang paling utama dari keberlangsungan Rumah Langit adalah keinginan anak itu sendiri untuk bersekolah dan mempunyai teman-teman baru. Keinginan seorang anak kecil yang ingin membahagiakan orang tua nya lewat jalur pendidikan dan keinginan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan hidup di lingkungan kumuh sehingga menciptakan keinginan untuk hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat yang berasal dari diri sendiri (internal) dan faktor penghambat dari luar (eksternal). Faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan di Rumah Langit antara lain :

1. Pembagian waktu antara pengajar atau failitator dalam mengkoordinasi satu sama lain merupakan hambatan internal yang sering sekali ditemui, dikarenakan semua pengajar di yayasan Rumah Langit merupakan tenaga sukarela yang rata-rata masih

duduk di bangku perkuliahan. Sehingga membagi waktu antara jam kuliah dan jam mengajar masih sulit. Maka dari itu, keterbatasan jumlah pengajar dan konsistensi para pengajar masih menjadi faktor penghambat dalam proses belajar mengajar.

2. Selain itu, pandangan di masyarakat yang masih kurang percaya dengan hadirnya sekolah gratis seperti yayasan Rumah Langit masih sering sekali ditemui dan menjadikan penghambat eksternal dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di sana. Seperti halnya banyaknya orang tua yang takut anaknya diculik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, organ-organnya dijual, diajarkan faham-faham komunis yang berakibat menjadi teroris dan dogma agama yang menyimpang. Maka dari itu, dengan banyaknya pandangan negatif dengan kehadiran Rumah Langit membuat banyak orang tua yang tidak memberi izin kepada anaknya untuk sekolah di Rumah Langit.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diuraikan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Rumah Langit dapat di kelompokkan menjadi tiga tahap. Tahap pertama, kesadaran anak-anak langit diberi pengetahuan yang bersifat kognitif (mental), belief (kepercayaan), dan healing (penyembuhan diri). Prinsip dasarnya adalah membuat seseorang mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan tersebut dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Tahap kedua, pengkapasitasan yang terdiri dari tiga cakupan yaitu kualitas sumber daya manusia yang berperan menjadi fasilitator di sana, pengelolaan organisasi yang terdiri dari anggaran dan bentuk kerjasama, serta sistem nilai yang dijadikan pedoman di Rumah Langit. Tahap ketiga, pemberdayaan yang di mana mereka para penerima manfaat akan diberikan daya atau peluang sesuai

dengan kualitas diri mereka, pemberian ini diharapkan nantinya akan menjadi bekal mereka ketika sudah berdaya atau lulus dari Rumah Langit.

2. Dalam menjalankan bentuk pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Rumah Langit, pasti terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat baik dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Faktor pendorong yaitu keinginan untuk bersekolah dan mempunyai teman-teman yang baru serta banyaknya donasi yang telah diberikan oleh beberapa masyarakat untuk keberlangsungan kegiatan Rumah Langit. Sedangkan faktor penghambat yang bersumber dari pembagian waktu antara failitator dalam mengkoordinasi satu sama lain merupakan hambatan paling sering ditemui dan faktor penghambat berikutnya yaitu pandangan di masyarakat yang masih kurang percaya dengan hadirnya sekolah gratis seperti yayasan Rumah Langit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, H. (2017). *Lingkaran Setan Pendidikan Karakter*. Jakarta: DetikNews.
- Alaidrus, F. (2019). BPS Sebut IPM DKI Membaik, Tapi Angka Putus Sekolah SMK Meningkat. DKI Jakarta: Tirto.id.
- Dwi, S. (2011, Januari 27). Siapa Kelompok Marginal? Dipetik Desember 9, 2019, dari [wordpress.com: https://sinduhartanto.wordpress.com/2011/01/27/siapa-kelompok-marginal/](https://sinduhartanto.wordpress.com/2011/01/27/siapa-kelompok-marginal/)
- Fanon, F. (2000). *Bumi Berantakan*. Jakarta: Teplok Press.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ganiem, L. M. (2017). *Pemberdayaan Perempuan Mikin Kota Melalui Pendidikan*. *Jurnal ASPIKOM*, 239-255.
- Habibi Syahid, A. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal Di Perkotaan*. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 155-168.
- Hidayat, F., Aminiah, N., & Handono, P. (2018). *Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. DKI Jakarta: BPS.
- Husna, F. (2018). *Inovasi Pendidikan Pada Kaum Marginal*. *Jurnal Sosiologi USK*, 38-54.
- Irawan, D. (2018). *Mau Mendirikan Yayasan dan Mengurus Legalitasnya? Perhatikan 9 Hal Ini*. Dipetik Mei 18, 2020, dari [easybiz](http://easybiz.com):

- <https://www.easybiz.id/mendirikan-yayasan-dan-mengurus-legalitasnya/>
- Kamajaya, G., Djafarnantyo, R. K., & Punia, I. N. (2018). Komunitas Anak Alam sebagai Gerakan Sosial Baru dalam Mencegah Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bangli. *JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI (SOROT)*, [S.l.], v. 1, n. 1, jan., 1.
- Kuntoro, S. A., & Shofwan, I. (2014). Pengelolaan Program Pembelajaran Pendidikan alternatif Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah di Salatiga Jawa Tengah. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 50-62.
- Latif, F. (2019). *Statistik Daerah Kota Jakarta Timur 2019*. Jakarta Timur: BPS Kota Jakarta Timur.
- Levitas, R. (1998). *The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour*. Basingstoke: Macmillan.
- Miranti, F. (2018). *Statistik Daerah Kota Jakarta Timur 2018*. Jakarta Timur: BPS Kota Jakarta Timur.
- Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). The Vicious Circle of Poverty in Rural Society, Case Study of Tobacco Farmers in the Rural Area of Lombok Island. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 120-127.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2016). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sakni, R. (2006). *Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan*. Palembang: Rafah Press.
- Scott, J. (2011). *Sosiologi: The Key Concepts*, Tim penerjemah Labsos FISIP UNSOED-Ed. 1,-1,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, N., Bagindo, H., Dian, A. F., & Mumtaz, T. (2018). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2018*. DKI Jakarta: BPS.
- Therborn, G. (2006). *Inequalities Of The World: New Theoretical Frameworks, Multiple Empirical Approach*. London: Verco.
- Timur, S. K. (2020). *Geografi*. Dipetik Januari 29, 2020, dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur: <https://timur.jakarta.go.id/v19/Pemerintahan/profil#geografi>
- Urip, K. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Timur 2018*. Jakarta Timur: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur.
- Usman, S. (2012). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yus, D. (2015, Juni 24). *Dilema Kaum Marjinal*. Dipetik Desember 8, 2019, dari Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/dianay/552e5b396ea83493518b4589/dilema-kaum-marjinal>

PEMAKNAAN MAHASISWA TENTANG KOMUNISME DI PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH

Dimas Aditya Nugroho, Tri Wuryaningsih
Program Studi S1 Sosiologi FISIP Unsoed
dimasapanugroho@gmail.com

ABSTRAK

Partai Komunis Indonesia pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia hingga tahun 1965. Namun karena kejadian G30S/PKI pada September 1965 pada akhirnya melalui TAP MPRS nomor XXV/1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI, secara mendadak partai tersebut menjadi musuh masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada pemaknaan mahasiswa terhadap komunisme dan eks-tahanan politik (tapol) PKI di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan penelitian yaitu mahasiswa yang berkuliah di 4 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Purwokerto. Jumlah informan ada 8 orang, terdiri atas 4 laki-laki dan 4 perempuan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, informan memaknai secara berbeda tentang stigma komunis yang dibangun oleh Orde Baru. Perbedaan pemaknaan muncul setelah mereka mencari informasi dari sumber lain di luar sekolah. Respon informan terhadap eks-tapol juga bervariasi. Dukungan moral diutarakan pula oleh informan. Mereka menolak persekusi terhadap penganut paham komunis, namun pembedaan kepada yang berstatus eks-tapol masih dianggap perlu.

Kata kunci: Pemaknaan, Komunisme, Mahasiswa

ABSTRACT

The Indonesian Communist Party (PKI) was once one of the largest parties in Indonesia until 1965. However, due to the G30S/PKI incident in September 1965, through TAP MPRS number XXV/1966 regarding the disbandment and banning of the PKI, the party suddenly became an enemy of the people. This study focuses on the meaning of students towards communism and ex-political prisoners (tapol) of the PKI in Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java. The research method used is a qualitative method. Research informants are students who study at 4 universities both public and private in Purwokerto. The number of informants was 8 people, consisting of 4 men and 4 women. Data obtained through interviews, observation and documentation, then analyzed by interactive data analysis techniques. The results showed that the informants interpreted differently about the communist stigma built by the New Order. Differences in meaning emerged after they sought information from other sources outside of school. Informants' responses to ex-tapol also varied. Informants also conveyed moral support. They reject the persecution of communists, but the distinction between ex-tapol status is still considered necessary.

Keywords: Meaning, Communism, Students

PENDAHULUAN

Bentuk diskriminasi di dalam kehidupan eks-tahanan politik (tapol) merupakan sesuatu yang lumrah mereka terima. Ketidakadilan pemerintah kepada para keturunan eks-tapol yang tidak boleh menjadi pegawai negeri, wartawan, dinas kemiliteran, dilarang mempublikasikan karya mereka dan kesulitan masuk ke perguruan tinggi negeri membuat kehidupan mereka sebagai warga negara terasa dibatasi. Walau sudah banyak organisasi atau lembaga yang berusaha memperjuangkan kehidupan para eks-tapol tetapi citra masyarakat yang selalu mengaitkan mereka sebagai komunis masih kuat. Komunis yang dianggap *ateis* adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ideologi Pancasila. Hal ini melahirkan cemoohan terhadap para eks-tapol dan keturunannya. Kondisi politik di setiap pemilihan umum (pemilu) terutama pemilu presiden selalu membuat isu-isu yang disebarkan oleh para elit politik semakin terasa kasar. *Black campaign* untuk memperebutkan posisi membuat trauma atau fobia di masyarakat yang

sudah ada menjadi salah satu cara tercepat untuk menjatuhkan posisi lawan. Sebagai contoh, isu yang menyatakan presiden saat ini, Joko Widodo, adalah seorang PKI (Subekti, 2015). Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap eks tapol. Citra yang sudah mulai diredam dan bukti-bukti sejarah yang sedikit demi sedikit diperbaiki, kembali memanas. Masyarakat kembali memusuhi para eks tapol dengan berita yang mendiskriminasi mereka.

Eks-tapol merupakan produk dari pemerintahan Orde Baru. Pada masa kini mereka telah kembali kepada kehidupan bermasyarakat dan secara sosial seharusnya telah diakui. Orang-orang yang mendapatkan "tanda" eks-tapol adalah mereka yang telah dibebaskan dari tahanan atas tuduhan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun organisasi yang berada di bawahnya. Pembebasan orang-orang yang diduga berkaitan dengan PKI dimulai tahun 1977 saat Indonesia didesak oleh pihak internasional tentang hak-hak para tahanan politik tersebut. Tetapi para tahanan tersebut masih dalam pengawasan dari pemerintah dengan

memberikan mereka tanda di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berupa keterangan "ET" dan kegiatan mereka masih dibatasi. Propaganda antikomunis yang digencarkan oleh Orde Baru dalam skala nasional telah membentuk identitas nasional. Dalam konsep memori kolektif, identitas nasional mempunyai makna sebagai kekuatan hegemonik yang ada di dalam negara kebangsaan yang menyisihkan dan membungkam wacana identitas lain yang ada (Olick & Robbins, 1998). Dalam wacana antikomunis, identitas nasional berarti 'diri' yang pancasilais, sedangkan yang tidak termasuk 'diri' berarti adalah 'yang lain', komunis (Budiawan, 2004). Dengan kata lain, untuk menjadi warga negara Indonesia maka seseorang harus antikomunis. Hal tersebut selanjutnya, membentuk pengalaman khusus yang dirasakan bersama, yang kemudian menjadi basis identitas kelompok melalui proses identifikasi (Misztal, 2003). Lebih jauh lagi, identitas kelompok juga secara resiprokal menentukan apa yang harus diingat dalam masyarakat "memori sosialnya" (Gillin, 1954).

Pascareformasi ditandai dengan mulainya sistem pemilihan secara langsung. Di bawah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, tidak begitu banyak terjadi isu-isu diskriminasi terhadap eks-tapol. Saat itu muncul gerakan "kamisan" pada 2007 yang menyuarakan gerakan HAM termasuk di dalamnya para "aktivis 65" dan eks-tapol. Hal ini menandakan ada sedikit kelonggaran dari pemerintah terhadap eks-tapol yang dianggap sebagai ancaman pada masa Orde Baru. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo isu PKI kembali muncul dengan selalu menghubungkan Presiden Joko Widodo sebagai keturunan PKI dan dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Isu yang muncul seperti itu kembali membuat kebencian terhadap keturunan PKI dan kekhawatiran terhadap pergerakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat (Boni, 2018).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Interaksionisme Simbolik (Signifikan dan Non-Signifikan)

Respon yang diberikan mahasiswa menjadi fokus penelitian ini karena respon yang dimiliki setiap individu berbeda-beda dengan sudut pandangan dan tindakan yang berbeda sesuai dengan stimulus yang diberikan. Mead (1934) menjelaskan pembagian respon yang diberikan sesuai dengan *mind*, *self*, dan *society* setiap orang. Secara singkat teori interaksionisme simbolik memiliki tiga premis dasar yaitu:

1. Individu merespon situasi simbolik, merespon objek fisik (benda) dan objek sosial (prilaku manusia) sesuai dengan media yang berada di sekitar lingkungan mereka.
2. Makna yang merupakan produk interaksi sosial tidak melihat pada objek namun dinegosiasikan menggunakan bahasa. Negosiasi dalam hal ini berupa hal abstrak tidak berlandaskan kepada objek fisik, tindakan atau peristiwa tertentu.
3. Makna yang disampaikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan perubahan situasi yang ditemukan selama interaksi sosial dan perubahan interpretasi

dimungkinkan karena individu melakukan proses mental, yakni komunikasi dengan dirinya sendiri. telah dipertimbangkan demi tujuan dan memberikan efek yang sesuai dengan pemahaman tentang simbol-simbol yang diketahuinya, namun masyarakat akan cenderung melakukan tindakan yang non-signifikan apabila tidak mengerti tentang apa yang dilakukannya terhadap seseorang karena simbol-simbol yang ada tidak dimengerti olehnya. Respon yang diberikan mahasiswa menjadi dasar pada topik penelitian ini.

Sekilas tentang Sejarah Komunisme di Indonesia

Sebagaimana yang dikatakan oleh Suseno (2001) ajaran komunisme memiliki 3 (tiga) bagian. Pertama, sebuah landasan berpikir tentang materialisme dialektis dan materialisme historis. Kedua, pemikiran tentang ekonomi politik yang berisi kritik terhadap kapitalis, dan ajaran ekonomi sosialisme serta komunisme. Ketiga, berisi strategi dan taktik perjuangan revolusi kaum proletar. Komunisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830

berbarengan dengan kata sosialisme, pada awalnya kedua kata tersebut memiliki arti yang sama namun, kata komunisme dipakai oleh aliran sosialis yang lebih radikal dan menuntut penghapusan total hak kepemilikan pribadi dan mengharapkan keadaan lebih baik bukan dari yang diberikan pemerintah melainkan perjuangan kaum miskin (Suseno, 2001).

Karl Marx yang merupakan tokoh pencetus ideologi komunis hidup pada masa Revolusi Prancis dan Revolusi Industri di Inggris. Perkembangan ekonomi yang pesat membuat kesenjangan di masyarakat, nilai tenaga buruh jatuh, tenaga kerja mulai diganti dengan mesin-mesin, pengangguran merajalela dan tingkat kemiskinan pada masyarakat meningkat. Ajaran komunisme Marx yang paling populer yaitu keterasingan dalam pekerjaan dan teori kelas. Dalam keterasingan pekerja, Marx menjelaskan tindakan manusia yang paling dasar adalah pekerjaan.

Dengan bekerja, manusia memiliki esensi untuk hidupnya, menjadikan manusia sebagai makhluk

sosial yang selalu memastikan dirinya, selalu berhadapan dengan orang lain, dan memiliki rasa untuk saling membutuhkan. Dengan begitu, seharusnya manusia dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa bebas namun keterasingan muncul akibat dari kepemilikan alat pribadi. Pekerjaan tidak memiliki arti bagi pekerja karena hasil produk dari pekerja akan menjadi milik pribadi dari pemilik alat. Lalu, pekerja akan menjadi terasing karena hanya menjadi keterpaksaan dalam pekerjaan dan hasilnya akan menjadi milik orang lain bukan berdasarkan hasrat dan dorongan dari batinnya. Dengan demikian pekerja berada dibawah pemilik modal/kapitalis yang tidak bekerja (Rujikartawi, 2015).

Komunisme di Indonesia dibawa masuk oleh Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet berkebangsaan Belanda pada tahun 1914 dan bersama temannya Adolf Baars mereka mendirikan *Indische Social Democratische Vereeninging* (ISDV) atau serikat buruh kereta api. Semaun dan Darsono sebagai anggota Sarekat Islam (SI) pernah belajar

tentang komunisme kepada Sneevliet di ISDV. Karena SI yang kurang memperhatikan nasib petani membuat pergerakan Semaun dan Darsono dalam organisasi tersebut menjanjikan pemikiran baru yang lebih radikal, membuat organisasi SI terpecah menjadi SI merah di bawah pimpinan Semaun dan SI putih yang menolak pemikiran radikal Semaun. Akibat dari perpecahan tersebut H. Agus Salim menegakkan disiplin partai terhadap SI yang membuat organisasi massa Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam sebagai pecahan dari SI putih sedangkan SI merah yang dipimpin oleh Semaun menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1926 di Banten dan tahun 1927 di Salukang, Sumatra Barat PKI pimpinan Semaun semakin sering melakukan pemberontakan pada pemerintah kolonial.

Namun karena pemikiran komunisme yang masih terhitung baru di masyarakat dan tidak memiliki rasa revolusioner terlebih dahulu membuat kekuatan pemberontakan PKI tidak maksimal sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pemberontakan tersebut. Tan

Malaka yang masih menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan pemikiran komunisme kembali terlihat aktif ketika Muso mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia sekaligus berusaha mendirikan negara "Republik Soviet Indonesia" di Madiun pada 18 September 1948. Gerakan tersebut sendiri mendapat kecaman dari berbagai basis PKI di daerah lain terutama PKI pimpinan Tan Malaka yang menganggap kaum proletar di Indonesia adalah petani bukan buruh seperti di Uni Soviet dan memprediksikan pemberontakan akan gagal. Dalam waktu tidak sampai 2 minggu, pemberontakan PKI di Madiun diredam oleh divisi Siliwangi.

Ketika D.N Aidit kembali dari Republik Rakyat Tiongkok popularitas PKI sebagai partai berideologi komunisme menguat. Jumlah keanggotaan PKI yang terus meningkat sampai dengan tiga juta anggota membuatnya menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia sehingga 30% suara dalam pemilu daerah dikuasai. Akibat pertumbuhan kaderisasi PKI serta pemikiran komunisme yang selalu menyuarakan masyarakat tanpa kelas dan meminta

kepada Presiden Soekarno untuk membuat angkatan ke-5 yang dipersenjatai dan terdiri dari petani dan buruh, membuat politik Indonesia ketika itu memanas. Pemberontakan G30S/PKI dianggap sebagai kudeta terhadap negara membuat para anggota, pertisipan serta keluarga PKI dianggap penghianat serta diburu dan dibuang, antara lain, ke Pulau Buru.

Beberapa Kajian tentang Komunisme di Indonesia

Sejumlah penelitian tentang komunisme di Indonesia telah dilakukan. Sebagai misal, penelitian berjudul “Memori Kolektif Mengenai PKI dan Komunisme di Media Sosial Eks tapol PKI” menunjukkan bahwa G30S/PKI sudah mendapat makna yang berbeda dari komunisme lainnya, dianggap sebagai individu atau kelompok yang tidak beragama dan kejam (Kurniawan A. D., 2017). Setiap kali berurusan dengan komunisme, masyarakat melakukan penolakan atas dasar makna yang dibangun masyarakat sejak Orba yang masih menempel. Kekejaman PKI yang menjadi fokus utama di media sosial menjadikan keinginan membela

eks tapol serta meluruskan sejarah selalu di cap “PKI”.

Penelitian lain dilakukan oleh (Murthi, 2007) dengan judul “Pembersihan Kelompok Kiri di Surabaya 1965-1978”. Penelitian ini mengkaji tentang tindakan atas citra yang dimiliki oleh tapol di Surabaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat sipil bertugas sebagai pelaku penangkapan dan informan yang dituduh sebagai PKI. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan banyak sekali pihak yang terlibat dan mendapatkan keuntungan material yang bersifat pribadi dari kejadian pembersihan di Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2010). Informan penelitian yaitu mahasiswa yang sedang berkuliah di empat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jumlah informan ada 8

orang, terdiri atas 4 laki-laki dan 4 perempuan dengan rentang usia 20 – 23 tahun. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan dasar pertimbangan: (1) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik masa Orde Baru, masa pasca-reformasi, dan ideologi komunis secara umum, yang diperoleh selama menempuh pendidikan dari SD hingga kuliah serta pergaulan di lingkungan masyarakat, (2) memiliki pemahaman tentang eks-tapol berupa informasi yang diperoleh baik dari lingkungan pribadi maupun pendidikannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Pertanyaan melalui wawancara difokuskan pada pemaknaan informan atas komunisme melalui pandangannya terhadap eks-tapol PKI, pengetahuan umum dan pemahamannya tentang politik masa Orde Baru dan pascareformasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang komponen-komponennya terdiri atas pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Semua proses tersebut

berjalan secara *ongoing* (Huberman & Miles, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Komunisme Bagi Mahasiswa di Purwokerto

Pada dasarnya makna akan selalu berbeda karena pengalaman setiap individu selalu bervariasi. Kondisi lingkungan, latar belakang, dan pengalaman dari setiap individu pun berpengaruh dalam memaknai. Seperti halnya dengan para mahasiswa yang berkuliah di Purwokerto. Dalam memaknai komunisme, setiap mahasiswa bisa berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, memandang komunisme sebagai sebuah ajaran yang tidak memiliki Tuhan, dan pemaknaan kedua adalah sebuah pandangan hidup yang berhubungan dengan ekonomi yang matrealistis. Komunisme lebih sering diidentikkan dengan tidak bertuhannya orang yang menganutnya.

Di Indoneisa tidak ada litelatur yang secara ilmiah dapat menjelaskan bagaimana bisa komunisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan masyarakat yang tidak percaya Tuhan

sedangkan masyarakat Indonesia dikenal beragama dan religius. Oleh sebab itu, perkembangan komunisme di tengah organisasi keagamaan cukup besar ketika itu menjadi hal yang mengherankan. Sebagaimana telah disinggung di muka, komunisme ini malah berkembang dan mendapat dukungan dari anggota Sarekat Islam (SI) yang mengakibatkan terpecahnya organisasi tersebut menjadi 2 (dua) yaitu SI putih yang dipimpin H. Agus Salim dan SI merah dipimpin Semaun.

Ajaran komunisme memiliki citra sebagai musuh dari kaum agamis dimulai ketika pencetus ideologi komunisme, Karl Marx, menulis "Kesengsaraan agamis merupakan ekspresi kesengsaraan riil sekaligus merupakan protes terhadap kesengsaraan yang nyata tersebut. Agama adalah keluhan para makhluk tertindas, jantung hati sebuah dunia tanpa hati, jiwa untuk keadaan tak berjiwa. Agama adalah candu rakyat" sebuah tulisan yang ditujukan untuk kritik terhadap filsafat Friedrich Hegel (Marx, 1843). Akhir kalimat yang menyatakan "Agama adalah candu rakyat" menjadi sebuah pernyataan yang kontroversial di kalangan agamis.

Bagi Marx, agama diciptakan oleh manusia bukan agama yang menciptakan manusia lalu digunakan masyarakat kelas untuk memanipulasi dan menindas kelas di bawahnya (Muttaqin, 2013). Kondisi anti kelas yang diperjuangkan oleh kaum komunis untuk menunjang taraf ekonomi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kepemilikan alat pribadi merupakan salah satu konsep dalam komunisme agar tidak tertindas oleh kaum kapitalis atau pemilik modal dan alat.

Citra komunisme yang mengajarkan kritik terhadap kaum kapitalis dan perlawanan serta tidak terima apa adanya kondisi hidup masyarakat bergeser saat doktrin Orde Baru berkuasa. Pergeseran pandangan tersebut pun bisa dianggap berhasil karena kekuasaan rezim Orde Baru terus berlanjut selama 32 tahun dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemahaman komunisme yang sesungguhnya kritis terhadap kaum kapitalis (dalam hal ini juga negara) diganti dengan menayangkan film-film yang bertema perjuangan dengan menjadikan Partai Komunis Indonesia

sebagai musuh bangsa. Hal ini pun masih bisa dirasakan oleh para mahasiswa ketika bersekolah di daerahnya masing-masing. Penayangan film yang dilakukan setiap tahun ketika bulan September masih mereka rasakan walaupun itu terjadi ketika mereka masih berada di sekolah dasar (SD). Film G30S/PKI sebenarnya sudah tak lagi wajib ditayangkan di televisi dan bioskop nasional sejak tahun 1998. Hal ini dilakukan atas permintaan dari PP AURI kepada Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono (tempo.co, 2012). Hal ini langsung ditanggapi dengan adanya perintah dari Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dengan mempersiapkan film baru berjudul "Bukan Sekedar Kenangan" sebagai pengganti dari film tahunan G30S/PKI tersebut yang memiliki sudut pandang perorangan. Namun pada akhirnya film tersebut tidak jadi dirilis dan ditayangkan oleh pemerintah yang pada akhirnya kegiatan tahunan yang sudah berjalan sejak 1984 tetap berlanjut di sekolah walaupun tidak dijadikan kewajiban.

Respon Mahasiswa Terhadap Eks Tapol dari Partai Komunis Indonesia

Sikap para mahasiswa terhadap eks-tapol dari PKI berbeda. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa yang ada di Purwokerto menunjukkan adanya dua sikap yang menunjukkan respon mereka terhadap komunisme. Pertama, bersikap netral terhadap eks-tapol yang dianggap menganut paham komunis dan merasakan tindak persekusi masyarakat ketika Orde Baru. Sikap yang kedua, menolak secara tegas dengan para eks-tapol yang menyuarkan keadilan. Para mahasiswa yang bersikap netral tidak melihat eks-tapol sebagai orang yang seperti digambarkan sejarah yang telah diketahui oleh mereka melalui proses belajar selama ini. Sikap utama yang paling banyak diungkapkan oleh mahasiswa adalah "acuh tak acuh" atau tidak begitu mempermasalahkan mereka sebagai eks-tapol seperti apa yang dilakukan ketika Orde Baru. Bagi para mahasiswa, para eks-tapol sudah berubah karena telah mendapatkan hukuman yang sesuai dan menjadi pembatasan kepada para eks-tapol

untuk tidak mengganggu ideologi negara Indonesia.

Selain itu, bagi para mahasiswa eks-tapol saat ini sebagian besar hanya keturunannya. Menurut mahasiswa, mereka saat ini tidak ada yang merasakan secara langsung kejadian dan ajaran yang disebarkan oleh PKI saat itu. Ketika kejadian tersebut mahasiswa yakin para keturunannya tidak mengerti apa yang terjadi, para orang tua atau kerabat mereka ditangkap. Penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI yang dilakukan oleh aparaturnegara, dalam hal ini militer, dibantu dan didukung oleh warga sipil, membuat penangkapan ini menjadi masif. Hampir di seluruh Indonesia terjadi penangkapan terutama di daerah yang dipandang menjadi basis utama dari PKI, tidak terkecuali Banyumas. Penangkapan pun berlangsung di beberapa daerah walau tidak terjadi di semua daerah kabupaten Banyumas. Warga sipil yang tergabung dalam penangkapan memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Respon yang diterima mahasiswa didapatkan dari pengalaman pribadi yaitu mendengar informasi eks tapol dari berita dan pendidikan yang didapatkannya. Respon yang diberikan mahasiswa tidak ada yang secara utuh, melainkan hanya sebatas seperti diskusi tentang keadilan yang seharusnya didapatkan eks tapol dan lebih membiarkan mereka karena menganggap kejadian masa lalu tersebut tidak akan terulang sekarang. Kondisi tersebut tampak bertentangan dengan beberapa sila yang ada dalam Pancasila seperti, perbedaan antargolongan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dicita-citakan untuk menciptakan persatuan di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh masyarakat karena kekhawatiran yang secara tidak sadar terbentuk dalam lingkungan masing-masing. Pemaknaan yang berbeda dari setiap informan mengakibatkan respon yang berbeda juga karena bentuk stimulus atau rangsangan dalam memaknai.

KESIMPULAN

Pemaknaan komunisme di Indonesia masih memiliki bias yang sangat jelas antara komunisme dan PKI. Partai yang pernah menjadi salah

satu partai terbesar di Indonesia ini secara hukum menurut TAP MPRS/XXV/1966 menjadi sebuah partai terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut juga berisi tentang larangan kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Ketetapan tersebut membuat masyarakat menjadi berhati-hati dengan PKI ataupun yang berbau komunis. Komunisme sebagai ajaran yang dipandang tidak percaya Tuhan dan sebuah ideologi ekonomi adalah pemaknaan yang paling sering diungkapkan mahasiswa Purwokerto. Indoktrinasi melalui film dan buku-buku pelajaran yang dilakukan Orba masih melekat hingga pascareformasi. Mahasiswa yang belum lahir saat Indonesia dilanda pergolakan pada 1965, sepenuhnya sadar akan stigma negatif yang melekat pada semua hal yang berbau komunis. Isu-isu yang selalu dikumandangkan setiap tahun untuk memperingati pengkhianatan PKI pun salah satu hal yang membuat pemaknaan tidak berubah semenjak Orba.

Respon terhadap komunisme pun cenderung tidak berubah. Masih ada mahasiswa yang memungkinkan melakukan persekusi atau bahkan intimidasi terhadap orang-orang yang menganut ajaran komunis dalam hal ini terhadap para eks-tapol PKI. Mungkin respon negatif tidak seaktif dan berskala besar seperti di era Orba namun hal-hal seperti itu bukan berarti tidak akan terjadi lagi. Setiap tahun, apa lagi saat pemilu, isu seperti kebangkitan PKI muncul kembali dan terjadi di beberapa daerah Indonesia. Pembakaran atribut sampai pemukulan sebagian orang yang membenci PKI sering terjadi. Respon tersebut memang tidak sekeras di zaman Orba tetapi pembedaan dan usaha untuk menjauhi orang-orang eks-tapol dipandang termasuk dalam diskriminasi sosial. Para informan yang hanya memperoleh wawasan tentang komunisme dari pendidikan di sekolah tidak memberikan respon atau pemaknaan baru tentang komunisme tetapi cenderung sama dengan informasi yang dibangun Orba. Komunisme masih selalu tentang PKI yang kejam dan tidak bertuhan. Tanggapan baru informan

yang membatasi komunisme sebagai ideologi ekonomi yang selalu menitikberatkan antara konflik kapitalis dan borjuis soal modal serta hasil yang didapatkan perusahaan, bukan ditempatkan sebagai pandangan hidup atau cara berpikir kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhawono, A. 2017. September. *Sejarawan : Film G30S/PKI Alat Propaganda Orba*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3645573/sejarawan-film-g-30-spki-alat-propaganda-orba>
- Boni. 2018, Oktober 13. *Isu PKI*. Retrieved from suara.com: www.suara.com
- Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewaris Ingatan : Wacana Anti Komunisme dan Politik Rekonsiliasi Pasca- Suharto*. Jakarta: ELSAM.
- Gillin, & G. 1954. *Cultural Sociology : A Revision of An Introduction to Sociology*. New York: The Mac Millan Company.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. 1992. *Analisis data Kualitatif*. Penerjemah: T. Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Kurniawan, A. D. 2017. *Memori kolektif Mengenai PKI dan Komunisme di Media Sosial*. Depok: Fisip Universitas Indonesia.
- Maleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marx, K. 1843. *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right Introduction*. (T. Sparague, Trans.) Paris: in Deutsch-Franzosische Jahrbucher.
- Mead, G. H. 1934. *Mind, Self, And Society*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Misztal, B. 2003. *Theoris of Social Remembering*. Philadelphia: Open University Press.
- Murthi, Y. H. 2007. *Pemberihan Kelompok Kiri di Surabaya 1965-1978*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muttaqin, A. 2013. Karl Marc dan Friederich Nietzsche Tentang Agama. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.7, 1-3.
- Olick, J., & Robbins, J. 1998. "Collective Memory" to the Historical Sociology of Memonic Practices. *Social Memory Studies*, 105-150.
- Rujikartawi, E. 2015. Komunisme : Sejarah Gerakan Sosial dan Ideologi Kekuasaan. *Qathruna*, 80-81.
- Subekti, R. 2015, September. Ayah Jadi Pimpinan PKI Boyolali? Ini Kata Presiden Jokowi. Retrieved from pojoksatu.id: www.pojoksatu.id
- Suseno, F. M. 2001. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia.
- tempo.co. (2012, September 29). *Nasional*. Retrieved from Cerita dibalik Penghentian Pemutaran Film G30S/PKI: <https://nasional.tempo.co/read>

/432758/cerita-di-balik-
penghentian-pemutaran-film-
g30s

PEMBENTUKAN MODAL SOSIAL DAN KEPENTINGAN EKONOMI-POLITIK NEGARA

Budi Rajab
Dosen Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Abstrak

Modal sosial menunjuk pada struktur masyarakat yang relatif ketat dalam mengatur hubungan antarwarga dan memiliki aturan sanksi dan ganjaran yang jelas, sehingga warga masyarakat mempunyai kepastian dalam bertindak. Struktur masyarakat Indonesia tampaknya cukup longgar, kurang memiliki aturan yang relatif pasti. Otoritas pada struktur masyarakat Indonesia lebih didominasi hubungan patronase, senioritas, dan kuasa ekonomi. Otoritas yang demikian tidak dapat memfasilitasi sikap disiplin, rasa tanggung jawab, serta keteraturan. Rasa bersalah dan malu hanya manifes bila diketahui oleh pemegang otoritas (patron). Karena itu, struktur masyarakat yang longgar menunjuk pada lemahnya modal sosial. Institusi negara yang memegang otoritas formal, bukannya mencoba mengubahnya, melainkan memeliharanya struktur yang longgar ini, karena dengan cara demikian aparat negara akan diuntungkan dalam prestise sosial dan posisi ekonomi mereka. Konsekuensinya, karena negara dan masyarakat bersama-sama memelihara kelonggaran struktur ini, ketidaktertiban terus berlangsung. Untuk membangun modal sosial yang kuat, hubungan patronase dan senioritas perlu dikikis dan negara sebagai institusi yang punya otoritas perlu menegakkan aturan. Kelompok-kelompok sipil perannya juga harus lebih meluas, jangan hanya mengawasi kinerja negara, tapi juga mesti mendorong perubahan pada hubungan patronase dan senioritas ini. Kemudian, lembaga-lembaga pendidikan formal perlu mengembangkan proses pembelajaran afektif, tidak melulu menekankan pada proses pembelajaran kognitif.

Kata kunci: Modal Sosial, Jaringan Sosial, Kepentingan Ekonomi-Politik Negara.

ABSTRACT

Social capital refers to a relatively tight community structure in regulating relations between citizens and has clear rules of sanctions and rewards, so that citizens have certainty in acting with one another. The structure of Indonesian society seems to be quite loose, lacking relatively definite rules. Authority in the structure of Indonesian society is more dominated by patronage, seniority, and economic power relations. Such authority cannot facilitate discipline, sense of responsibility, and order. Guilt and shame are only manifests if they are known by the authority (patron). Therefore, a loose structure of society refers to the weakness of social capital. State institutions that hold formal authority, instead of trying to change it, instead maintain this loose structure. Because in this way, the state apparatus will benefit from their social prestige and economic position. Consequently, because the state and society together maintain the relaxation of this structure, disorder continues. To build strong social capital, patronage and majority relations need to be eroded and the state as an institution with authority needs to enforce rules. The role of civil groups must also be more extensive, not

only supervising the performance of the state, but must also encourage changes in this patronage and seniority relationship. Then, formal educational institutions need to develop affective learning processes, not merely emphasizing cognitive learning processes.

Keywords: Social Capital, Social Networks, Role of the State.

PENDAHULUAN

Berbagai kota di Indonesia, selalu dihadapkan pada kemacetan lalu lintas; orang menyeberang sembarangan, motor menyalip, kendaraan berhenti di sembarang tempat, dan kendaraan pribadi yang kerap menyerobot dan parkir semaunya sendiri. Pejalan kaki, pemakai kendaraan, tukang jualan yang memakai roda, pedagang kaki lima, tukang parkir, tidak mau peduli, masing-masing menggunakan jalan publik sesuai keinginan sendiri. Di dalam kendaraan umum antarkota, perasaan was-was dan khawatir sering muncul sebab sopir menjalankan kendaraannya begitu kencang, menyalip kendaraan lain, tidak peduli jalan lurus atau berkelok-kelok.

Keadaan lalu lintas yang semrawut dan “kacau”, berisiko terjadinya kecelakaan. Kecelakaan

lalu lintas yang memakan korban, menjadi hal yang biasa terjadi sehari-hari. Dapat dikatakan, kecelakaan itu lazimnya karena *human error* karena para pengguna jalan itu sendiri yang memberi peluang untuk terjadinya kecelakaan. Kemacetan lalu lintas juga sering terjadi karena perilaku mementingkan sendiri dari para pengguna jalan, bukan melulu karena jalan yang sempit atau terlalu banyak kendaraan. Yang ironis, sumber kemacetan itu, selain di jalan-jalan raya umum, juga jalan-jalan di depan gedung-gedung pendidikan. Padahal, lembaga-lembaga pendidikan itu selain sebagai tempat untuk mencari pengetahuan juga merupakan wahana mengajarkan kedisiplinan. Depan sekolah atau kampus hampir identik dengan kemacetan yang parah. Artinya, mereka yang dikategorikan sebagai kaum terpelajar ternyata sama saja dengan yang lain, tidak mau

peduli dan justru terlibat langsung dalam ketidakteraturan lalu lintas itu.

Ketidaktertiban itu tidak hanya tampak di jalan raya. Di instansi-instansi pemerintah yang mestinya sebagai institusi publik pengelola hidup bermasyarakat dan bernegara agar tidak “kacau”, pun menunjukkan ketidakteraturan. Banyak pegawai yang pada jam kerja hanya mengobrol, membaca koran, berjalan-jalan dari satu ruangan ke ruangan lain untuk mencari teman ngobrol, bahkan ada juga yang melamun. Di luar jam istirahat, banyak aparatur dengan seragam khasnya berjalan-jalan ke tempat-tempat perbelanjaan atau duduk mengobrol di kafe atau kantin, sementara warga masyarakat yang membutuhkan penyelesaian perizinan dibiarkan menunggu berlama-lama.

Model birokrasi Weberian yang objektif, netral, dan rasional yang menjadi tuntutan imperatif suatu organisasi, masih jauh panggang dari api. Para pegawai tampak lebih mementingkan diri sendiri, sementara warga masyarakat diperlakukan

sebagai objek. Mereka tidak peduli dengan keluhan dan aspirasi yang muncul, justru cenderung melakukan diskriminasi dalam pelayanan; orang-orang yang memiliki uang, kekuasaan, keluarga atau kroninya akan mendapatkan prioritas. Banyak aturan yang “dipelintir” dan dibuat berbelit-belit. Dalilnya, “kalau urusan bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?”. Kecepatan pelayanan bukan sasaran utama, yang menjadi target adalah besarnya barang atau uang yang bisa didapat dari pelayanan. Berbagai potensi perubahan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat yang mestinya difasilitasi, menjadi terhambat. Birokrasi pemerintah menjadi kontraproduktif, menggerogoti uang negara, dan menyedot sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Perilaku birokrasi diskriminatif, mendahulukan kepentingan orang-orang yang memiliki akses dan kontrol pada sumber daya sosial-ekonomi dan kekuasaan politik, juga mendorong pada kian melebarnya

ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Meskipun reformasi sudah berlangsung lebih dari dua dekade, cara kerja birokrasi pemerintahan tidak banyak menampakkan perubahan. Pernyataan bahwa birokrasi telah mengembangkan paradigma baru, yakni cara kerja yang mementingkan mutu pelayanan dan transparansi, belum banyak dapat ditemukan dalam aktivitas kerja aparatur sehari-hari. Penyelenggaraan pemerintahan masih menunjukkan manajemen organisasi yang kurang efisien, tidak efektif, dan jauh dari fleksibilitas. Kondisi birokrasi pemerintah Indonesia masih berkepatutan di seputar struktur organisasi yang gemuk dan kewenangan antar lembaga yang tumpang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja yang belum tertib, para pegawai belum profesional dengan tingkat kedisiplinan yang rendah, dan tidak netral, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme cukup mengakar, serta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program belum

terarah. Beragam kelemahan itu berujung pada pelayanan publik yang sangat tidak memadai. Dapat dikatakan tidak ada yang murah dalam birokrasi di Indonesia. Dana pembangunan menjadi sumber korupsi. Penggelembungan pengadaan barang atau biaya proyek (*mark up*) merupakan praktik wajar dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.

Alih-alih melakukan efisiensi, merampingkan formasi pegawai negeri, pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2004 melakukan perekrutan lebih dari dua ratus ribu pegawai negeri, padahal di masa pemerintahan Megawati teridentifikasi adanya kelebihan pegawai yang mendekati seratus ribuan orang (*Kompas*, 4 Desember 2004). Sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, banyak kantor dinas yang mengurangi jumlah pegawai. Riggs (1985) yang banyak meneliti mengenai birokrasi pemerintahan di Asia Tenggara, melihat bahwa penerimaan sejumlah pegawai itu merupakan kebijakan

populis pemerintah dalam rangka membuka kesempatan kerja, yang sebenarnya seringkali tidak ada kaitan dengan kebutuhan pegawai, sehingga banyak kantor mengalami kelebihan tenaga kerja. Sementara berbagai tugas tidak dirumuskan dengan jelas dan koordinasi dilakukan tanpa menimbang efisiensi. Karir banyak tergantung pada senioritas dan bukan berdasarkan kemampuan atau jasa. Tidak adanya efisiensi itu diperburuk pula oleh hukum dan aturan kepegawaian yang kaku dan lebih ditujukan bagi melindungi pegawai daripada meningkatkan efisiensi administrasi itu sendiri.

Itulah sedikit kasus yang menunjukkan ketidaktertiban, ketidaksiplinan, dan tidak adanya tanggung jawab dari warga masyarakat sebagai warga negara (*citizen*) dan instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Ketidakteraturan itu dapat ditemukan dalam berbagai institusi kemasyarakatan dan kenegaraan, lembaga-lembaga politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keagamaan. Dalam

pandangan van Dijk (2003), ketidakteraturan yang terjadi di kantor-kantor pelayanan umum dan di jalanan mengakibatkan hilangnya banyak waktu, bahkan banyak nyawa. Di kantor-kantor pemerintah waktu berharga dihabiskan dengan cara yang tidak produktif dan para pegawai itu menganggap keuntungan pribadi lebih penting daripada melakukan pekerjaan yang baik dan efisien. Warga masyarakat lebih memilih mengabaikan peraturan dan tidak memiliki nurani tentang melanggar peraturan tersebut. Para pemimpin formal dan informal, yang cukup penting posisinya dalam masyarakat paternalistik Indonesia, juga tidak memberikan contoh yang benar.

Ketidaktertiban, tak adanya penegakan hukum, dan penyelesaian masalah dengan kekerasan, meminjam sindiran Hefner (2000) adalah cermin keseharian dari negara dan bangsa Indonesia yang tak beradab (*uncivil*). Apakah Indonesia memang bangsa yang tidak memiliki keadaban (*civility*), egoistis, sering melakukan paksaan fisik agar orang

lain patuh, enggan menghargai orang lain sebagai sesama, dan tidak mau dan mampu berkoordinasi? Apakah dengan tidak adanya konsensus dan praktik kerjasama dalam menegakkan ketertiban dan mendinamisasi aktivitas ekonomi, berarti negara-bangsa Indonesia sangat kurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki modal sosial (*social capital*)? Pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan dan terkoordinasikan secara horisontal dan vertikal meski seringkali tidak formal, yang dapat mendorong adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan arti dan fungsi modal sosial dalam lingkup yang luas. Digambarkan pula secara garis besar

peran negara kolonial, pemerintah Hindia-Belanda, dan pascakolonial terutama rezim Orde Baru yang dalam kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya cenderung melumpuhkan modal sosial masyarakat. Analisis tulisan ini adalah bagaimana negara bertanggung jawab melalui kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya, secara langsung maupun tidak, dalam melemahkan modal sosial yang berarti juga turut melanggengkan ketidakteraturan kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaga negara itu sendiri. Tulisan ini lebih melihat lemahnya modal sosial masyarakat Indonesia bukan melulu berasal dari faktor internal yang melekat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga secara historis negara melalui aturan yang dihasilkan, telah membatasi ruang gerak masyarakat. Akibatnya, pilihan-pilihan masyarakat menjadi lebih sempit bagi pengembangan ragam aktivitas. Dalam konteks menghadapi intervensi negara itulah, masyarakat memformulasikan dan mengartikulasikan sistem sosial

budaya yang berciri defensif dan formalistik yang berlebihan. Jika dilihat dari perspektif modal sosial, hal ini sulit untuk memunculkan ketertiban dan kesejahteraan yang relatif merata. Sebaliknya, yang tumbuh adalah ketimpangan sosial-ekonomi sekaligus bercirikan ketidaktertiban pada hampir semua lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bukan hasil penelitian lapangan (*fieldwork*) melainkan merupakan kajian literatur. Langkah-langkah kajiannya adalah sebagai berikut. Pertama, memilih dan menentukan isu yang akan dikaji. Masalah modal sosial di Indonesia, khususnya di Jawa merupakan persoalan yang masih relevan dan terus menjadi wacana, sehingga layak dipilih sebagai bahan kajian. Kedua, mengumpulkan dan membaca konsep serta teori tentang modal sosial dari kajian ilmu-ilmu sosial. Ketiga, mengumpulkan dan membaca untuk melihat dan mengidentifikasi operasionalisasi modal sosial dalam

konteks sejarah dan politik sejak kolonialisme Belanda hingga masa Orde Baru sampai era sekarang. Keempat, melihat upaya-upaya pemerintahan Indonesia untuk membangun dan mengembangkan modal sosial agar sejalan dengan proses globalisasi dunia. Kelima, menarik kesimpulan atau refleksi atas eksistensi modal sosial masa pemerintahan era reformasi sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Sosial

Konsepsi modal sosial yang lebih rinci dapat disimak pada kutipan berikut ini:

“The scope of the concept of social capital varies considerably in the literature. The most narrow concept of social capital is associated with Putnam who views it as set of horizontal associations between people: social capital consists of social networks (network of civic engagement) and associated norms that have effect on the productivity of the community. Two empirical presumptions underlie concept: first, that networks and norms are empirically associated; and second, that they have

important economic consequences. While originally this concept of social capital was limited to associations having positive effects on development, recently it has been relaxed to include groups that have undesirable outcomes as well, such as associations with rent-seeking behavior. The key feature of social capital in this definition is that it facilitates coordination and cooperation for mutual benefit of the members of the association.

A second and broader concept of social capital was put forth by Coleman who defines social capital as a variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors – whether personal or corporate actors – within the structure. This definition expands the concept to include vertical as well as horizontal associations, and also the behavior within and among other entities such firms. Vertical associations are characterized by hierarchical relationships and an unequal power distribution among members. This wider range of associations covers a wider range of objectives – positive as well as negative. Coleman is explicit about this: a given form of social capital that is valuable in facilitating certain actions

may be useless or even harmful for others. In fact, this view of social capital captures social structure at large, as well as the ensemble of norms governing interpersonal behavior.

A third and most encompassing view of social capital includes the social and political environment that shapes social structure and enables norms develop. In addition to the largely informal, and often local, horizontal and hierarchical relationship of first two concepts, this view also includes the most formalized institutional relationships and structures, such as government, the political regime, the rule of law, the court system, and civil and political liberties. This focus on institution draws on North (1990) and Olson (1982), who have argued that such institutions have an important on the rate and pattern of economic development.” (Pantoja, 1998).

Merujuk pada rumusan yang diajukan Putnam, modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial horisontal, jaringan-jaringan, dan norma-norma yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Di dalamnya juga termuat adanya

kepercayaan sosial (*social trust*), relasi timbal-balik (asas resiprositas), dan jaringan keterikatan sipil yang menyumbang kepada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran itu (Mackie, 1999; Seagrave, 1996). Modal sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi horisontal berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi pada komunitas Cina perantauan (*overseas Chinese*) melalui apa yang disebut dengan *network capitalism* umpamanya (Seagrave, 1996). Mackie (1999) memberi contoh mengenai organisasi sosial informal Cina perantauan di Asia Tenggara yang mendorong pada kemampuan kompetitif mereka dalam kegiatan bisnis. Kunggulan kompetitif itu bukan hanya karena memiliki bakat kewiraswastaan, tapi bersumber dari perkumpulan dan lembaga dagangnya. Pendirian perkumpulan satu dialek bahasa dan jaringan keluarganya, *siang hwee* (kamar dagang), memungkinkan mereka saling bantu dan mempercayai satu sama lain dalam transaksi ekonomi modern tanpa

harus melalui lembaga ekonomi formal yang birokratis, sehingga kaum kapitalis lokal tidak mampu menandinginya.

Putnam juga mengajukan contoh mengenai kuatnya modal sosial masyarakat Italia Utara yang sejak abad pertengahan memiliki jaringan horisontal di antara kelompok-kelompok sipilnya, seperti budaya politik yang menekankan kemerdekaan warga negara, kepercayaan pada seseorang, toleransi, dan penghormatan pada hukum, sehingga memungkinkan berkembangnya demokrasi yang partisipatif. Sebaliknya, jaringan organisasi sosial di Italia Selatan sangat hirarkhis, dengan dominasi dan hegemoni kelompok elit. Komunitas Utara Italia dapat mengembangkan lembaga-lembaga yang relatif memiliki otonomi secara budaya politik dengan nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat pluralis. Sementara di Italia Selatan budaya politiknya berpola atasan-bawahan (*clientelistic*) dan otoriter, yang dilambangkan dengan penguasaan

mafia yang menyolok. Masyarakat Italia Selatan mengembangkan hubungan sosial yang vertikal, memiliki ketergantungan yang luas pada keluarga, dan kepercayaan sosial yang rendah, karena lembaga-lembaga sosial dan politik yang impersonal tidak dapat diandalkan untuk terciptanya rasa aman dan perlindungan. Juga ada kecurigaan meluas atas negara dan sebagian besar bentuk otoritas lain yang lebih tinggi. Di sini jaringan sosial vertikal mencakup hubungan asimetri, eksploitasi, dan ketergantungan, yang mendorong pada munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan negara dan masyarakat (Heffner, 2000; Mackie: 1999; Weidenbaum & Hughes, 1996; Hamilton, 1996; Twang Peck Yang, 2004); Ropke, 1988).

Sementara itu, Coleman melihat modal sosial dari sisi fungsinya, yakni *like other form of capital, social capital is productive, making possible the achievement of certain ends that in its absence would not possible ... social*

capital inheres in the structure of relation between actors and among actors. Dia menunjukkan bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup (*closure of social network*) cenderung lebih efektif daripada yang terbuka (Ahmadi, 2003). Jaringan komunitas yang dikembangkan kelompok-kelompok perantau di berbagai daerah lazimnya dibuat eksklusif, yang keanggotaannya sering didasarkan pada relasi-relasi kekerabatan, kesamaan daerah dan bahasa, serta kesamaan etnis dan agama. Ini dikenal sebagai hubungan primordial, dan mungkin karena ketertutupan itu mereka dapat *survive*, bahkan menguasai jaringan perdagangan komoditas dan ketrampilan tertentu di daerah perantauan.

Kiranya cukup penting untuk mengetengahkan konsep modal sosial dari Fukuyama (2002) yang tulisan-tulisannya dianggap kontroversial namun populer. Ia menekankan bahwa modal sosial memiliki kontribusi cukup besar atas terbentuk

dan berkembangnya ketertiban dan adanya kesalingpercayaan di antara warga masyarakat, dan dorongannya pada perkembangan ekonomi. Fukuyama menyebutkan, seperti *physical capital* (tanah, bangunan, mesin), dan *human capital* (keterampilan dan pengetahuan), modal sosial menghasilkan kesejahteraan sehingga merupakan bagian dari nilai ekonomi. Dalam konsepsi Fukuyama, modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika anggota kelompok itu mengharapkan anggota-anggotanya berperilaku jujur dan terpercaya, mereka akan saling percaya. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam konteks ini, modal sosial bukan sebagai hukum atau aturan formal tetapi lebih sebagai norma informal yang mempromosikan perilaku konsesual dan kerja sama yang juga terkandung

adanya kejujuran, pemenuhan tugas atau tanggung jawab, dan kesediaan untuk saling menolong.

Keluarga dilihat Fukuyama sebagai sumber penting bagi modal sosial. Contohnya, betapa pun rendah opini orang tua Amerika atas anak-anak mereka yang berusia belasan tahun, jauh lebih mungkin di antara mereka saling mempercayai dan bekerja sama ketimbang dengan orang asing. Inilah alasan mengapa sebenarnya seluruh kegiatan bisnis dimulai dari keluarga. Di Cina dan Amerika Latin, keluarga sangat kuat dan kohesif, tetapi ia sangat sulit untuk mempercayai orang asing, dan tingkat kejujuran dan kerja sama dalam kehidupan publik jauh lebih rendah. Akibatnya adalah nepotisme dan korupsi publik yang menyeluruh. Yang membuat reformasi Protestan penting di mata Weber bukanlah karena ia mendorong kejujuran, kesediaan untuk saling menolong, dan kepedulian di antara para wiraswastawan individual, tetapi kebajikan-kebajikan itu dipraktikkan secara luas di luar keluarga. Dengan

mengutip Coleman, Fukuyama menyatakan modal sosial adalah seperangkat sumber daya yang melekat dalam (*inherent*) hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial anak. Kerja sama itu dimungkinkan karena adanya fakta biologis yang kodrati dan itu tidak hanya memperlancar dan memudahkan jenis-jenis aktivitas sosial lainnya seperti menjalankan bisnis. Dalam dunia sekarang pun banyak perusahaan besar, impersonal, birokratis, dan juga bisnis-bisnis kecil, sebagian besar dijalankan oleh keluarga (Fukuyama, 2002). Tapi ketergantungan berlebihan atas ikatan kekerabatan ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif atas masyarakat luas. Banyak kebudayaan, mulai dari Cina, Eropa Selatan hingga Amerika Latin mempromosikan familiisme, yakni peningkatan ikatan kekerabatan di atas kewajiban sosial, yang mengakibatkan kewajiban moral atas otoritas publik dalam segala

bentuknya menjadi lemah. Dalam kasus budaya familiisme Cina yang didorong etika Konfusianisme tingkat modal sosial memang tinggi dalam keluarga, tetapi di luar sistem kekerabatan modal sosialnya relatif rendah (Fukuyama, 2002).

Dengan menyitir tulisan Dasgupta, Fukuyama menyatakan, modal sosial bukanlah kekayaan publik, tetapi disebarkan oleh berbagai eksternalitas. Dalam hal ini individu-individu mungkin memproduksi modal sosial karena alasan-alasan pribadi mereka, tetapi begitu diproduksi, ia memiliki efek-efek menguntungkan yang menyebar pada masyarakat luas. Bukan hanya modal sosial yang memproduksi eksternalitas, ia sendiri acapkali diproduksi sebagai *by-product* atau eksternalitas dari aktivitas lain. Kaum puritan Protestan yang diteliti Weber, tidak mencari kekayaan dengan akumulasi modal; mereka berusaha menunjukkan status sebagai orang pilihan dalam pandangan Tuhan. Namun, konsekuensi tak sengaja dari kesederhanaan, swadisiplin, dan

hasrat untuk membuktikan pilihan itu, mereka menciptakan usaha-usaha bisnis yang pada akhirnya menjadi sumber dari kekayaan yang luar biasa (Fukuyama, 2002).

Jadi menurut Fukuyama (2002), bila fakta modal sosial diterima bukan sebagai kekayaan publik tapi lebih sebagai milik pribadi yang disebarkan berbagai eksternalitas, akan terlihat sebuah ekonomi pasar modern yang memunculkan modal sosial sepanjang masa. Dalam kasus firma perseorangan, modal sosial dibangun melalui investasi langsung dalam pendidikan dan latihan dalam berbagai keterampilan kooperatif. Banyak literatur bisnis tentang penciptaan budaya korporat, yang tidak lain adalah upaya untuk menyosialisasikan para pekerja dalam sebuah firma ke dalam serangkaian norma yang akan meningkatkan kemauan mereka untuk bekerja sama dan membina rasa identitas kelompok. Perusahaan Jepang mengirimkan eksekutifnya pada pelatihan komunal yang keras untuk menguji daya tahan dan membangun

ikatan ketergantungan timbal-balik. Banyak perusahaan yang telah bergerak menuju bentuk-bentuk organisasi yang flat, tim, dan struktur manajemen serupa telah menemukan bahwa mereka harus banyak berinvestasi dalam mengajar para pekerja kerah biru (*blue collar*) untuk menguji apa yang pada akhirnya menjadi keterampilan manajerial kerah putih (*white collar*).

Tetapi Fukuyama mengakui, ada modal sosial yang diproduksi dan disosialisasikan agen dan institusi publik. Salah satu sumber terpenting dari modal sosial dalam masyarakat kontemporer adalah sistem pendidikan, yang di sebagian besar negara diberikan oleh negara sebagai kekayaan publik. Sekolah biasanya tidak hanya mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, namun juga menyosialisasikan para pelajar ke dalam kebiasaan-kebiasaan budaya tertentu yang dirancang untuk membuat mereka menjadi warga negara yang baik. Namun demikian, banyak juga pemerintah yang cakap dalam menghancurkan modal sosial.

Umpamanya, bagaimana negara telah gagal memberikan hak-hak keamanan dan kepemilikan yang stabil kepada publik, sehingga mengakibatkan warga negara tidak percaya bukan hanya pada pemerintah tapi juga saling tidak percaya di antara mereka sendiri dan menjadi sangat sulit untuk diasosiasikan. Pertumbuhan negara-negara kesejahteraan modern (*welfare states*) di Eropa Barat, sentralisasi fungsi-fungsinya, dan turut campurnya pada hampir seluruh perjalanan kehidupan warga negaranya cenderung melemahkan sosiabilitas spontan. Di Swedia dan Prancis misalnya, ada asosiasional privat yang penting, tapi hampir semuanya tergantung pada subsidi dan regulasi pemerintah, dan ketika intervensi negara berkurang atau tidak ada, banyak organisasi sukarela itu yang ambruk (Fukuyama, 2002).

Sementara batasan Bourdieu mengenai modal sosial juga hampir sama dengan Coleman dan Putnam, yang menekankan pada adanya jaringan sosial dan kepercayaan (*trust*) di antara anggota masyarakat

(Bourdieu & Waqcuant. 1992). Bagi Bourdieu, modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok, karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Berbeda dengan Coleman dan Putnam, Bourdieu mengaitkan modal sosial dengan kelas sosial dan tingkat pendidikan. Menurut Bourdieu, modal sosial ini berkembang dan menguat pada kelas-kelas sosial ekonomi menengah dan atas serta mereka yang berpendidikan mulai tingkat menengah sampai yang tinggi (Bourdieu, 1986; Bourdieu, 2008).

Menyalahkan Budaya Masyarakat

Secara implisit konsep modal sosial tersebut diletakkan secara preskriptif. Interpretasinya adalah bahwa masyarakat yang tidak memiliki atau lemah modal sosialnya tidak akan bisa tertib, disiplin, bertanggung jawab, demokratis, dan kondisi ekonominya miskin. Masyarakat yang tidak mempunyai

jaringan horisontal yang dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi tidak akan mungkin mendapatkan keuntungan yang sama di antara para warganya. Yang akan muncul adalah ketimpangan sosial dan ekonomi dan ini akan sangat menyulitkan untuk dapat menjadi masyarakat yang kompetitif. Kepemilikan modal sosial ini dianggap sebagai suatu keharusan, sesuatu yang imperatif, harus dipunyai oleh masyarakat yang ingin demokratis dan ekonominya berkembang.

Landasan pemikiran konsep model sosial ini mirip dengan tesis modernisasi yang *trendy* di seputar tahun 1970-an, yang mengasumsikan bahwa keberhasilan, kegagalan, atau tersendat-sendatnya pembangunan di negara-negara terbelakang (*underdevelopment countries*) di Asia, Afrika, dan Amerika Latin disebabkan kebudayaan penduduk negara-negara bersangkutan tidak kondusif untuk munculnya sikap-sikap yang inovatif, kreatif, dan mengejar prestasi. Nilai dan orientasi budaya masyarakat tersebut tidak mendorong

berkembangnya etos kewiraswastaan, kepeloporan, kemauan untuk mengambil risiko, dan menolak sesuatu yang baru yang datang dari luar.

Konsep *need for achievement* (kebutuhan berprestasi) yang diajukan McClelland (1961) adalah salah satu contohnya. Digambarkan McClelland, masyarakat Barat rata-rata memiliki *need for achievement* yang tinggi, yakni keinginan kuat untuk mencapai prestasi gemilang yang dikerjakannya melalui penampilan kerja yang baik, dengan berpikir dan berusaha menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki mutu kerja. Sebaliknya, ciri-ciri perilaku seperti itu tidak banyak ditemukan pada penduduk di negara-negara terbelakang, dan karenanya mereka tetap miskin. Lerner (1958) mengajukan konsep *empathy*, yakni kemampuan untuk membayangkan menjadi orang lain yang memiliki keahlian dan keterampilan serta menjadi orang yang selalu bergerak mobil. Menurut Lerner, kemampuan *emphaty* pada penduduk di negara-

negara terbelakang cukup rendah, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bertindak kreatif dan mengambil risiko. Baik Lerner maupun McClelland berpendapat, penduduk di negara-negara terbelakang perlu disuntik virus *need for achievement* dan *emphaty*, agar menjadi manusia-manusia yang aktif dan dinamis, berdaya cipta, tidak takut risiko, guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan dapat berdiri sejajar dengan masyarakat Barat. Huntington (2003) juga mengajukan tesis mengenai kelemahan dari lembaga-lembaga politik yang ada di negara-negara terbelakang, yang lebih bercorak patrimonial, yang di dalamnya melekat pemakaian kekerasan dalam pengambilan keputusan. Sebab itu, negara-negara tersebut selalu dihadapkan pada ketidakstabilan, pergantian pimpinan cenderung menimbulkan konflik yang keras dan seringnya terjadi perebutan kekuasaan. Lembaga politik yang demikian tidak akan mampu memunculkan demokratisasi dan juga

tidak dapat melakukan pembangunan ekonomi yang terarah. Lembaga-lembaga politik model Barat yang demokratis dengan partisipasi luas dari warga negara mesti menjadi contoh bagi negara-negara terbelakang itu. Demikian solusi yang diajukannya.

Di awal tahun 1970-an sampai pertengahan tahun 1980-an pendekatan modernisasi merupakan *mainstream* dalam strategi dan program pembangunan nasional di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Pendekatan modernisasi ini melakukan reduksi yang berlebihan. Faktor internal diletakkan sebagai satu-satunya penyebab bagi muncul atau tak terselesaikannya masalah. Mengapa negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin miskin? Karena nilai-nilai budaya penduduknya tidak memberi peluang bagi munculnya perilaku-perilaku inovatif dan produktif. Ia adalah masalah dan merupakan kendala bagi pembangunan ekonomi dan politik nasional modern. Dengan kata lain,

pendekatan modernisasi ini “menyalahkan” langsung pada kebudayaan negara-negara terbelakang dan membenarkan kebudayaan Barat, suatu tesis yang mengandung ideologi dikotomisasi, bahwa kebudayaan Barat lebih unggul ketimbang kebudayaan Timur.

Dengan penekanan pada faktor internal itu tampak ada kesejajaran antara konsep modal sosial dengan pendekatan modernisasi. Diasumsikan juga bahwa masyarakat yang tidak memiliki atau lemah modal sosialnya akan pasif, tidak stabil, miskin, dan tidak teratur. Dilihat dari kemunculan, pertumbuhan, dan perkembangannya, modal sosial ini dianggap bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, tanpa menengok kemungkinan formasinya yang bersumber dari pengaruh luar. Itulah kemiripannya. Sementara yang membedakannya, bila pendekatan modernisasi berideologi etnosentris, mengunggulkan peradaban Barat dan harus menjadi acuan serta tujuan dari perkembangan negara-negara non-Barat, konsep modal sosial mengakui,

organisasi-organisasi informal, nilai-nilai budaya, dan keyakinan agama masyarakat non-Barat dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi ketertiban dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya, konsep modal sosial juga melihat bahwa tidak semua masyarakat Barat mampu mempertahankan modal sosial. Fukuyama (2002) menyatakan, modal sosial yang tadinya cukup kuat pada masyarakat Barat lambat-laun memudar, karena masyarakat kapitalis modern telah banyak mengonsumsinya daripada menghasilkan. Kepercayaan yang merosot atas berbagai institusi, radius kepercayaan yang lebih kecil, kejahatan yang meningkat, dan ikatan kekerabatan yang melemah di Amerika Serikat dan Eropa, langsung mengikis modal sosial tanpa dapat membangunnya kembali. Meskipun demikian, tampaknya untuk sementara ini masyarakat Barat masih memiliki kemampuan menjaga ketertiban hidup bermasyarakat, demokratisasi, dan stabilitas perekonomiannya berlandaskan dan

mengacu pada organisasi, asosiasi, dan hukum formal.

Harus diakui, masyarakat dan lembaga-lembaga di Indonesia masih jauh dari kedisiplinan dan keteraturan. Tapi apakah ketidaktertiban itu memang sesuatu yang melekat atau bahkan *given* pada struktur sosial dan kebudayaan? Apakah memang struktur sosial masyarakat Indonesia begitu longgar (*loose structure*), terlalu banyak memberi kemudahan kepada individu untuk mengubah aturan sesuai dengan keperluannya dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga mendorong munculnya sikap-sikap seenaknya sendiri, egoistis, kerap tidak menepati janji, dan tidak disiplin?

Pilihan yang Terbatas

Melihat perjalanan historis masyarakat, *loose structure* ini ternyata muncul sebagai respons atas tekanan-tekanan ekonomi dan politik kolonialisme. Priyayi Jawa umpamanya, pada periode abad ke 15 sampai menjelang akhir abad ke 17

terlibat dalam perdagangan ekspor-impor ragam komoditas pertanian, tambang, dan produk-produk manufaktur antar-pulau di wilayah Nusantara ini. Mereka berlayar dengan kapal-kapal besar dan melakukan transaksi ekonomi dengan pedagang-pedagang lain, baik dari Jawa sendiri, luar Jawa, dan dengan pedagang-pedagang luar negeri, termasuk dengan para pedagang Barat. Para priyayi pedagang itu memiliki dorongan tinggi untuk berprestasi menjadi pedagang-pedagang besar, memiliki sikap mobil, rasional dan kalkulatif, mau menempuh risiko, dan memiliki jaringan horisontal untuk menguasai lalu-lintas perdagangan. Namun ketika kolonialisme Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di bumi Jawa mulai akhir abad ke 17 dan kemudian memonopoli perdagangan di kepulauan Nusantara, aktivitas priyayi dalam perdagangan itu surut (Meilink-Roelofs, 1962; van Leur, 1960; Reid, 1992; Reid, 1999; Ropke, 1988).

Di bawah pemerintahan jajahan, kaum priyayi tidak dapat lagi berwiraswasta, karena jaringan perdagangan besar dikuasai langsung pihak kolonial sementara pada tingkat menengahnya diserahkan dan dikuasai komunitas-komunitas Cina dan Arab. Keputusan politik yang relatif otonom juga tidak dapat diimplementasikan karena harus melalui aturan birokratis pemerintah colonial. Mereka dikontrol dengan ketat dalam menjalankan otoritas pemerintahannya. Mereka hanya jadi orang “gajian”, meskipun masih memperoleh pendapatan tambahan dari lahan-lahan pertanian yang sebelumnya mereka kuasai. Dapat dikatakan, kaum priyayi itu hanya menjalani peran sebagai “perpanjangan tangan” kaum kolonial Belanda dalam mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi dan tenaga kerja penduduk Jawa (Riclefs, 1991; Sutherland, 1979). Dalam konteks merosotnya posisi ekonomi dan politik inilah, kaum priyayi kemudian lebih banyak mengembangkan budaya simbolik

dan ritualistik serta perilaku-perilaku formalistik yang secara ekonomi memerlukan ongkos besar. Untuk membiayai gaya hidup yang konsumeristik itu mereka melakukan KKN dan menguras sumber daya warga masyarakat dengan memanfaatkan jabatan yang dipegangnya. Priyayi Jepang, kaum *samurai*, juga mengalami kemerosotan posisi politik mereka saat berlangsung restorasi Meiji di awal tahun 1860-an. Namun kemudian, negara memfasilitasi sebagian dari mereka untuk terjun ke sektor industri dan bisnis. Ternyata semangat dan praktik kekesatriaian (*bushido*), yang sangat menekankan pada kesetiaan, tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin tinggi dalam mengabdikan kepada patron (majikan) dan kerajaan, ditransformasikan ke dalam organisasi dan manajemen bisnis. Perusahaan-perusahaan besar Jepang yang hingga kini beberapa di antaranya masih beroperasi, pada awalnya dikelola kaum *samurai* yang dalam mengelola usaha-usaha bisnis tersebut menerapkan etos *samurai*

yang berdisiplin tinggi dan selalu berkeinginan untuk berada di depan (Pyle, 1988; Shichihei, 1985).

Mungkin budaya dan perilaku seperti itu yang dapat ditumbuhkembangkan kaum priyayi Jawa, karena pilihan-pilihan lain yang strategis, sektor ekonomi dan politik, tidak tersedia lagi peluangnya, telah tertutup, dan pihak kolonial telah membatasinya. Bagi pihak colonial, munculnya budaya simbolik dan perilaku formalistik itu menguntungkan, karena berarti kaum priyayi bukan lagi kelompok yang akan mengganggu kekuasaannya. Dalam batas-batas tertentu, budaya, perilaku, dan gaya hidup priyayi birokrat tersebut terus berlangsung hingga kini dalam birokrasi pemerintah kita. Sepertinya, hal itu tidak mengalami transformasi yang mendasar, bahkan tingkat konsumeristiknya kian menjadi-jadi, dan ini dimungkinkan karena negara pascakolonial Indonesia, terutama di masa rezim Orde Baru di bawah pimpinan Suharto, ikut melanggengkannya. Sebelum

membahas peran negara Orde Baru dalam melanggengkan budaya priyayi birokrat yang sarat dengan praktik KKN, dapat diambil lagi satu contoh historis mengenai bagaimana modal sosial tidak memiliki peluang untuk terbentuk dan berkembang pada salah satu komponen bangsa ini. Kondisi ini pun kemudian turut dimampatkan oleh kebijaksanaan dan praktik politik negara Orde Baru.

Ada suatu adagium yang diajukan Boeke tujuh puluh tahun lalu, dan pada beberapa kalangan masyarakat kota ungkapan ini hingga kini masih hidup, yakni bahwa petani itu malas, karena itu mereka miskin. Bagi Boeke (1982), kemalasan petani sudah melekat pada kebudayaannya dan sulit atau malah tidak dapat diubah. Kemiskinan petani dianggap sebagai kesalahan yang dibuat sendiri, karena mereka tidak mau bekerja keras. Tetapi Geertz (1976) membalikkan logika Boeke itu, bahwa petani malas karena ia miskin. Geertz melihat, sistem tanam paksa (*culturstelsel*) yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke 19

adalah faktor penting dalam proses pemiskinan petani Jawa. Pada periode itu petani diwajibkan menanam komoditas tertentu terutama tebu, pada sebagian tanah pertanian mereka dan mesti mengelolanya sendiri serta hasil panennya harus dijual kepada pabrik-pabrik tebu milik pemerintah dengan harga yang ditentukan. Sementara itu, petani pun tetap harus bekerja pada sebagian tanahnya yang ditanami padi dan palawija untuk keperluan pangan rumah tangganya.

Kewajiban tanam paksa tersebut bagaimanapun membebani petani. Yang kemudian dilakukan petani untuk mengurangi beban itu adalah dengan cara “membagi-bagikan” tanah yang dikuasainya kepada petani lain dan dengan mereproduksi tenaga kerja yang berasal dari keluarganya, seperti dengan cara menambah jumlah anak. Strategi yang dimunculkan petani itu adalah untuk mengurangi dan menyebarkan beban tanam paksa sambil mereka juga tetap dapat memenuhi keperluan pangan rumah tangganya. Akibat dari respons

yang demikian itu, rata-rata pemilikan dan penguasaan tanah petani Jawa menjadi kecil-kecil dan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tetapi, menurut Geertz, di bawah tekanan penduduk yang meningkat dan sumber daya yang terbatas, masyarakat desa Jawa tidak terbelah menjadi dua, tidak terbagi atas golongan mempunyai dan tidak mempunyai, melainkan dengan istilah yang biasa dipakai dalam kehidupan petani Jawa sebagai golongan cukup dan kekurangan, seperti yang banyak terjadi di negara-negara belum berkembang lain, yakni menjadi golongan tuan tanah dan golongan buruh tani. Masyarakat petani Jawa tetap dapat mempertahankan tingkat homogenitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagi rezeki yang ada, hingga makin lama makin sedikit yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat. Proses pembagian rezeki inilah yang oleh Geertz disebut *shared poverty* (kemiskinan yang dibagi rata; memiskinkan bersama).

Terlihat bahwa kemiskinan yang diderita masyarakat petani Jawa tidaklah muncul dari kultur mereka, seperti yang diduga Boeke, tetapi akibat kewajiban tanam paksa. Proses memiskinkan bersama tersebut merupakan respons atas politik ekonomi pertanian kolonial. Bentuk strategi yang seperti itu bukannya tanpa alasan, karena peluang lain tidak tersedia. Sektor ekonomi lain, di luar sektor pertanian, seperti perdagangan dan industri misalnya telah tertutup. Bagi kaum kolonial, petani adalah komponen masyarakat tanah jajahan yang dapat mengeksploitasi tenaga dan tanahnya sendiri untuk kepentingan ekonomi pemerintah. Dalam konteks ketiadaan peluang itulah, tak ada pilihan lain bagi petani selain mengembangkan strategi defensif dalam bentuk *shared poverty*. Dalam hal ini, (Scott, 1981) yang menyatakan tentang perilaku petani yang cenderung tidak mengambil risiko dalam produksi pertaniannya akibat dari tekanan eksternal, dapat dikutip seperti berikut:

“Ia muncul dari dilema ekonomi sentral yang dihadapi oleh kebanyakan rumah tangga petani. Oleh karena mereka hidup begitu dekat dengan batas subsistensi dan menjadi sasaran permainan cuaca serta tuntutan-tuntutan dari pihak luar, maka rumah tangga petani tidak mempunyai banyak peluang untuk menerapkan ilmu hitung keuntungan maksimal menurut ilmu ekonomi neoklasik yang tardisional. Satu hal yang khas adalah bahwa yang dilakukan oleh petani yang bercocok tanam itu adalah berusaha menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil resiko. Dalam bahasa pembuatan-keputusan, tingkah lakunya itu disebut enggan-resiko (risk-averse); ia meminimumkan kemungkinan subyektif dari kerugian maksimum.

Prinsip ‘safety first’ alias dahulukan selamat inilah yang melatarbelakangi banyak sekali pengaturan teknis, sosial dan moral dalam suatu tatanan agraris... Penggunaan lebih dari satu jenis bibit, cara bertani pada lahan-lahan terpecah, merupakan sekedar dua contoh tentang cara-cara klasik untuk menghindari resiko yang tidak perlu, seringkali dengan akibat

berkurangnya hasil rata-rata. Di dalam konteks desa, beraneka-ragam pengaturan sosial yang khas digunakan untuk menjamin penghasilan minimum bagi penduduknya. Adanya tanah komunal yang secara berkala dibagi-bagikan kembali ... berfungsi dalam rangka itu. Selain itu, tekanan-tekanan sosial di dalam desa ... mempunyai efek redistributif tertentu: petani-petani kaya diharapkan menjadi dermawan, mensponsori perayaan-perayaan yang lebih mewah, menolong kerabat dan tetangga yang sedang dalam kesukaran, banyak bersedekah ... Seperti telah dikemukakan oleh Michael Lipton, 'banyak kebiasaan di desa yang secara sepintas lalu kelihatan ganjil, mempunyai makna sebagai bentuk-bentuk asuransi yang terselubung.'

Salah satu perilaku yang muncul dari proses memiskinkan bersama itu adalah perilaku malas yang dalam hal ini sebenarnya merupakan bentuk perilaku santai petani setelah pekerjaan di sawah atau ladang selesai. Kesantiaian itu bukan karena kemauan sendiri, tapi karena pekerjaan produktif lain di luar sektor pertanian yang bisa dilakukan

memang tidak ada. Strategi defensif yang demikian itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan kelompok yang tertekan dan termarginalisasi, yang oleh Scott (2000) disebut sebagai senjatanya kaum lemah (*weapon of the weak*) untuk melawan kondisi struktural yang menghimpitnya. Dalam perjalanan waktu strategi yang dikembangkan kaum lemah itu memang seringkali menjebak mereka sendiri untuk tetap berada di dalamnya, menjadi kekuatan struktur dan kultur yang membelit dan sangat sulit untuk diubah, kecuali ada kekuatan institusi eksternal yang mengubahnya, misalnya dengan kebijakan negara yang transformatif. Dalam konteks ini, mestinya negara pascakolonial Indonesia bisa dan harus melakukan transformasi atau mengembangkan modal sosial pada masyarakat petani. Tetapi modernisasi yang diterapkan terutama di masa rezim Orde Baru justru melanggengkan sistem ekonomi dan praktik-praktik budaya dan sosial subsistensi.

Bila merujuk pada kajian Alatas (1988) mengenai 'kemalasan' pada bangsa-bangsa rumpun Melayu, campur tangan pihak penjajah atas perilaku demikian itu cukup besar. Pihak penjajah, secara langsung atau tidak ikut terlibat dalam produksi dan reproduksi kemalasan itu melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, dan budaya. Kajian-kajian Nordholt (2002) mengenai masyarakat Bali, juga menunjukkan hal yang serupa, bahwa ada di antara unsur-unsur budaya Bali yang dicitrakan negative. Salah satunya adalah malas dan praktik-praktik ritualistik yang tidak produktif, dan ternyata itu ikut dikonstruksi oleh dan untuk kepentingan pihak kolonial.

Meskipun zaman penjajahan telah berakhir, tidak serta merta nilai budaya dan perilaku petani dan priyayi birokrat tersebut berubah. Masalahnya, pemerintah pascakolonial kemudian justru ikut memperkuat keberadaan dan kelangsungannya. Untuk kasus Indonesia tampaknya rezim Orde Baru berkepentingan dengan

pelanggengan tersebut. Tujuannya tidak berbeda jauh dengan pemerintah colonial, yaitu untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mempertahankan dan melegitimasi otoritas kekuasaannya.

Negara yang Melemahkan

Rezim Orde Lama yang memegang tampuk pemerintahan pada periode 1959-1965 dapat dikatakan sebagai pembalikan total dari sistem politik periode demokrasi parlementer (1955-1959). Masa demokrasi parlementer adalah masa di mana negara dan masyarakat mencoba untuk mewartakan pluralisme budaya, ideologi, serta kebebasan dan kontrol masyarakat sipil atas dirinya dan terhadap lembaga-lembaga negara. Tetapi sistem demokrasi partisipatif yang masih embrional itu dikecam beberapa kelompok kepentingan, termasuk Presiden Sukarno sendiri. Sistem itu dianggap sebagai tidak mengakar pada budaya politik Indonesia. Karena masih berada pada tahap formasi awal,

sistem politik itu belum menghasilkan sesuatu yang produktif, malah berlangsung konflik berlarut-larut dalam parlemen, meskipun bukan konflik terbuka. Sistem itu kemudian diporakporandakan yang ditandai dengan menguatnya lembaga kepresidenan. Meskipun pemerintahan yang dipimpin Sukarno langsung diberi label demokrasi terpimpin, kata demokrasi itu tidak memiliki korelasi dengan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Orang-orang yang tidak sesuai dengan kebijakan atau yang memiliki keberanian untuk menentang disingkirkannya, dan walaupun ada parlemen, suaranya pun dikendalikan dengan cukup ketat (Feith, 1962; Nasution, 1995).

Di pihak lain muncul dua kekuatan politik di luar lembaga kepresidenan. Pertama, PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sebelumnya hanya berperan sebagai kekuatan politik oposisi, kemudian bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga formal negara. Itu dimungkinkan karena Presiden Sukarno dalam upaya

mewujudkan agenda politiknya memerlukan aliansi dari salah satu partai politik yang besar seperti PKI. Aliansi itu tidak disia-siakan oleh PKI, karena merupakan peluang untuk memperluas basis politiknya dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas simpatisannya dari kalangan masyarakat. Kedua, Angkatan Darat (militer), muncul sebagai kekuatan politik terutama sejak diberlakukan keadaan darurat pada pertengahan tahun 1950-an akibat terjadinya berbagai gerakan separatisme di daerah. Sudah sejak awal Angkatan Darat melihat PKI merupakan ancaman potensial yang dapat membahayakan kesatuan dan ideologi negara, sehingga mendorong terbentuknya ragam organisasi massa fungsional atau mendukung organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk menahan aksi-aksi yang dilakukan PKI. Dengan demikian, peta politik di masa rezim Orde Lama dicirikan dengan terjadinya tarik-ulur yang kuat antara ketiga kekuatan

politik; Presiden Sukarno, PKI, dan Angkatan Darat (Crouch, 1986).

Di awal tahun 1960-an suhu politik memanas. Letupan konflik yang sporadis antar kekuatan-kekuatan politik mulai muncul ke permukaan, dan pertentangan itu pada mulanya banyak terjadi di daerah pedesaan (Lyon, 1984). Polarisasi sosial-politik masyarakat di masa Orde Lama memang tajam, setiap kelompok menempatkan kelompok lain sebagai lawan. Riu-rendahnya percaturan politik yang ditandai dengan konflik tersembunyi sampai benturan terbuka di antara berbagai kekuatan politik di dalam lembaga kenegaraan dan institusi kemasyarakatan telah mengakibatkan terabaikannya pembangunan ekonomi. Perekonomian Indonesia waktu itu tidak menunjukkan adanya perkembangan. Tingkat produktivitas dan pertumbuhan pada berbagai sektor sama sekali tidak ada, dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat juga tidak bisa dipenuhi. Sementara itu, situasi politik pada pertengahan tahun 1965 semakin

panas dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya konflik terbuka, ditambah lagi dengan terjadinya krisis ekonomi yang dalam. Pada akhirnya konflik meletus, dan dari ketiga kekuatan politik utama itu Angkatan Darat dengan didukung oleh kelompok-kelompok agama dan organisasi-organisasi politik dan sosial, para mahasiswa dan kaum intelektual yang antikomunis, dapat menguasai keadaan Indonesia yang *chaos*. PKI dan massa pendukungnya dilumpuhkan dan diputuskan sebagai partai terlarang. Demikian juga dengan Sukarno beserta lingkaran terdekatnya. Meskipun tidak diperlakukan seperti PKI, kekuatan politik dan pengaruhnya dieliminasi.

Pergantian rezim pada tahun 1965-1966 dapat dikatakan sebagai suatu perubahan orientasi politik yang dramatis, dari doktrin retorika sosialis ala pemerintahan Sukarno ke ideologi Orde Baru yang pro kapitalis di bawah kekuasaan Suharto. Kemunculan Orde Baru pada awalnya memberikan harapan akan terjadinya perubahan dari sistem otoriter

Demokrasi Terpimpin ke sistem demokrasi partisipatif dan penguatan masyarakat sipil. Ternyata pergantian itu tidak banyak mendorong perubahan substansial dalam bidang sosial politik. Kekuasaan lembaga kepresidenan tetap menjadi pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia, bahkan menjadi bertambah kuat dan besar karena langsung ditopang kekuatan militer dengan fungsinya menjaga kestabilan politik serta teknokrat dan birokrat sebagai pelaksana pembangunan ekonomi dan administrasi pemerintahan (Liddle 1996). Karena itu, sebenarnya Orde Baru bukanlah antitesis Orde Lama seperti diklaimnya. Ia hanya berlainan dalam kebijakan ekonomi, tetapi kebijakan dan tindakan politik tidak berbeda, tetap otoriter, dan malah jauh lebih punya daya cipta untuk memperkuat dan melanggengkan otoritarianismenya.

Sistem politik Orde Baru ditopang oleh tiga jajaran utama; presiden, militer, dan birokrasi. Kekuasaan kepresidenan menempati

puncak piramida dan merupakan *primus inter pares* bagi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Di sini kekuasaan presiden sangat menentukan dalam mengontrol rekrutmen politik untuk berbagai jabatan lembaga negara. Ia juga memiliki sejumlah *financial resource* yang tidak dimiliki oleh lembaga tinggi negara lain, termasuk otoritas untuk mendistribusikan dana pembangunan nasional. Hal itu dapat dilihat dari adanya sejumlah biaya pembangunan langsung dari lembaga kepresidenan seperti dana Inpres (Instruksi Presiden) untuk kabupaten/kotamadya, pembangunan desa, kesehatan, Sekolah Dasar, dan penghijauan. Militer berperan sebagai stabilisator politik, terutama mengamankan pelaksanaan agenda-agenda yang dirumuskan lembaga kepresidenan. Prevalensinya dapat ditemukan di bidang ekonomi, sosial-

kemasyarakatan, termasuk di bidang olah raga dan kesenian. Sementara birokrasi pemerintahan adalah pelaksana dari agenda-agenda politik, ekonomi, dan sosial-kebudayaan lembaga kepresidenan (Gafar, 1999).

Dalam rangka memperoleh legitimasi dari lembaga perwakilan rakyat, partai politik yang digunakan rezim Orde Baru adalah Golongan Karya (Golkar), yang dalam setiap pemilu, dilaksanakan sejak tahun 1972 sampai tahun 1997, selalu memenangkan suara mayoritas, sehingga menjadi partai politik hegemonik, meski kemenangannya perlu diberi banyak catatan. Melalui suara Golkar inilah rezim Orde Baru mendapatkan pengesahan dari wakil-wakil rakyat untuk mengimplementasikan berbagai kebijaksanaannya. Lembaga-lembaga politik dan sosial lain seperti partai politik, organisasi massa, media massa dikontrol dengan ketat dan mereka semua harus dapat menempatkan diri dalam konteks interaksi di antara ketiga institusi utama itu. Sebagian di antaranya dapat dikooptasi dan

disubordinasikan sekedar menjadi instrumen penopang bagi pilar politik Orde Baru (Gafar, 1999). Dengan berbagai jalinan kombinasi antara lembaga-lembaga kenegaraan, kepolitikan, dan kemasyarakatan dengan lembaga kepresidenan sebagai pusatnya, posisi masyarakat kebanyakan dengan sendirinya sangat lemah. Meskipun perangkat, aparat, dan institusi negara mengembangkan citra diri mereka sebagai kelompok yang *benevolence*, pola hubungan yang bersifat *benevolence-obedience* itu lebih menunjukkan ciri hubungan dominasi negara atas masyarakat.

Di sektor administratif, Orde Baru sangat tergantung pada struktur birokrasi yang rumit yang fungsi sebenarnya adalah untuk melakukan pengawasan atas perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan masyarakat. Secara formal terlihat ada lembaga-lembaga yang mewadahi pengelompokan masyarakat, baik organisasi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi institusi-institusi itu bercorak korporatis, bersifat tunggal dan seragam. Umpamanya organisasi

untuk para pemuda diwadahi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk petani dan nelayan diwadahi dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HKTI/HNSI), untuk pegawai negeri ada Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), untuk perempuan diwadahi dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk para pengusaha, dan sebagainya. Di samping itu, pimpinan organisasi-organisasi itu harus melalui penyaringan ketat dari aparat militer dan birokrasi. Kesemua cara pengendalian itu diarahkan supaya tidak terjadi pertentangan antarkelompok kepentingan serta terciptanya keselarasan, kesetiakawanan, dan kerjasama dalam hubungan antara negara dan masyarakat atau lebih tepat supaya masyarakat tetap berada di bawah pengawasan negara.

Bagi negara Orde Baru siapa pun harus tunduk dan di bawah kendalinya. Sedikit saja reaksi atau

sikap yang berbeda dengan segera diredam. Masyarakat dilihat sebagai kekuatan yang akan senantiasa mengganggu eksistensi negara, sehingga perlu diwaspadai dan diawasi seketat mungkin. Dengan sendirinya, pluralitas dilarang dan solidaritas horisontal antar kelompok masyarakat disingkirkan. Yang diperbolehkan adalah relasi vertikal, yaitu kesetiaan kepada negara. Negara adalah kepala keluarga, dan sebagai kepala keluarga imbauan, nasihat, dan petunjuknya adalah hukum yang mesti dituruti, tidak boleh ada pembangkangan. Rezim Orde Baru mempersepsi kemajemukan masyarakat sebagai persoalan besar dalam proses integrasi nasional dan karenanya sangat perlu dieliminasi. Heterogenitas dilihat sebagai gangguan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, sehingga mesti dikurangi. Semua kelompok harus memiliki kerangka berpikir dan berperilaku yang sama demi menjaga persatuan dan kesatuan.

Hasil kajian Feith (1984) tentang pembangunan ekonomi pada awal

tahun 1970-an, mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia ternyata dimotori negara, bukan oleh masyarakat. Di sini negara memiliki peran yang sangat besar, mulai dari tahap perencanaan sampai pada implementasi, bahkan dalam penyediaan dan alokasi dana, siapa yang melaksanakan, dan di mana pembangunan tersebut dilakukan, ditentukan negara. Arah pembangunan ekonomi yang dipilih adalah sistem kapitalisme, dengan meniru negara-negara kapitalistik maju (*developed countries*). Dalam membangun ekonomi kapitalistik ini para elit negara merekrut orang-orang tertentu, kerabat atau teman dekat, untuk menjadi pengusaha atau mereka sendiri yang langsung menjadi pengusaha dan kemudian melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan transnasional, yang diasumsikan mereka itu bisa menyediakan modal, kemungkinan alih teknologi, dan peluang masuk ke pasar luar negeri, sementara sumber untuk pembiayaannya banyak ditumpukan

pada utang luar negeri. Bersamaan dengan pembangunan ekonomi, negara juga membangun bidang politik, yang dikonsepsikannya sebagai stabilitas politik, suatu kondisi di mana keamanan dalam negeri harus tetap terjaga, tidak ada oposisi dari kelompok-kelompok sipil warga masyarakat atau kekuatan-kekuatan politik lain di luar negara. Diasumsikan bahwa stabilitas politik adalah prasyarat imperatif bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Sudah tentu untuk bisa mewujudkan stabilitas politik ini negara melakukan tindakan represif dan koersif terhadap siapa pun yang dipersepsikannya dapat mengganggu jalannya pembangunan ekonomi dan keamanan negara.

Strategi pembangunan ekonomi yang memprasyaratkan stabilitas politik tersebut disebut sebagai rezim pembangunan yang represif (*repressive developmental rezim*), yang cirinya adalah pemerintahan pada berbagai level mulai dari atas sampai ke bawah, melibatkan kaum militer, pembangunan ekonomi diatur oleh

para teknokrat dan elit birokrasi dengan sistem perencanaan terpusat dan lebih mendahulukan wilayah kota dan sektor industri dan jasa, lembaga-lembaga demokrasi yang konvensional, seperti partai politik dan legislatif, serta kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat dibatasi ruang gerak dan kegiatannya (Feith, 1984). Oleh Karl D. Jackson (1976) model pengambilan keputusan yang hanya dilakukan para birokrat tinggi yang jumlahnya terbatas, sementara lembaga-lembaga negara di luar eksekutif dan kalangan masyarakat yang lebih luas tidak memiliki peran yang berarti, diberi sebutan *bureaucratic polity*. Sedangkan Geertz (1974) menyatakan, cara pengelolaan negara yang dilakukan rezim Orde Baru itu sebagai *power house state*, di mana para pejabat cenderung menjadi kepala (*master*), bukan manajer (*manager*).

Relevan juga untuk melihat rezim negara Orde Baru yang represif itu dari konsep *bureaucratic authoritarianism* (otritarianisme

birokratik) yang diajukan Guillermo O'Donnell (1992), suatu bentuk negara otoriter yang cukup kuat dan terpadu, yang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ciri-ciri negara seperti itu antara lain: *pertama*, pemerintahan pada berbagai tingkatan banyak melibatkan dan dipegang kaum militer yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil; *kedua*, didukung oleh *entrepreneur* oligopolistik yang terdiri atas para kroni elit negara, yang bersama negara juga berkolaborasi dengan dunia bisnis internasional; *ketiga*, pengambilan keputusan bersifat birokratik-teknokratik dan sentralistik; dan *keempat*, masyarakat secara politik didemobilisasi. Munculnya rezim ini dimungkinkan karena adanya konflik antara lembaga formal negara yang anti-sosialisme dengan insritusi-institusi kemasyarakatan yang mengembangkan ideologi sosialisme. Untuk kasus Indonesia, ia timbul dari bentrokan besar antara kaum militer yang beraliansi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang

antikomunis dengan persekutuan golongan kiri dan nasionalis (Mas'oeid, 1989).

Pada mulanya, model pembangunan ekonomi yang dikembangkan negara Orde Baru banyak bertumpu atau lebih mengandalkan pada industri substitusi impor. Namun demikian, dalam perjalanannya strategi ini tidak banyak membuahkan hasil. Produk-produknya tidak kompetitif dan biaya untuk penyediaan faktor-faktor produksi jauh lebih mahal. Dalam konteks inilah kemudian strategi tersebut dialihkan menjadi industri yang berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan agar negara memperoleh dukungan dari modal asing, mampu menciptakan pasar di dalam dan luar negeri, dan menjamin kontinuitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Ariff & Hill, 1988). Walaupun sektor pertanian dibangun, tujuannya tidak untuk diintegrasikan ke dalam proses industrialisasi yang berorientasi ekspor itu, melainkan sekadar untuk memenuhi kecukupan kebutuhan pangan pokok bangsa

Indonesia. Pengembangan diversifikasi tanaman pangan dengan teknologi dan yang diorientasikan pada perdagangan komersial kebijakannya tidak dibuat secara metodis. Penekanannya adalah pada pencapaian swasembada pangan, yang dalam hal ini beras. Hanya dengan sedikit perbaikan pada cara pengolahan lahan pertanian, petani-petani tradisional yang memiliki luas lahan kecil-kecil "dipaksa" melaksanakan program swasembada ini, dimana mulai dari kredit, bibit, penyediaan sarana produksi, pengairan, dan harga jual hasilnya langsung diatur negara (Hart, 1986; Hansen, 1978). Sementara untuk pertanian lahan luas seperti perkebunan, diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan negara dan pengusaha-pengusaha bisnis besar yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian, dapat dikatakan pembangunan pertanian di pedesaan tetap berorientasi pada sistem ekonomi pertanian subsistensi, yang berarti juga ikut melanggengkan

praktik sosial subsistensi yang penuh dengan ketimpangan sosial-ekonomi, dan jauh dari mendorong pada pembentukan modal sosial dan etos kerja kewiraswastaan pada masyarakat petani. Berbeda dengan pembangunan pertanian yang dilakukan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, di samping melaksanakan *land reform*, proses diversifikasi dan industrialisasi pertanian, dan berorientasi perdagangan komersial, juga membangun organisasi dan jaringan horisontal di kalangan petani dalam rangka memperkuat posisi tawar mereka dalam berhadapan dengan negara dan kelompok-kelompok kepentingan lain serta persaingan dengan luar negeri (Winarno, 2003).

Negara Orde Baru ini sangat tergantung pada struktur birokrasi yang kompleks, yang fungsi sebenarnya adalah untuk melakukan pengawasan atas berbagai kegiatan masyarakat. Kemudian didukung pula oleh teknokrat apolitis yang berperan sebagai konseptor, perencana, dan pelaksana pembangunan ekonomi

(Hikam, 1996). Di masa Orde Baru birokrasi begitu strategis posisinya dalam proses pembangunan ekonomi. Pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan dipegangnya langsung. Melalui pembangunan ekonomi itu birokrasi mendapatkan sumber keuangan di luar gaji yang mereka terima, dan jumlahnya bisa lebih besar berkali-kali lipat dengan cara melakukan *mark up*, berkolusi dengan para pengusaha, dan melakukan praktik-praktik korupsi lainnya. Negara Orde Baru dengan sengaja membiarkan dan bahkan langsung terlibat dalam praktik KKN birokrasi itu. Di sinilah nampak, bagaimana negara tidak berupaya melakukan transformasi birokrasi ke arah bentuk yang lebih ramping organisasinya dan mewujudkan efisiensi, namun justru ikut memampatkan dan melanggengkan budaya birokrasi yang sejak lama tidak profesional dan transparan.

Di sektor politik juga tidak terjadi perubahan berarti, negara tetap menyingkirkan dan meredam berbagai aktivitas politik yang kritis.

Saluran dan akses politik berbagai organisasi massa ditutup dan walaupun diberi ruang digunakan mekanisme korporatif untuk mengkooptasi dan mengontrolnya. Untuk mengendalikan sektor sosial-politik dari massa juga digunakan kekerasan dan keahlian birokratik dan teknokratik. Cara pendekatan otoritarianisme itu dimungkinkan agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa berlangsung dan meredam munculnya kekuatan *civil society* (Hikam, 1996). Pada negara Orde Baru ini terlihat ada lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat, baik organisasi sosial, ekonomi, maupun politik tapi, meminjam konsepsi Philippe C. Schmitter (Mas'ood, 1989), institusi-institusi itu bersifat korporatisme, suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya dibatasi serta bersifat tunggal atau seragam, tidak diperbolehkan saling berkompetisi, dan diatur secara hirarkhis, yang diakui dan diberi ijin serta diberi hak monopoli untuk

merepresentasikan kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan memenuhi pengendalian-pengendalian tertentu oleh negara.

Rezim ini dilengkapi pula dengan tema-tema ideologis, yang menekankan tuntutan moral negara, seperti persatuan dan kesatuan nasional, bagaimana pentingnya stabilitas politik guna kelancaran pembangunan ekonomi nasional, dan betapa jahatnya mengganggu stabilitas politik. Dinyatakannya, tugas negara yang utama adalah menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang cepat untuk mengatasi ketertinggalan dari negara-negara maju (Feith, 1984). Secara ideologis negara yang demikian ini merujuk pada paham negara integralistik, yang menempatkan dirinya di atas masyarakat dan menganggap mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Dengan kata lain, negara menganggap dirinya sebagai representasi dari rakyat itu sendiri (Simandjuntak, 1994).

KESIMPULAN

Refleksi

Harus diakui bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki atau tepatnya sangat lemah modal sosialnya. Itu sebabnya di berbagai sektor kehidupan dan kelembagaan, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun kenegaraan, tampak ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan. Semua warga terlibat dalam kesemerawutan itu, bahkan langsung atau tidak, negara pun ikut mendukungnya. Struktur dan praktik masyarakat yang paternalistik dan feodalistik masih melekat dalam aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia. Negara sendiri meletakkan diri sebagai patron.

Namun karena terjebak pada upaya mempertahankan dan melanggengkan otonomi kekuasaannya, negara bukannya menstransformasikan struktur dan budaya masyarakat ke bentuk yang horisontal, justru menjadi bagian yang memperkuat relasi-relasi vertikalnya. Dengan penguatan hubungan atas-

bawah itu, posisi negara sebagai patron tetap akan terjaga. Dengan membiarkan kesemerawutan dan ketidakkonsistenan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, negara cukup diuntungkan. Ia akan diminta sebagai pelindung. Posisi sebagai pengayom itu akan terus dipertahankan. Untuk itulah negara kerap terlibat dalam memperkeruh ketidakteraturan dan walaupun suatu masalah ditangani, sifatnya reaktif dan hanya menyelesaikan secara temporer. Sangat kurang upaya negara dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan jangka panjang, yakni melalui pendekatan strategis dengan cara mengidentifikasi akar permasalahan dan kemudian mengeliminasinya, sehingga di masa mendatang masalah yang serupa tidak akan muncul lagi ke permukaan.

Beberapa elemen bangsa sesungguhnya ada yang memiliki organisasi dan jaringan horisontal yang eksklusif yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan kesamaan daerah, meskipun masih belum cukup kuat dan kompetitif. Di sektor bisnis

misalnya tampak dari aktivitas-aktivitas perdagangan dan jasa menengah ke bawah, khususnya penguasaan ekonomi sektor informal di perkotaan oleh orang-orang Minangkabau, Madura, Bugis-Makassar, dan bagian tertentu dari masyarakat Jawa dan Sunda, di daerah-daerah perantauan mereka. Namun kebijakan negara sering kali tidak kondusif atau tidak mencoba memfasilitasi untuk memperkuat jaringan-jaringan tersebut. Mereka justru sering dijadikan “objek pemerasan” birokrasi, umpamanya dengan membuat berbagai peraturan perizinan usaha dan retribusi yang dibuat-buat dan memakan ongkos besar. Etos kerja bisnis mereka menjadi terhambat oleh perilaku birokrasi sehingga untuk mencari selamat mereka pun berkolusi dengan birokrasi. Konsekuensinya, barang dan jasa yang mereka produksi menjadi lebih mahal. Inilah salah satu sebab tidak kompetitifnya para pebisnis bangsa ini, karena negara begitu besar campur tangannya dalam

cara yang membebani para pengusaha menengah dan kecil tersebut.

Negara pun tidak berusaha untuk mentransformasi masyarakat petani yang terlilit *shared poverty*, misalnya melalui *land reform*, diversifikasi tanaman pangan dan industrialisasi pertanian yang terkait dengan sektor industri lain, dan mengembangkan kelompok-kelompok horisontal petani yang dapat saling membantu dalam rangka mengembangkan usaha mereka. Politik pertanian yang diajukan negara pascakolonial Indonesia malah tetap ditumpukan pada sistem ekonomi subsistensi yang hanya sedikit mengalami pembaharuan pada teknik bercocok tanam melalui kebijakan swasembada pangan. Tetapi politik modernisasi ekonomi pertanian tersebut tidak diarahkan untuk mengubah struktur pertanian yang subsisten ke arah struktur agraria yang lebih egaliter, yang memungkinkan terbentuknya jaringan horisontal atau modal sosial pada masyarakat petani. Penyebab sebagian besar bangsa Indonesia yang

miskin berasal dari kaum tani, adalah karena proses modernisasi yang selama ini dilaksanakan negara tidak transformatif. Yang terjadi justru memperkuat struktur pertanian involutif, yang membatasi petani keluar dari praktik sosial-budaya subsistensi, yang dicirikan oleh kemiskinan, kemalasan, dan kebodohan.

Lembaga-lembaga pendidikan formal, langsung atau tidak, juga turut mereproduksi ketidaktertiban, mentalitas menerabas, dan perilaku-perilaku egoistik lainnya. Kekerasan remaja sekolah menengah, *tawuran* antarpelajar dan kenakalan remaja tidak juga berkurang, malah semakin meresahkan. Para remaja meskipun diajari bahwa hal itu bukan hanya mengganggu orang lain, tetapi dapat mencelakai jiwa orang lain dan dirinya sendiri, tetap saja berperilaku kasar dan semakin tidak peduli. Kurikulum yang diajarkan di sekolah atau sosialisasi di rumah dan di lingkungan ketetanggaan tentang kedisiplinan dan tanggung jawab sangat tidak efektif, tidak masuk

dalam otak dan jiwa para remaja. Lembaga pendidikan lebih berorientasi pada pendidikan kognitif dan komersialisasi. Keadaan ini, langsung atau tidak, difasilitasi negara melalui aturan-aturan yang dibuatnya.

Dalam penglihatan Dijk (2003) ketidakteraturan, tak adanya disiplin, dan tanggung jawab itu bukanlah melulu merupakan kesalahan orang-orang Indonesia. Keadaanlah yang memaksa mereka bersikap demikian. Sejumlah faktor sosial, budaya, politik, dan keadaan ekonomi memberikan kontribusi pada pelestarian perilaku yang buruk tersebut. Kesenjangan sosial yang cukup tajam dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, termasuk perbedaan tingkat pendidikan, bagaimanapun akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ikatan emosional yang kuat antara seseorang dengan kelompok suku bangsa dan kekerabatannya, akan juga mendorong pada ketidakpedulian pada kelompok lain. Di samping itu, secara budaya banyak penduduk yang belum dapat sepenuhnya berpikir

dalam konsep-konsep yang abstrak, sementara arus informasi budaya dan ilmu pengetahuan global masuk dengan deras. Ini menjadikan banyak penduduk sulit menentukan posisi dan mengambil sikap yang jelas dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara; apakah harus menuruti aturan-aturan budayanya ataukah aturan-aturan hukum formal. Kemudian juga, tampak dengan menyolok kesombongan gaya hidup yang diperlihatkan oleh beberapa anggota masyarakat kelas atas yang bisa memperlakukan aturan-aturan hukum. Akibatnya, warga masyarakat lain akan memandang dengan sinis norma-norma hukum kenegaraan itu. Terakhir, yang terpenting dan sejalan dengan arah analisis tulisan ini, kebijakan negara jauh dari konsisten dan komprehensif. Sering kali masalah yang muncul ditangani secara reaktif, sporadis, diskriminatif, dan mencari kambing hitam. Dengan demikian, politik negara bukannya mengeliminasi akar-akar permasalahan, tetapi ikut

melanggengkan ketidakteraturan. Menurut Dijk (2003), semua faktor itu menambah sulit untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Bagaimana dengan pemerintahan reformasi yang telah menumbangkan rezim Orde Baru? Di jalanan tetap semerawut, lembaga pendidikan semakin terjebak pada praktik bisnis tanpa mengindahkan etika publik, korupsi birokrasi juga tidak berhenti, masyarakat petani tetap berada dalam kondisi kemiskinan, para pengusaha juga masih dihadapkan pada aturan-aturan birokrasi yang kian membebani keuangan mereka. Otonomi daerah juga belum terlihat menghasilkan berbagai kebijakan dan aturan strategis yang pro pada pengembangan modal sosial, bahkan menjadi beban ekonomi dan sosial masyarakat daerah. Partai-partai politik lama atau baru juga belum menunjukkan dirinya sebagai kelompok politik yang dapat menyalurkan dan mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan konstituennya. Mereka justru terlibat

dalam praktik-praktik korupsi dan kolusi dengan birokrasi pemerintahan. Memang di sana-sini muncul kelompok-kelompok sipil, tetapi masih belum mampu mendorong pada berkembangnya modal sosial yang dapat menjadi kekuatan masyarakat untuk memiliki posisi tawar di bidang ekonomi dan tumbuhnya solidaritas horisontal yang dapat saling membantu dan mengontrol di antara warga masyarakat sendiri. Kelompok-kelompok sipil ini tenaganya masih banyak tercurah pada upaya-upaya untuk mengontrol negara yang memiliki kecenderungan mensubordinasikan masyarakat.

Mudah-mudahan melalui kelompok-kelompok sipil inilah modal sosial yang ada pada bangsa Indonesia yang lemah ini dapat diberi kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Sudah tentu mereka mesti pula menekan negara untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan bersama negara mendorong tumbuh-kembangnya modal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamdi, Sembirang. 2003. "Perkembangan Ekonomi Komunitas Madura di Sumbawa, NTB: sebuah Analisis Kapital Sosial", dalam *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, Edisi No. 12.
- Alatas, S.H. 1988. *Mitos Pribumi Malas; Citra Orang Jawa, Melayu, dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Arief, Mohamed & Hal Hill. 1988. *Industrialisasi di ASEAN*. Jakarta: LP3ES.
- Boeke, J.H. 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: SH.
- Boeke, J.H. 1982. "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda", dalam Sajogjo (Penyunting), *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: SH.
- Dijk, Kees van. 2003. "Ketertiban dan Kekacauan di dalam Kehidupan Indonesia," dalam Frans Husken & Huub de Jonge (eds.), *Orde Zonder Order; Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*. Yogyakarta: LKiS.
- Feith, Herbeth. 1980. "Rezim-rezim Developmentalis di Asia; Kekuatan Lama, Kerawanan Baru". *Prisma*, 11, XI November.
- Gafar, Afan. 1999. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Geertz, Clifford. 1974. "Afterword: The Politics of Meaning," dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics*. Cornell: Cornell University Press,
- Gary Hamilton. 1996. *Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*, Jakarta: Gramedia.
- Hansen, Garry E. 1978. "Bureaucratic Linkages and Policy-Making in Indonesia: BIMAS Revisited," dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley: University of California Press,
- Hart, Giliian. 1986. *Power, Labor, and Livelihood; Processes of Change in Rural Java*. Berkeley: University of California Press.
- Heffner, Robert W. 2000. *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Heffner, Robert W. 2000. "Pendahuluan: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru," dalam Robert W. Hefner (ed.), *Budaya Pasar; Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia.
- Hettne, Bjorn. 1985. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta: SH.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liddle, William R. 1996. *Leadership and Culture in Indonesia*. Sydney: Allen & Unwin.
- Lubis, Nina. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Lyon, Margo L. 1984. "Dasar-dasar Konflik di Pedesaan Jawa", dalam Sediono Tjondronegoro & Gunawan Wiradi (Penyunting). *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Gramedia.
- Mackie, Jamie. 2000. "Keberhasilan Bisnis di Kalangan Orang Cina di Asia Tenggara", dalam Robert W. Hefner (ed.), *Budaya Pasar; Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Mas'oed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 - 1971*. Jakarta: LP3ES.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago*

- between 1500 and about 1630, The Hague, Martinus Nijhoff.
- Multatuli. 1972. *Max Havelaar*. Jakarta:
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Grafiti.
- Nordholt, Henk Schulte. 2002. *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Donnell, Guillermo. 1992. "Berbagai Ketegangan di Negara Otoriter-Birokratik dan Masalah Demokrasi", dalam Roy C. Macridis & Bernard E. Brown (ed.), *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Pantoja, Enrique. 1999. *Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevance for Community-Based Development: the Case of Coal Mining Areas in Orissa, India*. Social Capital Initiative Working Paper No. 18. Washington D.C.: The World Bank.
- Pyle, Kenneth B. 1988. *Generasi Baru Zaman Meiji; Pergolakan Mencari Identitas Nasional (1885-1985)*. Jakarta: Gramedia.
- Reid Anthony. 1992. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450 - 1680; Tanah di Bawah Angin*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. 1999. *Dari Ekspansi Hingga Krisis; Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450 - 1680*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Riclefs. M.C. 1991. *Sejarah Modern Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riggs, Fred W. 1985. *Administrasi Negara-negara Berkembang; Teori Prismatis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ropke, Jochen. 1988. *Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan Ekonomi dan Prilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Schrieke, B.O.J. 1955. *Indonesian Sociological Studies*. The Hague: van Hoeve.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scott, James C. 1999. *Senjata kaum Lemah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shichihei, Yamamoto. 1985. "Logika Kapitalisme Para Samurai & Peran Samurai dalam Proses Pertumbuhan Kewirausahaan Jepang," dalam B.N. Marbun (Penyunting), *Asal-usul Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Manajemen & Kewirausahaan Jepang*. Jakarta: ppm.
- Simandjuntak, Marsillam. 1994. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: SH.
- Twang Peck Yang. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa*

- Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara.
- van Leur, J.C. 1960. *Indonesian Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung.
- Van Niel, Robert. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Weidenbaum, Murray dan Samuel Hughes. 1996. *The Bamboo Network; Bagaimana Pengusaha Cina Perantauan Menciptakan Adidaya Ekonomi Baru di Asia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Winarno, Budi. 2003. *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan; Indonesia vis a vis Taiwan, Thailand, dan Filipina*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Bank. 1998. *The Initiative on Defining, Monitoring, and Measuring Social Capital; Overview and Program Description*. Social Capital Initiative Working Paper No. 1. Washington D.C.: The World Bank.

KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP RENTENIR

Witantri Puspaningrum, Masrukin, Fatmah Siti Djawahir
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
tantri9119@gmail.com

ABSTRAK

Kampung Sri Rahayu selama ini dikenal sebagai wilayah marginal karena sebagian warganya bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap. Berbagai cara dilakukan warga di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya dengan meminjam uang kepada rentenir. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola relasi sosial dan faktor penyebab ketergantungan antara peminjam dan rentenir di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi kepada informan yang memiliki karakteristik tertentu (*purposive sampling*), dan analisis data menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentenir masih sangat diminati oleh warga Kampung Sri Rahayu walaupun bunga yang ditetapkan sangat tinggi. Melalui proses pinjam meminjam ini juga terbentuk dua pola relasi sosial yaitu pola relasi asosiatif dan pola relasi disosiatif. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang membuat peminjam menjadi ketergantungan di antaranya adalah prosedur yang sangat mudah dan cepat, tanpa syarat dan tidak ada jaminan serta tuntutan kebutuhan membuat mereka tidak mepedulikan bunga yang ditetapkan.

Kata kunci: rentenir, ketergantungan,, hubungan sosial

ABSTRACT

This research was conducted in Kampung Sri Rahayu Karangklesem Village, South Purwokerto District, Banyumas Regency. The purpose of this research is to know the pattern of social relations and the causal factors of dependency between borrowers and moneylenders. This research uses a qualitatively descriptive method, which aims to describe the pattern of social relations and some dependence between borrowers and moneylenders. Data retrieval methods are conducted with in- depth interviews, observations and documentation to informants that have certain characteristics (purposive sampling), and data analysis using interactive data analysis The results of this study showed that the loan is still very interested by the community, especially the residents of Kampung Sri Rahayu, although the flower is set very high. Through the process of borrowing, this also formed two patterns of social relations, namely the pattern of associative relations and dissociative relationship patterns. There are also several factors that make borrowers into a dependency is a very easy and fast procedure, without conditions and no guarantees and demands need to make them unconcerned about the interest set.

Keywords: moneylenders, dependence, social relations

PENDAHULUAN

Uang dalam fungsinya adalah sebagai media transaksi ekonomi dan digunakan masyarakat sebagai sebuah simbolik simpati dalam kontribusi sosial finansial seperti perayaan pernikahan, syukuran kelahiran atau upacara kematian. Selain sebagai media transaksi ekonomi, uang menjadi suatu simbol yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses pekerjaan dan pendidikan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas tentu saja menimbulkan berbagai permasalahan khususnya permasalahan dalam bidang ekonomi. Salah satu contoh permasalahan ekonomi yang kerap terjadi di kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan hutang piutang seperti halnya yang terjadi di salah satu daerah di wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya di Kampung Sri Rahayu. Hutang piutang termasuk dalam salah satu fenomena ekonomi yang menghadirkan dua aktor didalamnya yaitu sosok peminjam dan rentenir. Salah satu fenomena hutang piutang ini

mencuat karena adanya berita yang menimpa warga Sri Rahayu yakni seorang anak bernama Dewi Anggraeni yang terpaksa bekerja sebagai pengemis untuk membayarkan hutang ibunya (Maryati) yang telah meninggal dunia. Gadis kecil kelahiran 6 Februari 2004 yang kini diasuh oleh tetangganya sekaligus ibu tirinya, Sriwati ini harus bekerja keras setiap harinya dengan cara mengemis untuk melunasi beban hutang yang bermula sebesar Rp. 2000.000,00 menjadi Rp.7000.000,00 yang dipinjam oleh almarhumah ibunya ketika sakit untuk berobat.

Keberadaan rentenir seringkali ditolak oleh masyarakat karena memiliki sistem peminjaman yang memberatkan. Akan tetapi, keberadaannya tetap diakui dan di terima karena rentenir memberikan pinjaman dengan proses yang sederhana, cepat, tanpa jaminan dan uang dapat segera dicairkan secara tunai sehingga warga yang terdesak akan kebutuhan ekonomi memilih meminjam uang kepada rentenir. Ada dua kategori rentenir, yaitu yang menawarkan pinjaman dengan skala kecil dan ada juga yang menyediakan pinjam dengan skala yang besar.

Sistem pemberian pinjaman yang ditawarkan oleh rentenir ada dua macam yakni dalam bentuk uang maupun barang (*mindrink*) dengan menggunakan sistem bunga. Sistem bunga yang ditawarkan untuk uang yaitu sebesar 20% dan 10-40% untuk barang.

Hubungan yang terjadi antara rentenir dan peminjamnya disebabkan oleh dua hal yaitu hubungan kepercayaan dan hubungan saling ketergantungan. Hubungan kepercayaan menjadi dasar yang kuat antara rentenir dengan peminjamnya, disebabkan adanya timbal balik yang muncul apabila rentenir mendapatkan pendapatan dari peminjam, begitupun sebaliknya peminjam mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak pernah terlibat dengan rentenir pasti akan menganggap bahwa rentenir adalah lintah darat yang hidup di atas penderitaan peminjamnya dengan memberikan bunga sehingga seringkali dianggap sebagai eksploitasi yang semena-mena. Akan tetapi peminjam sendiri tidak pernah menganggap bahwa mereka dieksploitasi karena dirasa tidak merugikan dan dapat menolong

memecahkan masalah kesulitan keuangan. Pada kenyataannya antara rentenir dan peminjam terjadi konflik dan pertentangan terutama bila peminjam tidak dapat dijumpai atau dengan sengaja menunda untuk membayar cicilan beserta bunganya. Namun konflik yang terjadi tidak pernah mengarah kepada tindakan kekerasan fisik.

Fenomena yang terjadi ini menarik minat penulis untuk meneliti tentang bagaimana pola relasi sosial antara peminjam dengan rentenir di Kampung Sri Rahayu bisa terjadi dan apa sajakah faktor-faktor penyebab ketergantungan peminjam terhadap rentenir di Kampung Sri Rahayu, Kecamatan Karangklesem, Kabupaten Banyumas.

KAJIAN PUSTAKA

Pola Relasi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana selama hidupnya tidak akan pernah lepas dari proses interaksi sosial. Manusia lebih cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai keinginannya. Interaksi sosial menghasilkan suatu hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut dengan relasi. Hal ini terkait sebagai hubungan sosial dari

interaksi sistematis (rangkaian dari tingkah laku) yang melibatkan dua orang atau lebih. Hal ini dikatakan sistematis karena terus terjadi secara teratur dan memiliki pola yang sama. Relasi sosial dibagi menjadi dua pola yaitu :

Pola relasi sosial asosiatif

Cenderung untuk menjalin kesatuan dan dapat meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok. Relasi sosial ini bersifat positif yang berarti dapat mempererat dan memperkuat solidaritas kelompok. Beberapa bentuk relasi sosial asosiatif diantaranya kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Pola relasi yang terbentuk secara asosiatif antara rentenir dan peminjam adalah adanya hubungan kepercayaan yang terjadi diantara keduanya. Rentenir memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada peminjam begitupun sebaliknya. Bentuk-bentuk kepercayaan yang diberikan oleh rentenir diantara lain adalah memberikan pinjaman tanpa jaminan, memberikan kelonggaran waktu saat membayar cicilan hutang, peminjam dapat menjadi penjamin bagi orang lain yang mau meminjam dan peminjam bisa mendapatkan pinjaman

dikala mendesak dengan jumlah cukup besar. Setelah hubungan kepercayaan itu terbentuk maka hubungan keterlekatan akan terbangun. Ini merupakan fase kedua belah pihak ingin mempertahankan hubungannya.

Pola relasi sosial disosiatif

Bersifat negatif, berarti hubungan yang terjadi dapat memecah kesatuan, merenggangkan dan menggoyahkan jalinan atau solidaritas antar anggota kelompok yang telah terbangun sebelumnya. Beberapa bentuk relasi sosial disosiatif diantaranya persaingan, kontravensi, serta perselisihan. Pola relasi yang terbentuk secara disosiatif antara rentenir dan peminjam yaitu adanya hubungan eksploitasi, terjadi pertikaian atau konflik dan hubungan saling ketergantungan. Eksploitasi terjadi diantara hubungan keduanya karena tingkat suku bunga yang diterapkan oleh rentenir cukup tinggi. Konflik juga tidak bisa dihindari karena perbedaan kepentingan yang tidak terpenuhi sesuai dengan harapan. Salah satu contoh konflik yang dapat terjadi adalah peminjam melarikan diri dan enggan membayar cicilan hutangnya.

Faktor Ketergantungan Peminjam dengan Rentenir

Ketergantungan merupakan hasil dari orientasi-orientasi nilai yang dianut bersama oleh pihak-pihak yang berinteraksi dan penyesuaian diri dengan harapan-harapan orang lain guna memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Disisi lain ketergantungan merupakan hasil dari kekuasaan yang menguasai macam-macam sumber untuk memaksakan kemauannya pada orang lain. Ketergantungan ini yang menghasilkan suatu tindakan sosial antara peminjam dengan rentenir.

Tindakan sosial menurut Max Weber merupakan suatu tindakan individu yang memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial memperlihatkan aktor-aktor yang dituntut untuk bisa mengarahkan tindakan melalui makna yang dikonstruksi secara sosial sehingga dapat menafsirkan adat, norma, kebiasaan dan kepentingan dengan baik. Weber mengklasifikasikan empat tipe ideal tindakan sosial yaitu: (1) Tindakan rasionalitas instrumental, (2) Tindakan rasionalitas nilai, (3) Tindakan rasionalitas afektual, (4) Tindakan rasionalitas tradisional.

Keterkaitan tindakan sosial dalam

penelitian ini adalah tindakan peminjam dan rentenir dengan menggunakan pengharapan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan rentenir secara rasional. Para peminjam memiliki harapan untuk mendapatkan pinjaman uang agar dapat mencukupi kebutuhan yang dirasa kurang dengan meminjam kepada rentenir. Keberadaan rentenir di tengah para peminjam yang memiliki keterbatasan ekonomi memberikan pengaruh terhadap makna sosial. Hal ini menjelaskan makna sosial tentang tindakan yang harus dilakukan oleh peminjam yang meminjam uang melalui tindakan rasionalitas instrumental yakni lebih mengarah kepada tujuan yang akan dicapai dan dapat menentukan tindakan yang baik maupun tidak baik untuk dilakukan.

Kajian mengenai fenomena ketergantungan masyarakat terhadap rentenir ini akan dianalisis menggunakan teori patron klien menurut James Scott. Teori ini menjelaskan bahwa dalam melakukan interaksi sosial masing-masing aktor melakukan hubungan yang bersifat timbal balik dilakukan secara vertikal (satu aktor memiliki kedudukan lebih tinggi) atau secara horizontal (masing-masing aktor

berkedudukan sama).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Sasaran penelitiannya adalah peminjam dan rentenir yang berada di Kampung Sri Rahayu dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai tehnik penentuan sampelnya. Peneliti menentukan dengan selektif subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Peneliti juga menggunakan sasaran pendukung di antaranya pengurus lingkungan dan wilayah Kampung Sri Rahayu (Bapak Subono), yakni ketua RT dan RW setempat. Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data di lapangan yaitu teknik wawancara mendalam, teknik observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Sementara itu, analisa data yang digunakan adalah model analisa data interaktif. Ada tiga tahap menganalisis data menggunakan model interaktif yaitu tahap reduksi data yaitu memilah data yang dianggap penting, dan membuang data yang tidak penting.

Tahap penyajian data yaitu tahap sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajiaan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu berbentuk teks narasi. Kemudian yang terakhir adalah tahap kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola relasi sosial warga Kampung Sri Rahayu dengan rentenir

Cara dimana proses ekonomi terikat jelas dalam hubungan-hubungan sosial dapat dikaji dalam kasus transaksi pinjam meminjam uang. Hubungan personal yang terjadi antara rentenir dengan peminjamnya yang cenderung meningkatkan keperluan transaksi guna mereduksi resiko yang diambil oleh si rentenir. Disisi lain kedekatan personal menjadi salah satu faktor sebagai sarana informalitas tanpa meningkatkan resiko kehilangan uang. Berdasarkan perspektif rentenir sendiri, hubungan personal mempresentasikan sarana kontrol sosial. Seorang peminjam yang belum dikenal oleh si rentenir biasanya akan menerima kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan seperti membayar bunga lebih besar,

diberlakukan jaminan, dan harus tepat waktu dalam membayar cicilan hutangnya. Dari sudut pandang yang berbeda, orang dapat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh rentenir hanya sebuah jebakan untuk meningkatkan ketergantungan peminjam kepada rentenir.

Ada dua bentuk pola relasi sosial yang akan terbentuk antara rentenir dan peminjam dan memiliki keterikatan antar individunya. Kedua pihak yang bersangkutan terlibat langsung dalam praktek peminjaman uang. Berikut merupakan dua bentuk pola relasi sosial yaitu :

Pola Relasi Sosial Asosiatif

Relasi sosial asosiatif merupakan relasi yang cenderung bersifat positif memiliki tujuan untuk memperkuat solidaritas antar anggota kelompok dan menjalin kesatuan untuk kesepakatan bersama. Beberapa bentuk relasi asosiatif yang terjadi antara rentenir dan peminjam adalah adanya hubungan kepercayaan dan hubungan keterlekatan. Kedua hubungan ini merupakan satu rangkaian yang terjalin dengan baik antara rentenir dan peminjamnya. Hubungan keterlekatan tidak mungkin dapat terjadi apabila

belum adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak.

Hubungan Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dan hal yang mendasari dalam praktek pinjam meminjam ini. Melalui sebuah kepercayaan maka terbentuk suatu hubungan yang terjadi antara rentenir dengan peminjamnya. Hubungan ini menjadi satu keterikatan yang memperkuat proses transaksi hutang piutang. Kepercayaan menjadi sebuah tolak ukur yang digunakan oleh para rentenir untuk menjalankan praktik pinjam meminjam ini, jika rentenir mempercayai si peminjam maka peminjam tersebut akan memperoleh beberapa kemudahan begitu juga sebaliknya. Bentuk-bentuk kepercayaan yang diberikan oleh rentenir kepada warga Kampung Sri Rahayu yang meminjam uang terjadi dalam dua bentuk. Pertama, memberikan pinjaman tanpa harus memberikan jaminan. Kedua, memberikan kelonggaran waktu pada saat pembayaran cicilan

Kepercayaan lain yang diberikan oleh rentenir adalah warga yang meminjam kepadanya akan diberikan kelonggaran waktu saat membayar

cicilan. Hutang yang diterapkan di Kampung Sri Rahayu adalah hutang dengan sistem harian. Pekerjaan mayoritas warga Kampung Sri Rahayu adalah hanya seorang buruh serabutan atau menjadi pengamen yang belum tentu setiap harinya mendapatkan upah sehingga rentenir menyadari bahwa mereka harus menyadari kondisi dari orang-orang yang meminjam kepadanya dan tidak memaksakan harus melakukan setoran tiap hari.

Bentuk kepercayaan selanjutnya adalah warga yang meminjam dapat menjadi penjamin bagi warga lain yang ingin meminjam uang kepada rentenir tersebut. Orang yang sudah meminjam lama dan selalu membayar setoran dengan rajin maka biasanya dapat menjadi penjamin bagi peminjam lainnya karena rentenir telah memberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Peminjam bisa mendapatkan pinjaman yang mendesak ataupun pinjaman dengan jumlah cukup besar.

Tuntutan kebutuhan sehari-hari atau keperluan mendesak menjadi salah satu faktor orang meminjam uang kepada rentenir. Salah satu bentuk kepercayaan selanjutnya adalah peminjam dapat meminjam uang dikala

mendesak membutuhkan uang dengan segera dalam nominal yang cukup besar. Peminjam yang terdesak akan kebutuhan akan meminjam kepada rentenir dan rentenir akan dengan sigap membantu karena rentenir akan merasa bahwa mereka akan mendapatkan balas budi dikemudian hari.

Hubungan Keterlekatan

Setelah hubungan kepercayaan terjalin, maka hubungan keterlekatan akan terbangun juga. Keterlekatan merupakan suatu tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan terus melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara kedua aktor. Cara peminjam atau rentenir dalam membangun suatu hubungan keterlekatan akan memberikan pengaruh pada tindakan-tindakan praktek pinjam meminjam ini. Dengan kepercayaan yang telah dibangun, maka kedua belah pihak ingin mempertahankan hubungan tersebut. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan berusaha mendekati diri dan mengenal dengan baik satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar peminjam dapat melakukan tindakan yang diharapkan oleh rentenir tersebut seperti membayar tepat waktu, tidak

berpindah ke rentenir lain dan lain sebagainya. Ini berlaku sebaliknya, peminjam mengharapkan rentenir memberikan bunga yang rendah, waktu pelunasan cicilan ditambah, tanpa ada syarat dan jaminan dan lain-lain.

Pola Relasi Sosial Disosiatif

Relasi sosial disosiatif merupakan relasi yang memiliki sifat memecah kesatuan, merenggakan solidaritas yang sudah dibangun sebelumnya. Relasi yang terbentuk secara disosiatif antara rentenir dan peminjam yaitu adanya hubungan eksploitasi, terjadi pertikaian atau konflik dan hubungan saling ketergantungan. Eksploitasi terjadi diantara hubungan keduanya karena tingkat suku bunga yang diterapkan oleh rentenir cukup tinggi. Konflik juga tidak bisa dihindari karena perbedaan kepentingan yang tidak terpenuhi sesuai dengan harapan. Salah satu contoh konflik yang dapat terjadi adalah peminjam melarikan diri dan enggan membayar cicilan hutangnya.

1. Hubungan Eksploitasi

Tindakan eksploitasi merupakan pemanfaatan sewenang-wenang terhadap aktor eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan

kompensasi kesejahteraan. Keadaan ini disadari oleh para warga Kampung Sri Rahayu yang meminjam kepada rentenir tetapi mereka tetap saja menggunakan jasa rentenir ini.

2. Hubungan Pertikaian

Dalam praktik pinjam meminjam ini tentu saja terdapat konflik atau pertikaian yang bisa atau akan terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara peminjam dan rentenir. Konflik disini tidak semata-mata sebatas perlakuan fisik tetapi meliputi konflik hati, kewajiban dan hak kedua belah pihak yang tidak sesuai dengan harapan. Pada saat menjalankan usahanya terkadang ada beberapa peminjam yang menunggak untuk membayar cicilan maupun melarikan diri lalai akan kewajibanya. Ada lagi yang saat penagihan justru membuang muka dan kalau rentenir bertanya akan membayar kapan, si peminjam akan melunjak dan marah-marah.

3. Hubungan Saling Ketergantungan

Saling ketergantungan merupakan suatu hasil orientasi-orientasi nilai yang dianut bersama oleh pihak-pihak yang berinteraksi dan penyesuaian diri atas harapan-harapan orang lain guna

memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Dasar yang digunakan untuk membentuk hubungan ini adalah komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kedua pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi semacam hubungan timbal balik yang terjadi antara rentenir dengan peminjamnya, dimana para peminjam memberi keuntungan dari bunga yang telah ditetapkan dan rentenir juga menyanggupi jumlah pinjaman yang diinginkan.

Hubungan sosial yang terjadi antara rentenir dan peminjamnya tidak lepas dari hubungan patron dan klien. Alur proses pinjam meminjam uang tersebut menunjukkan bahwa rentenir bertindak sebagai pihak patron yang memiliki modal (*capital*), kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh terhadap para peminjamnya. Warga Kampung Sri Rahayu yang memiliki hutang disini sebagai pihak subordinat diposisikan sebagai klien, yang menjadi bawahan dari patron. Pola hubungan patron-klien ini merupakan aliansi dari dua individu yang tidak sederajat baik status, wewenang, kekuasaan ataupun penghasilan, sehingga klien ditempatkan dalam

kedudukan yang lebih rendah sedangkan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi.

Faktor penyebab ketergantungan berhutang kepada rentenir

Masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir biasanya adalah masyarakat yang dikategorikan kurang mampu secara finansial atau masyarakat kalangan menengah kebawah. Kemiskinan yang menjadi tolak ukur menjadikan seseorang harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun tanpa disadari berhutang justru telah menjadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan sehingga tercipta sebuah ketergantungan. Ada tiga faktor penyebab masyarakat khususnya masyarakat Kampung Sri Rahayu menjadi tergantung kepada rentenir yaitu faktor prosedur, jaminan dan bunga.

1. Faktor Prosedur

Proses atau prosedur peminjaman kepada rentenir yang mudah menjadi salah satu faktor warga Kampung Sri Rahayu berhutang kepada rentenir. Meminjam ke rentenir sangatlah memberikan kemudahan bagi peminjamnya karena tidak diperlukan syarat yang sulit, proses cepat dan tata

cara pembayarannya pun mudah karena rentenir yang akan datang ke rumah untuk menagih cicilan hutangnya. Sedangkan jika meminjam ke bank ada beberapa proses yang harus dilalui seperti proses administrasi yang lama dan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Jika ingin melakukan pinjaman ke bank maka harus mengurus beberapa administrasi sebagai persyaratan diantaranya mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, Surat Ijin Usaha (SHU) dan harus menyertai jaminan. Namun jika meminjam kepada rentenir tidak perlu lagi mengurus administrasi paling hanya sekedar fotokopi KTP saja agar rentenir mengetahui status kependudukan si peminjam. Uang pinjaman juga dapat dicairkan saat itu juga tanpa harus menunggu proses yang lama. Untuk proses pembayaran cicilan yang diberlakukan terlampau cukup ringan karena dilakukan setiap hari dalam jumlah yang kecil sehingga tidak memberatkan.

Uang yang didapat dari pinjaman kepada rentenir akan dipotong kurang lebih sebesar 10-15% guna membayar biaya administrasi. Misal meminjam uang sebesar Rp. 1000.000,- maka

dipotong 10% jadi Rp. 1000.000,- X 10% = Rp. 900.000,-. Uang yang akan didapat adalah sebesar Rp. 900.000,-. Namun beberapa rentenir di Kampung Sri Rahayu justru menerapkan prosedur peminjaman yang dapat membuat warga yang berhutang kepada rentenir semakin tertarik yaitu tidak menerapkan potongan peminjaman. Sehingga peminjam akan mendapatkan uang secara utuh.

2. Faktor Jaminan

Jaminan adalah suatu hak dan kekuasaan atas barang yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan hutang apabila pembiayaan yang diterima tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Veithzal & Andria, 2008). Jaminan harus memiliki nilai kedudukan lebih tinggi daripada jumlah pinjaman dan berfungsi sebagai pemberi kepastian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pinjaman yang tidak segera dilunasi sesuai waktu perjanjian maka jaminan akan dilebur untuk membayar pinjaman tersebut.

Meminjam kepada rentenir menjadi sebuah daya tarik tersendiri karena selain alasan prosedural yang cenderung mudah tetapi juga masalah

jaminan dan agunan yang tidak memberatkan bahkan tidak menggunakan jaminan sama sekali. Rasa kepercayaan yang tertanam diantara rentenir dengan peminjam itulah yang membuat jaminan tidak diperlukan lagi. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari rentenir untuk menarik orang-orang meminjam kepadanya sehingga tercipta suatu ketergantungan.

3. Faktor Bunga

Masyarakat Indonesia khususnya mereka yang tinggal di Kampung Sri Rahayu memang lebih mengutamakan prosedur dan jaminan cepat mudah dibandingkan dengan bunga yang besar. Padahal pertimbangan meminjam ke bank ditawarkan bunga yang lebih ringan dibandingkan meminjam kepada rentenir. Akses yang terbatas seperti kurangnya dokumen identitas seperti KTP membuat warga Kampung Sri Rahayu enggan meminjam uang ke bank dan lebih memilih meminjam kepada rentenir yang prosedurnya lebih mudah walaupun harus membayar bunga yang jauh lebih besar jumlahnya.

Bunga yang ditawarkan oleh pihak rentenir memang sangat berbeda dengan bunga yang telah ditetapkan pada lembaga seperti bank. Bunga yang

tinggi masih menjadi andalan rentenir dan bunga tersebut merupakan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh rentenir. Menurut beberapa peminjam yang meminjam uang kepada rentenir, mereka dikenakan bunga sebesar 20-25 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Konsep peminjaman uang informal khususnya rentenir ternyata lebih diminati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dibandingkan harus melakukan pinjaman ke bank, khususnya warga Kampung Sri Rahayu.
2. Dari proses pinjam meminjam ini ada dua pola relasi sosial yang terjadi antara rentenir dan peminjam yaitu pola relasi sosial asosiatif dan pola relasi sosial disosiatif. Pola relasi asosiatif yang terjalin diantara rentenir dengan peminjamnya yaitu hubungan kepercayaan, hubungan keterlekatan sedangkan pola relasi disosiatif yang terjadi diantara keduanya adalah hubungan eksploitasi, hubungan konflik dan hubungan ketergantungan.
3. Kemudahan akses yang diberikan

seperti waktu yang cepat, tidak ada syarat, cara pembayaran yang mudah, besar pinjaman, tidak ada jaminan yang diminta dan kesepakatan lain menjadi pertimbangan masyarakat melakukan peminjaman dan hal inilah yang membuat masyarakat menjadi ketergantungan kepada rentenir.

4. Rasa percaya yang ada diantara rentenir dan peminjamnya menjadi dasar transaksi. Jika seorang rentenir telah mengembangkan perasaan percaya tersebut maka dengan senang hati menyediakan pinjaman dengan jumlah berapapun tanpa harus memberikan pinjaman begitu pula dengan orang-orang yang meminjam, merasa sudah ditolong maka tak segan untuk membayar bunga yang diibaratkan hanya sebagai uang balas budi.

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah :

1. Adanya kebijakan pemerintah yang harus berusaha membatasi atau mengurangi aktivitas rentenir dan merevisinya, karena hubungan yang terjalin diantara rentenir dan para peminjamnya adalah hubungan yang

saling ketergantungan atau timbal balik yang begitu kuat. Jika aktivitas rentenir dibatasi maka akan ada dampak baik dan buruk bagi rentenir atau orang yang meminjam kepada rentenir serta pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri.

2. Untuk lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman bagi masyarakat, sebaiknya memberikan kemudahan dalam peminjamannya baik secara prosedur ataupun syarat yang dibebankan dipermudah serta tidak pilih kasih dalam penentuan peminjam yang boleh melakukan pinjaman.
3. Untuk orang yang memilih pekerjaan sebagai rentenir sebaiknya tidak melakukan kekerasan dalam penagihan hutang, tidak menetapkan bunga besar pada setiap peminjaman dan selalu membangun rasa saling percaya kepada para peminjamnya.
4. Untuk pemerintah sebaiknya memberikan pengetahuan yang cukup untuk masyarakat dan mengadakan sosialisasi mengenai bank, sehingga masyarakat akan berfikir ulang dalam menggunakan jasa rentenir. Eksistensi bank perlu ditingkatkan agar tak kalah saing

dengan rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Persada.Dahlan, S. (1995). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: CV. Intermedia.
- Damsar, & Indrayani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PRENADAMEDIA.
- Dimiyati, K. (1997). Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi : Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo. (hal. 16). Semarang: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: PUSTAKA
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo
- Persada. Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.

Pola Interaksi Orang Tua dengan Anak dalam Membentuk Pemahaman Seksualitas

Rosi Yanna, Tri Wuryaningsih, Hendri Restuadhi
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
rosi.yanna@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan pola interaksi orang tua dengan anak dalam membentuk pemahaman seksualitas pada anak. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang pola interaksi antara orang tua dengan anak dalam membentuk pemahaman seksualitas pada anak di Pasir Wetan, Karanglewes, Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan sasaran penelitian yaitu orang tua siswa SDN Pasir Wetan. Teknik menentukan sasaran tersebut adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, kata seksualitas dan seks dipahami sebagai sesuatu yang positif dan juga negatif. Hal ini kemudian berdampak pada upaya pemberian pendidikan seks pada anak. Muncul orang tua yang terbuka dan tertutup saat memberikan pendidikan seks. Kondisi tersebut juga akhirnya berdampak pada pola interaksi yang terjalin antara orang tua dan anak terutama saat membicarakan masalah seksualitas. Pada orang tua yang terbuka mereka memunculkan pola kerja sama yang baik, namun tidak pada orang tua tertutup. Orang tua yang tertutup masih menganggap bahwa masalah yang berkaitan dengan istilah "seks" adalah hal yang tabu. Sehingga mereka enggan, menolak, malu, dan bingung ketika akan menjelaskan pada anak. Interaksi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam keseharian juga menunjukkan bahwa seksualitas seseorang telah dibentuk, ditata, dan ditanamkan sejak dini. Nilai dan norma terkait seksualitas terus dilanggengkan dalam masyarakat melalui institusi keluarga.

Kata kunci: *Seksualitas, Pendidikan Seks, Interaksi*

ABSTRACT

The article describes the way of parent-child interaction in establishing the understanding of sexuality for children. The purpose of this study is to find out, describe, and explain the way of interaction between parents and children in establishing an understanding of sexuality for children in Pasir Wetan, Karanglewes, Banyumas. The research was conducted using a qualitative method to the research informants are the parents of the SDN Pasir Wetan' students. Purposive sampling was used to determine the research informants. Based on the research, it was found that the words sexuality and sex are understood as something positive and also negative. It has an impact on efforts to provide sex education

to children. There are some parents has open mind to provide sex education, another has not. It has an impact on the way of interaction between parents and children, especially when discussing sexuality issues. The open minded parents showed a good way in talking about sexualities to their children, but not in close minded parents. Close minded parents thought conservatively that the issues related to the term "sex" are taboo. So that they are reluctant, refused, embarrassed, and confused when explaining to children. The interactions between parents and children in daily life also showed that a person's sexuality has been shaped, arranged, and instilled from an early age. Values and norms related to sexuality continue to be perpetuated in society through the institution of the family.

Keywords: *Sexuality, Sex Education, Interaction*

PENDAHULUAN

Pornografi dapat menyasar hingga ke seluruh masyarakat tidak terkecuali anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Keterpaparan anak terhadap pornografi tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat tidak sedikit dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pornografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luder, dkk (dalam Hardani, dkk., 2017) ditemukan masalah-masalah yang dapat muncul karena menonton pornografi antara lain seks bebas, kekerasan seksual, penurunan prestasi akademik, kecanduan pornografi, dan kelainan orientasi seks. Selain itu, menonton konten pornografi juga

mengakibatkan meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan anak-anak dan remaja.

Tingginya angka keterpaparan pornografi dan kasus kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas juga menyasar ke daerah-daerah di Indonesia salah satunya adalah Banyumas, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian Wuryaningsih, dkk (2019) yang dilakukan di sekolah dasar daerah Pasir Wetan, Karanglewas, Banyumas dengan sasaran penelitian siswa kelas 4 dan 5 mendapatkan hasil bahwa dari 97 siswa tersebut 41,20% menjawab pernah menonton film porno, dengan frekuensi 1 kali dalam sebulan terakhir sebanyak 39,20%. Selain itu di daerah

Pasir Wetan ini juga ditemukan kasus penyebaran pornografi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah kasus penjual cilok yang mempertontonkan video porno pada anak-anak saat berjualan di sekolah dasar. Dampaknya, murid-murid SD membeli cilok hanya untuk menonton video porno tersebut.

Pendidikan seks dapat diberikan sebagai langkah awal pencegahan kasus pornografi dan penyimpangan seksualitas pada anak. Adanya pendidikan seks, selain untuk mencegah terjadinya perilaku seksual yang menyimpang juga dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Anak akan mengetahui bagaimana dia harus berperilaku dan menjaga dirinya. Dalam hal ini keluarga menjadi salah satu lembaga terpenting dalam memberikan pendidikan seks kepada anak.

Namun sayangnya, di Indonesia masih banyak orang tua yang

menganggap bahwa pendidikan seks adalah hal yang tabu. Mereka menganggap bahwa anak-anak belum pantas menerima pendidikan yang berkaitan dengan seksualitas. Amaliyah & Fathul (2017) dalam penelitiannya “Eksplorasi Persepsi Ibu Tentang Pendidikan Anak”, menunjukkan bahwa persepsi orang tua yang negatif tentang pendidikan seks membuat mereka enggan memberikan pendidikan seks pada anak. Hal ini berdampak pada tingginya resiko pergaulan bebas, pernikahan dini, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Rahmawati (dalam Amaliyah & Fathul, 2017) anak yang tidak mendapatkan pendidikan seks akan memiliki risiko untuk melakukan perilaku seks yang negatif di masa mendatang (remaja).

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti Noegroho, dkk (2014) menunjukkan bahwa komunikasi orang tua dan remaja berpengaruh langsung terhadap

kerentanan dan keseriusan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Sehingga orang tua perlu membuat nyaman ketika berkomunikasi. Penelitian Achmad (2016) secara tegas menyatakan bahwa peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan pengetahuan anak. Berkait dengan pendidikan seks untuk anak, Achmad menemukan bahwa terdapat kendala yang dihadapi orang tua ketika memberikan pendidikan seks kepada anaknya yaitu orang tua masih menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan berbelit-belit. Sementara, Rummy (2017) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara interaksi orang tua dengan perilaku seks bebas dan agresif remaja.

Searah dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa interaksi antara orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari mengenai seksualitas sangat penting. Interaksi tersebut dapat

membentuk perilaku dan pandangan anak yang berkaitan dengan seksualitas. Namun berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada pola interaksi orang tua dengan anak dalam membentuk pemahaman seksualitas pada anak. Dalam upaya membentuk pemahaman mengenai seksualitas tersebut, pendidikan seks dapat dikatakan sebagai langkah awal yang sangat penting. Ditengah keterpaparan pornografi yang tinggi, maka bukan tidak mungkin masih terdapat kekurangan ketika berinteraksi dengan anak terkait seksualitas. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga untuk memunculkan pola-pola interaksi lain dari orang tua untuk menghindari anak dari penyimpangan yang berkaitan dengan seksualitas maupun ancaman pornografi.

TINJAUAN PUSTAKA

Seks dan Seksualitas

Seks dan seksualitas merupakan 2 hal yang berbeda, walaupun pada

dasarnya memiliki keterkaitan. Namun, dalam masyarakat sering menganggap bahwa 2 hal tersebut adalah sama. Seks secara umum dapat diartikan sebagai perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seks juga diartikan perbedaan jenis kelamin. Chomaria (2012) menjelaskan seks bersifat alamiah. Sehingga secara natural manusia memiliki hasrat seksual dan memiliki kemampuan menyalurkannya. Sedangkan, seksualitas memiliki cakupan arti yang lebih luas. Menurut Husein M (dalam Ni'am, 2016), seksualitas adalah konsep yang lebih abstrak, mencakup aspek yang tak terhingga dari keberadaan manusia, termasuk di dalamnya aspek fisik, psikis, emosional, politik, dan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan manusia. Seksualitas seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritual. Jadi dalam hal ini, seksualitas lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang ada dalam masyarakat.

Pada dasarnya seksualitas berkembang dari anak baru lahir hingga dewasa. Tahapan tersebut tentunya akan terganggu ketika anak di usia sekolah dasar diberikan rangsangan seksual seperti pornografi yang belum bisa mereka artikan. Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis, fisik, dan kognitif anak yang belum siap. Engel (2012) menyatakan anak yang menerima rangsangan seksual tidak pada usianya menjadi bingung, dan mengalami disorientasi yang dapat mengakibatkan perilaku seksual menyimpang. Oleh karena itu pengetahuan mengenai seks dan seksualitas menjadi sangat penting untuk bekal perkembangan anak.

Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini

Pendidikan seks dapat disimpulkan sebagai pendidikan yang diberikan mengenai fungsi dan perkembangan jenis kelamin serta mengarahkan bagaimana berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan seksualitasnya. Pendidikan seks

penting diberikan sejak dini. Hal ini berkaitan pula dengan manfaat dari pendidikan seks itu sendiri. Haryono, dkk (2018) menjelaskan manfaat dari pendidikan seks antara lain:

1. Memberikan bekal pengetahuan serta membuka wawasan anak mengenai masalah seks secara benar dan jelas, sehingga anak memiliki kesadaran akan fungsi organ reproduksinya, serta paham cara menjaga dan memeliharanya.
2. Menghindarkan anak dari kejahatan seksual dan resiko negatif dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab.

Berangkat dari kedua manfaat tersebut di atas, pendidikan seks sejak dini sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam asumsi demikian, orang tua menjadi salah satu komponen terpenting untuk memberikan pendidikan seks kepada anak. Chomaria (2012) dalam bukunya, (Pendidikan Seks Untuk Anak : Dari Balita Hingga Dewasa), juga menyebutkan bahwa

pendidikan seks adalah tanggung jawab orang tua yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini orang tua adalah pendidik pertama bagi anak yang nantinya mempengaruhi bagaimana perilaku anak tersebut. Ketika pendidikan seks ini tidak diberikan oleh orang tua, anak jadi enggan membicarakan hal yang terkait dengan seksualitas pada orang tua dan itu berbahaya. Orang tua akan kehilangan pengawasan kepada anaknya dan dapat menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang. Namun, sebelum memberikan pendidikan seks kepada anak, orang tua juga harus belajar terlebih dahulu apa itu pendidikan seks dan bagaimana cara memberikannya dengan tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan yang akhirnya berakhir fatal.

3. Interaksi Orang Tua dengan Anak

Pada dasarnya anak mendapatkan pendidikan pertama dari keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh Soekanto (2009) yang menyatakan bahwa keluarga batih yang biasanya terdiri dari

suami/ayah, istri/ibu, dan anak yang belum menikah memiliki fungsi pokok salah satunya adalah sebagai wadah berlangsungnya sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan proses anak-anak dididik untuk memahami dan menganuti kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya orang tua yang bertanggung jawab dalam proses sosialisasi tersebut kepada anak. Dalam sosialisasi terbentuk interaksi yang kemudian dapat mempengaruhi bagaimana karakter anak tersebut. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat memiliki pola atau bentuk yang berbeda. Saleh (dalam Aulia, 2017) membedakan pola interaksi menjadi 5 antara lain : 1) Mutualisme (kerjasama), yaitu bentuk interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 2) Parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan salah satu pihak. 3) Persaingan (kompetisi), yaitu interaksi yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang berusaha berebut mencapai suatu keinginan dalam waktu

yang sama. 4) Konflik (pertentangan), yaitu interaksi yang menunjukkan individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman maupun kekerasan. 5) Akomodasi (persesuaian), yaitu sebuah upaya dari individu atau kelompok untuk meredakan atau menghindari suatu pertentangan.

Interaksi orang tua dengan anak tidak hanya menempatkan orang tua sebagai pendidik atau pengasuh. Orang tua juga sering menempatkan diri sebagai teman bahkan sahabat dari anaknya tersebut. Jadi dalam hal ini orang tua menempatkan diri saat berinteraksi dengan anak sesuai dengan tujuan mereka. Kemudian Interaksi juga bisa berarti terbentuknya proses pemaknaan, pertukaran simbol, dan maknanya. Dalam prinsip-prinsip interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, Manis dan Meltzer, A.Rose, Snow (dalam Ritzer, 2012) ditunjukkan

bahwa tindakan dan interaksi dapat mengubah sekaligus memodifikasi makna serta simbol yang mereka gunakan berdasarkan penafsiran individu-individu yang terlibat di dalamnya. Contohnya ketika orang tua berinteraksi dengan anaknya tentang nama-nama jenis kelamin dan menyebutnya dengan istilah-istilah yang tabu diucapkan dalam keseharian. Hal tersebut akan berdampak pada anak-anak akan menempatkan pembicaraan yang berkait dengan jenis kelamin itu sebagai hal yang tabu pula. Seiring berjalannya interaksi di antara keduanya, kekeliruan itu dapat diperbaiki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di Pasir Wetan, Karanglewas, Banyumas. Sasaran penelitian ini yaitu Orang Tua Siswa SDN Pasir wetan, yang ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder. Data diperoleh dengan teknik wawancara mandalam, FGD (Focus Group Discussion), observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan analisis interaktif. Kemudian untuk sasaran validasi dalam penelitian ini ada 2 yaitu guru dan siswa SDN Pasir Wetan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Orang Tua Siswa dan Seksualitas : Relasi Laki-Laki dengan Perempuan

Manusia merupakan makhluk seksual yang diciptakan Tuhan YME dengan dibekali berupa alat kelamin yang membedakan laki-laki atau perempuan dan hasrat seksual. Berdasarkan hal tersebut manusia berupaya melakukan cara-cara untuk memuaskan hasrat seksualnya termasuk bereproduksi. Orang tua siswa juga memahami seksualitas berkait dengan jenis kelamin dan hubungan antarjenis kelamin. Bahkan secara lugas seksualitas diartikan sebagai hubungan laki-laki dan

perempuan yang mengarah pada aktivitas seksual atau persetubuhan. Namun seksualitas tidak berhenti sampai permasalahan seksual antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas seseorang dipandang dalam berbagai dimensi kehidupan seperti sosial, budaya, psikologi, dan biologis. Jadi dalam hal ini seksualitas bukan hanya persoalan individu atau pribadi, namun ada kaitannya juga dengan relasi antarindividu, dan individu dengan masyarakat. Seksualitas dipengaruhi dan dibentuk oleh tradisi, budaya hingga kebiasaan yang melekat di masyarakat.

Melalui interaksi dalam keseharian orang tua membentuk anak-anak sesuai standar identitas diri (laki-laki dan perempuan) yang selama ini terus dilanggengkan dalam masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai gender. Namun kekeliruan dalam pembagian peran gender telah mendorong ketimpangan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Ketimpangan

tersebut juga tercermin dalam pengalaman seksualitas seseorang. Seksualitas laki-laki selalu berkaitan dengan mempertahankan dan menunjukkan sifat kelaki-lakiannya, perilaku-perilaku yang cenderung dominan, dan lebih bebas mengekspresikan hasrat seksualnya. Sedangkan seksualitas perempuan lebih ditekan untuk sesuai dengan konstruksi sosial, bahkan hasrat seksualnya juga dibatasi. Hasilnya adalah perempuan menjadi pihak yang lebih pasif, selalu menerima atau dalam bahasa jawa disebut *legowo*.

2. Persepsi Orang Tua tentang Seks dan Pendidikan Seks: Anatomi Tubuh dan Tabu

Salah satu tokoh dalam Sosiologi Klasik yaitu George Herbert Mead (1863-1931) memahami persepsi sebagai kesan sesuatu obyek di dalam benak pikiran seseorang (dalam Ritzer, 2000). Melalui kesan itulah seseorang memutuskan tindakannya atas sesuatu obyek tersebut. Begitu juga terkait

persepsi orang tua tentang seks. Persepsi yang dimiliki orang tua tersebut juga akan dijadikan acuan dalam memberikan yang pemahaman mengenai seksualitas bagi anak-anak. Namun dalam hal ini persepsi seseorang terhadap sesuatu juga berbeda-beda. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial-kultural setiap orang yang beragam.

Dalam hal ini persepsi orang tua tentang seks itu sejalan dengan cara mereka mempersepsikan pendidikan seks. Persepsi orang tua mengenai seks dan pendidikan seks terbagi menjadi 2 yaitu positif dan negatif. Pertama dari sisi positif, seks dipandang sebagai perbedaan anatomi tubuh termasuk jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pendidikan seks juga diartikan sebagai pendidikan yang mengajarkan mengenai perbedaan jenis kelamin dan fungsinya.

Selain itu pendidikan seks juga dipandang sebagai tuntunan hidup bagi manusia terkait seks. Cara pemahaman

demikian akan menempatkan pendidikan seks sebagai sebuah tuntunan yang berorientasi kepada perbaikan akhlak manusia sendiri. Kedua dari sisi negatif, seks dipandang sebagai sesuatu yang tabu yaitu sebagai hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Maka pendidikan seks dianggap sebagai hal yang tabu pula. Padahal pendidikan seks memiliki cakupan luas antara lain terkait pengenalan fungsi organ tubuh, perkembangan sesuai jenis kelamin, bagaimana berperilaku yang baik dan benar sesuai seksualitasnya, pergaulan, bahkan menyangkut norma dalam masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Chomaria (2012) bahwa pendidikan seks bagi anak bukan mengajarkan hubungan badan, melainkan upaya memberikan pemahaman mengenai fungsi alat seksual dan naluri alamiah yang mulai timbul, membimbing dalam menjaga dan menjaga organ intim, pergaulan yang sehat, serta resiko yang

dapat terjadi seputar masalah seksual. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan pendidikan seks sejak dini untuk mempersiapkan dirinya di kemudian hari.

3. Urgensi Pendidikan Seks : Membentuk Akhlak yang Baik

Pendidikan seks dalam masyarakat mendapatkan respon yang beragam. Ada masyarakat yang memandang pendidikan seks positif dan negatif. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemahaman yang berbeda mengenai seksualitas maupun kata seks sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan seks sangat penting diberikan kepada anak di tengah perkembangan zaman. Dahulu seks adalah tabu dan sesuatu yang dianggap “haram” ditampilkan dan diperbincangkan dalam ruang publik.

Namun seiring perkembangan zaman, berbagai hal yang terkait seks dengan mudah ditemukan dalam media massa maupun media sosial seperti

majalah, TV, kemudian juga dari kanal internet seperti, YouTube, Instagram, facebook, twitter, tiktok, dan situs-situs lain di internet. Dijelaskan oleh Kali (2013) dalam masyarakat ini terjadi kebebasan bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kaidah kebenaran yang diyakini masing-masing orang. Oleh karena itu pendidikan seks penting diberikan untuk menjaga dan menjauhkan diri anak dari bahaya pronografi, pergaulan bebas, tau yang pantas atau tidak pantas terkait seks, hingga membentengi anak dari penyimpangan seksual di kemudian hari.

Dalam masyarakat Indonesia, kata seks masih memiliki konotasi negatif. Ia biasa diartikan sebagai hubungan seksual atau persetubuhan umumnya antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan seks juga dikait-kaitkan dengan pergaulan bebas seperti yang telah dijelaskan di muka. Berangkat dari pengertian konotatif itu, seks kemudian seringkali dihubungkan dengan moral

dan akhlak. Dijelaskan oleh Fathiyyah (2011) kata akhlak berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khulk. Khulk sendiri diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dijelaskan pula bahwa akhlak merupakan kekuatan aktif dari dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Orang tua sangat yakin bahwa pendidikan seks penting dalam membentuk akhlak yang baik pada anak. Akhlak yang baik ini akan membawa anak memilah mana yang boleh atau tidak boleh dia lakukan sebagai seorang manusia. Dengan akhlak yang baik, orang tua sangat percaya bahwa kehidupan anaknya juga akan berjalan baik dan sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Upaya Orang Tua Memberikan Pendidikan Seks pada Anak: Orang Tua Terbuka vs Orang Tua Tertutup

Walaupun orang tua menganggap pendidikan seks penting, namun dalam

prakteknya masih ada pro dan kontra mengenai pendidikan seks pada anak. Ada orang tua yang secara terbuka memberikan pendidikan seks pada anak. Ada pula orang tua yang tertutup dalam memberikan pendidikan seks kepada anak. Artinya pendidikan seks tidak diberikan secara utuh dan terkesan ditutup-tutupi. Bahkan tidak jarang ada pula orang tua yang enggan memberikan penjelasan terdapat sesuatu yang terkait pendidikan seks. Berikut ini merupakan beberapa upaya orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak, dari orang tua yang terbuka dan orang tua yang cukup tertutup.

a. Pendidikan seks terkait aktivitas keseharian anak dalam masyarakat

Salah satu fungsi pendidikan seks adalah menghindarkan anak dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu pendidikan seks juga mengajarkan anak untuk berperilaku yang baik dan benar. Artinya anak

diajarkan pula bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian dalam tulisan Chairilisyah (2019) menurut Nawati manfaat pendidikan seks juga menjadikan anak memahami peran mereka. Semua komponen tersebut sangat penting bagi anak. Untuk mencapainya, orang tua melakukan beberapa cara antara lain:

1) Mengajarkan menutup dan menjaga aurat. Dalam hal ini anak diajarkan bagian tubuh mana saja yang boleh/tidak boleh diperlihatkan maupun disentuh oleh orang lain, melawan ketika mendapati orang menyentuh auratnya terutama organ reproduksi, dan menanamkan rasa malu. Dalam keadaan sendirian setiap orang juga harus menanamkan hal tersebut, contohnya saat mandi. Namun sayangnya masih ada orang tua yang belum mengajarkan anak untuk menutup aurat setelah mandi.

2) Menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan secara umum sesuai

konstruksi sosial. Orang tua mengajarkan mulai dari gaya busana, penampilan fisik, hingga peran gender.

b. Pendidikan seks seputar kesehatan reproduksi anak

Salah satunya pendidikan seks juga berupaya membangun kepedulian anak terhadap kesehatan reproduksi anak. Dalam Modul yang ditulis oleh Dewi, dkk (2018) dijelaskan bahwa pengetahuan yang penting terkait kesehatan reproduksi pada anak salah satunya mengenai pubertas. Masa pubertas sendiri dapat ditandai dengan perkembangan atau perubahan bentuk tubuh, mimpi basah bagi laki-laki, menstruasi bagi perempuan dan sebagainya. Dengan memberikan bekal pengetahuan tersebut, maka anak akan lebih siap menghadapinya. Berikut merupakan upaya yang dilakukan orang tua dalam upaya memberikan pendidikan seks pada anak terkait kesehatan reproduksi:

1) Memperkenalkan perbedaan jenis kelamin dan perkembangannya secara biologis. Dalam hal ini orang tua belum mengajarkan perbedaan nama jenis kelamin sesuai aslinya yaitu penis dan vagina. Orang tua lebih memilih penyebutan lokal dengan anggapan lebih sopan atau tidak vulgar. Orang tua juga berupaya menjelaskan mengenai perkembangannya secara biologis. Contohnya pada laki-laki akan tumbuh jakun dan perempuan ada payudara. Namun ada orang tua yang tidak mengajarkannya.

2) Menjelaskan mengenai menstruasi dan mimpi basah. Orang tua berupaya menjelaskan proses ketika mimpi basah dan menstruasi secara biologis. Kemudian orang tua juga mengkaitkannya dengan ajaran agama islam. Namun ada orang tua yang tidak menjelaskan hal tersebut sehingga anak menjadi takut dan tidak tahu harus mempersiapkan apa ketika mengalami hal tersebut.

c. Pendidikan seks dalam lingkup keluarga

Keluarga merupakan aspek terpenting bagi pertumbuhan seseorang. Melalui interaksi, kebiasaan, hingga latar belakang keluarga akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, keluarga perlu menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak termasuk mengenai seksualitasnya. Diawali dengan pendidikan seks dalam keluarga, maka diharapkan anak akan berperilaku dengan baik. Berikut merupakan upaya yang dilakukan orang tua dalam memberikan pendidikan seks dalam lingkungan keluarga:

1) Memisah kamar tidur dan mengajarkan etika masuk kamar tidur.

Pemisahan kamar tidur antara orang tua akan menjauhkan anak melihat aktivitas seksual yang harusnya belum dia dapatkan. Kemudian dengan mengajarkan etika ketika memasuki kamar tidur orang lain, maka anak tidak

akan sembarangan memasuki kamar tidur yang menjadi ranah privat seseorang. Namun tidak semua keluarga mengajarkan hal tersebut. Kondisi tersebut dipengaruhi bagaimana kamar tidur ditempatkan dalam rumah. Di beberapa keluarga masih terdapat kamar tidur yang digunakan bersama-sama.

2) Menjelaskan mengenai khitan. Orang tua mengajarkan mengenai khitan, dikaitkan dengan kebersihan dan agama. Lebih dari itu dengan berkhitan orang tua juga menegaskan identitas diri seorang laki-laki

Namun dari upaya-upaya diatas terdapat perbedaan antara orang tua yang terbuka yang memberikan respon positif terhadap pendidikan seks dengan orang tua tertutup yang memandang pendidikan seks sebagai hal yang tabu. Orang tua yang terbuka cenderung memberikan pendidikan seks dengan maksimal. Mereka juga berupaya menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan sang anak dengan

sebaik mungkin. Namun bagi orang tua yang tertutup, mereka cenderung menutupi dan tidak memberikan pendidikan seks secara utuh kepada anaknya.

Orang tua enggan memberikan pendidikan seks karena takut malah akan memikirkan hal yang tidak pantas atau belum sesuai dengan umur mereka. Selain itu orang tua juga kebingungan dalam menjawab pertanyaan anak yang terkait dengan seksualitasnya. Sehingga mereka memilih untuk menolak menjelaskan. Bahkan orang tua juga merasa malu ketika harus membahas mengenai pendidikan seks kepada anak.

5. Pola Interaksi Orang Tua dengan Anak dalam Keseharian Terkait Pemahaman Seksualitas

Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan sosialisasi sebagai bekal hidup bermasyarakat. Peran orang tua menjadi sangat penting sebagai agen sosialisasi. Dalam

sosialisasi terdapat proses interaksi yang akhirnya membentuk perilaku dan kepribadian anak. Anak merupakan lembaran kertas putih yang hasil akhirnya ditentukan oleh proses interaksi mereka terutama dalam keluarga melalui orang tua. Menurut Kartono (dalam Damayanti,dkk, 2018) kriteria baik dan buruk, indah dan jelek, susila atau a-susila, semua nilai ini dengan serta merta diperoleh anak dari orang tua dan orang dewasa. Sehingga dalam hal ini orang tua perlu membangun interaksi-interaksi yang baik dengan anak, termasuk terkait seksualitas. Namun interaksi yang dibangun antara keluarga satu dengan lain tentu berbeda. Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, kondisi tersebut dikaitkan dengan kemampuan seseorang berpikir atau memaknai sesuatu yang boleh jadi berbeda. Pemaknaan tersebut yang kemudian juga dijadikan acuan bagi seseorang bertindak dan berinteraksi.

Dalam keluarga yang memiliki keterbukaan komunikasi telah melahirkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Anak menjadi terbuka dan tidak malu bertanya atau bercerita kepada orang tua terkait seksualitasnya. Keterbukaan dan keharmonisan dalam keluarga juga mendorong terciptanya pola interaksi kerja sama yang baik antara orang tua dengan anak. Kerja sama (mutualisme) merupakan interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini orang tua berhasil menjalankan perannya sebagai orang tua. Kemudian di sisi lain anak juga paham mengenai nilai dan norma yang diajarkan orang tuanya sehingga mereka tidak melakukan perilaku menyimpang. Selain itu keterbukaan juga akan menjauhkan anak dari kebingungan. Hal ini karena anak tidak merasa dibohongi atas apa yang diucapkan orang tua.

Namun tidak semua orang tua terbuka dalam memberikan pendidikan

seks pada anak. Dalam hal ini ada beberapa orang tua yang tidak menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan anak terkait seksualitasnya. Kurangnya keterbukaan orang tua pada anak, membuat anak mencari sosok lain sebagai tempat bercerita. Hal ini tentu berbahaya ketika anak malah lari ke orang-orang atau sumber yang tidak baik. Selain itu, orang tua juga akan semakin sulit mengawasi anak.

6. Seksualitas, Seks, dan Pendidikan Seks

Seksualitas, seks, dan pendidikan seks merupakan 3 hal yang saling berkaitan. Seksualitas mencakup aspek luas dalam kehidupan manusia sebagai makhluk seksual. Seksualitas tercermin dalam kebiasaan yang ditampilkan individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun seksualitas bukanlah hal yang murni berasal dari Tuhan YME. Kondisi sosial, budaya, ekonomi, agama, bahkan politik telah mempengaruhi seksualitas seseorang. Oleh sebab itu, seksualitas tidak hanya berkaitan dengan pribadi

seseorang namun juga berkaitan dengan masyarakat. Melalui proses sosialisasi, seksualitas seseorang dibentuk, diatur, dan ditata sedemikian rupa. Hal ini juga disampaikan oleh Lamtiur H.T & Tito A. P (dalam Hidayana, dkk, 2004) bahwa seksualitas seseorang diatur oleh aturan baku dan dianggap sebagai “batas kenormalan” yang harus dianut penduduknya. Namun batas kenormalan di tempat satu dengan lainnya tentu berbeda. Keluarga menjadi salah satu tempat untuk melanggengkan kenormalan tersebut.

Namun Seksualitas juga sering dianggap sama dengan seks. Seks dalam masyarakat juga sering diidentikkan dengan hubungan badaniah antara laki-laki dan perempuan (hubungan seksual). Padahal pada dasarnya kata seks sendiri memiliki arti jenis kelamin. Pandangan ini yang kemudian membuat segala sesuatu yang terdiri dari kata “seks” dianggap sesuatu yang tabu atau ‘saru’ contohnya pendidikan seks.

Pendidikan seks dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas diberikan pada anak. Sehingga ketika anak bertanya terkait seksualitasnya dalam keseharian, orang tua juga enggan menjawab. Mereka lebih sering mengatakan “belum waktunya kamu tahu” atau “nanti ada waktunya”.

Seiring berjalannya waktu, pandangan tabu tersebut juga telah mulai hilang bagi sebagian orang tua. Mereka mulai membuka ruang diskusi dengan anak mengenai seksualitasnya. Namun tidak semua orang tua mengubah mindset-nya mengenai pandangan tabu tersebut. Oleh karena itu seksualitas, seks, dan pendidikan seks perlu ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dan tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sedikit demi sedikit pandangan tabu tentang ke 3 hal tersebut juga akan berubah.

KESIMPULAN

Seksualitas, seks, dan pendidikan seks merupakan 3 hal yang dapat dikatakan berkaitan. Secara garis besar orang tua siswa SDN Pasir Wetan memandang seksualitas sebagai relasi laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan hubungan seksual maupun dalam keseharian masyarakat. Melalui interaksi, identitas diri anak dibentuk, ditata, dan diarahkan sesuai dengan masyarakat yang selama ini kental akan nilai-nilai gender. Sedangkan seks juga sering disamakan dengan seksualitas sebagai sesuatu yang negatif /tabu karena sering artikan hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Namun ada pula yang memaknai seks sebagai anatomi tubuh dan jenis kelamin. Persepsi mengenai seks tersebut juga sejalan dengan cara mereka memandang pendidikan seks. Sehingga terdapat 2 pandangan mengenai pendidikan seks yaitu sesuatu yang positif dan negatif/tabu. Walaupun terdapat perbedaan pandangan, namun

pada dasarnya orang tua mengetahui akan pentingnya pendidikan seks. Dalam hal ini pendidikan seks sering dikaitkan dengan membentuk akhlak yang baik.

Namun berkaitan dengan upaya pendidikan seks, perbedaan pandangan tersebut tetap terlihat. Orang tua terbuka yang memandang pendidikan seks sebagai hal positif akan berupa menjelaskan semua tentang pendidikan seks. Namun orang tua yang tertutup, tidak menjelaskannya secara utuh. Hal ini terjadi karena orang tua takut anaknya akan memikirkan hal yang tidak pantas, kebingungan menjawab pertanyaan anak, dan perasaan malu. Sehingga dalam interaksi keseharian, bagi orang tua terbuka akan berupaya menjalin kerjasama dengan anak dengan membuka ruang diskusi mengenai seksualitas. Namun bagi orang tua tertutup, akan berupaya membatasinya. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada anak yang mencari sosok lain untuk bercerita.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Andi Nur Andriani. 2017. Peran Orang Tua terhadap Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Equilibrium: Pendidikan Sosiologi*. Vol. IV, No. 2. 223-232.
- Amaliyah, Shofwatun & Fathul Lubabin Nuqul. 2017. Eksplorasi Persepsi Ibu tentang Pendidikan Anak. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol.4, No. 2. 157-166.
- Aulia, Inneke Putri. 2017. Hubungan antara Pola Interaksi Orang Tua-Anak dengan Kedisiplinan Anak di Sekolah TK PKK Marsudi Siwi, Gunung Kelir, Pleret, Bantul. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Chairilisyah, Daviq. 2019. Sex Education In The Context Of Indonesian Early Childhood. *International Journal Of Education Best Practices (IJE BP)*. Vol. 2. No.2. 41-51

- Chomaria, Nurul. 2012. Pendidikan Seks Untuk Anak : Dari Balita Hingga Dewasa. Solo: Aqwam.
- Damayanti, Myra, dkk. 2018. Layanan Informasi dengan Media Gambar Untuk Meningkatkan Pemahaman Sex Education Siswa. Indonesia Journal Of Guidance And Counseling. Theory And Application. Vol.7. No.1. 38-44.
- Dewi, Prameswari, dkk. 2018. Modul Kesehatan Reproduksi: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Engel, Ventje Jeremias Lewis. 2012. Upaya Melindungi Anak-Anak dari Pornografi di Internet. Jurnal Sositologi. Edisi 25. 60-65.
- Fathiyah, Siti. 2011. Hubungan Pendidikan Seks dengan Akhlak Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Curug Wetam Tanggerang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Hardani, Rika, dkk. 2017. Kelekatan Anak dengan Ibu dan Ayah Serta Perilaku Pornografi pada Anak Usia Smp. Jur. Ilm. Kel. & Kons. Vol. 10, No. 2. 121-131.
- Haryono, dkk. 2018. Implementasi Pendidikan Sex pada Anak Usia Dini di Sekolah. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia. Vol.2. No.1. 24-34.
- Hidayana, I.M, dkk. 2004. Seksualitas: Teori dan Realitas. Program Gender dan Seksualitas Fisip UI : Depok.
- Kali, Ampy. 2013. Diskursus Seksualitas Michel Foucault. Cetakan 1. Ledalero Maumere.
- Ni'am, Acmad W. 2016. Perilaku Seksual Sejenis (Gay) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi. IAIN Tulungagung.
- Noegroho, Agoeng, Dkk. 2014. Komunikasi Orang Tua- Remaja dan Perilaku Preventif Seks Remaja di Kabupaten Banyumas.

- Jurnal Komunikasi Profetik.
Vol.7, No.2. 45-52.
- Ritzer, George. 2000. *Sociological Theory*. Sage Pub. Ltd., California, USA.
- _____. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edisi 8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rummy, Nur Sayyid. 2017. *Hubungan Interaksi Orang Tua dengan Perilaku Seks Bebas dan Agresif pada Remaja*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Wuryaningsih, Tri, dkk., 2019. *Anak dalam Ancaman Pornografi (Studi Tentang Akses dan Keterpaparan Anak terhadap Pornografi di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas)*, LPPM Unsoed,Purwokerto.